



KEPEI
press

Studi Tentang Sosial Budaya Masyarakat
Daerah Perbatasan :
Studi Kasus Masyarakat

Pulau Marore

Kabupaten Kepulauan Sangihe

Alex J. Ulaen
Paulina Nugrahini
Christian Setiawan
Asrullah Dukalang
Alinabur

Direktorat
dayaan

Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado

302.9072

AL6

5

**STUDI TENTANG SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT
DAERAH PERBATASAN: STUDI KASUS
MASYARAKAT DI PULAU MARORE**

**STUDI TENTANG SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT
DAERAH PERBATASAN: STUDI KASUS
MASYARAKAT DI PULAU MARORE**

Alex John Ulaen
Paulina Nugrahini
Christian Setiawan
Asrullah Dukulang
Alinabur

KEPEL
press

**Studi Tentang Sosial-Budaya Masyarakat Daerah
Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Marore**

©Penulis

Alex John Ulaen

Paulina Nugrahini

Christian Setiawan

Asrullah Dukalang

Alinabur

Narasumber Ahli : Dr. Ir. Johnny Budiman, M.Si, M.Sc dan
Ir. Lefrant Manoppo, M.Si

Disain sampul : Ninda Dian

Disain isi : Supriyadi

Cetakan pertama, Desember 2012

Diterbitkan oleh Penerbit Kepel Press

Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Purwosari, Ringroad Utara,
Yogyakarta

Telp/faks : 0274-884500

Hp : 081 227 10912

Email : amara_books@yahoo.com

Anggota IKAPI Yogyakarta

ISBN : 978-602-9374-45-2

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku

Tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Percetakan Amara Books

Isi diluar tanggung jawab percetakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan atau apa pun bentuknya yang dihasilkan lewat sebuah kajian senantiasa melibatkan banyak pihak. Bukan sekedar hasil seorang atau sejumlah peneliti yang terlibat di dalamnya. Sejak sebuah gagasan terbentuk dari hasil perenungan, penelusuran kepustakaan, pemberian kesempatan berupa penyediaan dana, keterangan dari si yang empunya keterangan atau informasi, melibatkan banyak pihak dalam sebuah jejaring. Atas dasar itu pula, kepada berbagai pihak itu patut mendapat apresiasi dan ucapan terima kasih.

Pertama, secara kelembagaan, ucapan terima kasih kami (ketua dan anggota tim) sampaikan kepada Balai Pelestarian Nilai Budaya, Manado (BPNB-Manado) yang sudah memberi kepercayaan kepada kami mengerjakan kegiatan yang mereka programkan.

Kedua, secara perorangan, bapak Drs. Rusli Manorek, yang mengepalai lembaga ini serta stafnya, khususnya saudara Budi Kristanto dan teman-teman yang tidak kenal lelah menyelesaikan berbagai persyaratan administratif.

Ketiga, Dr. Ir. John Budiman, MSc., yang telah ditunjuk menjadi narasumber ahli serta Ir. Lefrand Manopo, MSc., sebagai pembahas naskah hasil penelitian.

Keempat, bapak Griff V. Matantu, SH., Sekertaris

Kecamatan Kepulauan Marore yang sudah menerima tim dengan tangan terbuka serta segala bantuannya.

Kelima, semua narasumber kami baik yang berada di kota Manado, Bitung, Tahuna, Petta maupun yang berada di pulau Marore yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu namanya.

Tanpa mereka semua, karya ini tidak ada di tangan pembaca. Berbagai keterangan dan informasi yang mereka berikan telah menghadirkan karya ini. Namun, kekurangan dan ketidak-lengkapannya semuanya menjadi tanggung-jawab tim.

Penulis

PENGANTAR KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA MANADO

Wilayah Perbatasan memiliki arti penting dalam keberadaan sebuah negara. Namun, berbeda dengan arti kata "batas" dan "perbatasan" yang terkesan semacam pembatas atau pemisah yang ada dan pernah ada dalam keberadaan sebuah negara semisal "tembok Berlin" yang memisahkan secara tegas wilayah dua bangsa bertetangga, daerah perbatasan di wilayah NKRI tidak demikian halnya; karena pengalaman kesejarahan jualah yang "menghadirkan" wilayah-wilayah perbatasan baik itu di laut maupun di darat. Pengalaman kesejarahan wilayah perbatasan di propinsi Sulawesi Utara misalnya, dalam perjalanan sejarah merupakan sebuah kawasan di mana dapat ditemukan mobilitas penduduk, barang, dan bahkan ajaran-ajaran agama telah berlangsung sejak adanya aktivitas perniagaan pada enam atau tujuh abad yang lampau hingga kini. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila eksistensi dan arti sebuah kawasan perbatasan perlu mendapat perhatian tidak hanya dalam artian pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga dalam artian sosial-budaya.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado (BPNB) sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I. mempunyai tugas antara lain melakukan inventarisasi, kajian, dan pelestarian nilai budaya dalam arti yang luas telah mengagendakan Studi Tentang Sosial Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat di

Pulau Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang melibatkan peneliti-peneliti mitra BPNB-Manado dari Perguruan Tinggi setempat, dibiayai oleh anggaran APBN-P 2012. Buku ini merupakan laporan utama penelitian tersebut, karena ada juga laporan spesifik yang diterbitkan dalam bentuk artikel termuat dalam jurnal yang dikelola BPNB-Manado.

Para peneliti telah berupaya dalam waktu yang begitu singkat menyelesaikan buku ini. Disadari bahwa segala upaya yang dilakukan oleh para peneliti yang umumnya sudah memperhatikan kawasan ini sejak lama serta kerja keras mereka sehingga berhasil mewujudkan karya ini. Namun, mereka juga menyadari bahwa masih banyak hal yang belum terungkap dan merupakan sisi lain yang memperlihatkan adanya kekurangan dalam karya mereka. Untuk itu, dengan hati lapang dan tangan terbuka, mereka siap menerima berbagai kritikan dan saran yang nantinya bermanfaat bagi penyempurnaan buku ini.



PENGANTAR

Naskah ini adalah laporan akhir dari pekerjaan yang sudah dipercayakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado. Laporan ini merupakan perpaduan antara kajian kepustakaan serta kerja lapangan yang singkat. Singkat karena tradisi penelitian dalam antropologi dan sejarah, secara khusus etnohistori menuntut seorang peneliti harus menetap minimal dalam satu siklus aktivitas masyarakat. Tidak jarang, seorang antropolog melakukan kerja lapangan tidak hanya berbulan-bulan tetapi juga bertahun-tahun sehingga dapat menghasilkan karya yang representatif serta mampu memaparkan realita sosio-kultural warga yang dikaji.

Meskipun waktu yang disediakan oleh pemberi kerja untuk melakukan kerja lapangan hanya sebatas dua minggu, namun keterbatasan waktu ini teratasi dengan pengalaman-pengalaman lapangan sebelumnya. Kepulauan Sangihe dan Talaud, daerah perbatasan, bukanlah "ranah baru" bagi saya. Selain lahir dan dibesarkan dalam tradisi kepulauan ini, sejak berkenalan dan menjadi pembelajar antropologi dan sejarah, wilayah kepulauan ini merupakan bagian dari minat-profesional saya. Bahkan, sebagian dari warga yang pernah berbagi pengalaman mereka dengan saya masih sempat ketemu lagi. Yang menjadi persoalan adalah kekhawatiran akan munculnya hambatan-hambatan internal. Jacob Vredendregt, seorang antropolog (senior) Belanda pernah

mengingatkan bahwa semakin lama seseorang menekuni satu wilayah, satu kebudayaan, dan satu masyarakat, maka sangat besar kemungkinannya dihindangi persoalan psikologis yang disebut *going native*. Mudah-mudahan “penyakit” itu tidak akan menghinggapi saya yang justeru seorang ‘native’ yang bekerja di wilayahnya.

Pekerjaan anggota tim masing-masing dengan kegiatannya sangat membantu pengerjaan laporan ini. Paulina Nugrahini yang disertai tugas menekuni referensi yang dipilih telah melakukannya dengan baik meskipun masih banyak yang harus ia kerjakan. Asrullah Dukalang yang harus membagi waktunya antara mengurus kelengkapan administrasi penelitian dan pengumpulan data, dengan segala keterbatasan telah melakukan yang terbaik. Karena kesulitan komunikasi karena sebelum berangkat ke wilayah di ujung utara Sulawesi saya justeru harus ke ujung jazirah Sulawesi bagian Tenggara (Kendari) memenuhi panggilan profesional; pada saat-saat kritis mengejar kesempatan ke perbatasan, Julianto dengan terpaksa harus diganti oleh Christian Setiawan alias Cecep. Selama menjalani hidup ini, baru kali itu, Rabu, 19 Oktober 2012; ketika pagi hari saya masih berada di ujung tenggara daratan Sulawesi (Kendari), siangnya diujung selatan Sulawesi (Bandara Hasanuddin Makassar), sore hari setibanya di Manado – bukan pulang ke rumah tetapi – mengejar anggota tim yang sudah siap berangkat di Bitung, namun karena km Sangiang batal berangkat, langsung kembali ke Manado dan tepat jam 17 dengan km Karya Indah, bertolak dari pelabuhan Manado ke Tahuna. Pilihan “menculik” Cecep ikut dalam tim karena ia pernah disertakan dalam misi kemitraan Marin-CRC mendampingi Misael (peneliti Filipina yang berafiliasi dengan Australian National University untuk menulis disertasinya) tahun 2010 melakukan perjalanan ke Marore dan Miangas. Keahlian Cecep membidik setiap moment dan suasana dengan

kameranya sangat-sangat membantu kegiatan ini. Hampir dua ribu gambar telah direkamnya. Sebuah kumpulan data yang bermanfaat bagi penelitian lanjutan.

Semoga, laporan ini dapat diselesaikan tepat waktu dan mudah-mudahan bermanfaat secara khusus bagi pemberi kerja dan secara umum bagi para pembacanya.

Penulis

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH—v

KATA PENGANTAR — vii

DAFTAR ISI — x

BAB 1 PENDAHULUAN — 1

1.1 Latar Belakang — 1

1.2 Kajian-Kajian Terdahulu — 3

1.3 Cakupan Studi dan Tulisan Ini — 21

1.4 Kerangka Tulisan — 27

BAB 2 PULAU MARORE DALAM PETA SEJARAH NUSA UTARA— 30

2.1 Nusa Utara dalam Peta Rupa-Bumi — 33

2.2 Nusa Utara dalam Peta Sejarah Nusantara— 39

2.3 Pulau Marore dalam Peta Sejarah Nusa Utara — 48

2.4 Pulau Marore Kini — 50

BAB 3 BUDAYA SANGIHE, TRADISI BAHARI — 52

3.1. *Batiang* : "Posisi-bulan/bintang-penanda-musim— 52

3.2. Peta-bumi Nusa Utara dalam tradisi bahari— 59

3.3. Tradisi Bahari : Patah-Tiang, Hilang-Dayung— 68

3.4. *Messambo* : Yang Kalah Dari Hiruk-Pikuk
Suara Pambut Dan derum Katinting— 83

BAB 4 DARI TRADISI *BADASENG* KE DIASPORA MARORE — 86

- 4.1. *Badaseng* dalam aktivitas kehidupan sehari-hari— 87
- 4.2. *Tana abo* (pulau besar): Balut dan Sarangani di Utara, Minahasa di Selatan— 91
- 4.3. Diaspora dan Ruang-Jejaring Marore — 96

BAB 5 MARORE-MATUTUANG:

ANTARA TINAKARENG - BATUGANDING — 101

- 5.1. Satuan Sosio-Kultural yang terpilah dua — 101
- 5.2. Perjanjian Antar Negara : *Border Crossing Agreement* — 111
- 5.3. Para pelintas batas kini — 118

BAB 6 MARORE PULAU TERLUAR ATAU TEDEPAN:

BUKAN ITU MASALAHNYA — 127

- 6.1. Marore, pulau Terluar atau Terdepan — 129
- 6.2. Menjembatani keterisolasian — 141
- 6.3. Kehadiran Proyek: Rejeki Tambahan — 148
- 6.4. "*The Islanders in between*" dan menjadi Indonesia :
Tantangan Pendidikan — 152
- 6.5. Catatan Akhir dan Saran — 159

KEPUSTAKAAN — 166

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian tentang masyarakat di daerah perbatasan negara dalam dua dasawarsa terakhir ini semakin berakumulasi dilakukan oleh akademisi di Indonesia. Para peneliti yang menaruh perhatian besar terhadap isu-isu daerah perbatasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak hanya sebatas mereka yang bernaung di lembaga-lembaga penelitian baik di universitas maupun lembaga penelitian (litbang) dari berbagai institusi pemerintah seperti Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi DPR-RI,¹ Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Luar Negeri RI (BPPK-Deplu RI),² dan terutama di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan sebagainya; tetapi juga peneliti dan pengamat yang tidak berafiliasi ke institusi pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri.³

1 Poltak Partogi Nainggolan (Ed.), *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*. Tiga Putra Utama, Jakarta, 2004.

2 BPPK-Deplu RI & UNSRAT Manado, *Identifikasi Masalah Perlindungan Perbatasan Kepulauan Talaud (Indonesia – Filipina) dalam Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politik*. Laporan Penelitian, 2010.

3 Lihat misalnya, sekedar contoh dari sekian peneliti, di pihak Indonesia, Andreas Harsono,

Perhatian terhadap daerah perbatasan sudah nampak sejak awal tahun 1990-an terutama di kalangan peneliti LIPI.⁴ Nanti pada awal tahun-tahun 2000-an, daerah perbatasan menjadi topik yang menarik, dan sepertinya disebabkan oleh tiga hal. Pertama, trend kajian tentang mobilitas penduduk mengemuka di kalangan ilmuwan sosial dan beberapa pusat kajian di mancanegara, dengan lembaga mana para akademisi dan peneliti dari Indonesia mempunyai jaringan kerja; antara lain *The Japan Center for Area Studies, National Museum of Ethnography Osaka-Jepang*, yang secara intensif dalam beberapa tahun berturut-turut sejak 1994, menyelenggarakan simposium dengan tema "*Population Movement in the Modern World*."⁵ Pada simposium mana, turut terlibat para peneliti senior dari Indonesia terutama dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Kedua, adanya kekhawatiran di kalangan pengamat dalam negeri ketika Indonesia tidak dapat mempertahankan Sipadan-Ligitan. Ketiga, sejak masa pemerintahan Presiden Megawati, pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap daerah perbatasan. Perhatian ini dipertegas dan masuk dalam rencana pembangunan semasa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.⁶ Sejak masa pemerintahan Presiden

"*Miangas, nationalism and isolation*", dalam *Tempo*, No. 13/V/November 30 – Desember 06, 2004. Di pihak Filipina, Djorina Velasco, "*Navigating the Indonesia-Philippine Border: The Challenges of Life in the Borderzone*". Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies, 2010, 25 (1-2): 95 – 118.

- 4 Lihat, Aswatini Raharto, dkk., *Migrasi Kembali Orang Sangir Talaud dari Pulau-pulau di Wilayah Filipina*. Laporan Penelitian Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 1993.
- 5 Dapat disebut di sini selain Prof. Mubyarto (keynote speech), dua peneliti senior dari LIPI, yakni Aswatini Raharto dan Riwanto Tirtosudarmo turut ambil bagian sebagai pemakalah di *Japan Center for Area Studies*, bertema "*Population Movement in the Modern World IV*", di selenggarakan di Osaka (1998). Lihat, ABE Ken-ichi & ISHII Masako (Eds.), *Population Movement in Southeast Asia: Changing Identities and Strategies for Survival*. JCAS Symposium Series 10. 2000. Pada tahun 2001/2002, Riwanto Tirtosudarmo menjadi peneliti tamu di *Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa*, Tokyo; dimana Professor Koji Miyazaki bersama beberapa peneliti Eropa, antara lain Alexander Horstmann menekuni persoalan perbatasan.
- 6 Lihat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, 2004 – 2009, bagian IV-26, hal. 2.

Megawati, baik pejabat pemerintah, pejabat militer, politisi maupun akademisi dan pengamat giat mewacanakan sebutan "daerah perbatasan" sebaiknya disebut sebagai "daerah terdepan" dan "beranda depan".⁷

1.2 Kajian-kajian Terdahulu

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa selama dua dasawarsa terakhir ini daerah perbatasan mendapat perhatian dari para peneliti ilmu sosial dan ekonomi, maka dalam bagian ini akan dilihat sepintas hasil-hasil kajian – terutama yang sudah dipublikasi dalam bentuk buku dan artikel – untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang kesamaan dan perbedaan kajian-kajian tersebut dengan kajian ini. Adapun yang menjadi rujukan utama dalam bagian ini adalah hasil karya peneliti yang berada dibawah naungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, tanpa mengabaikan peneliti dari lembaga lainnya.

Tercatat, sejak tahun 1990-an, baik Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-LIPI) maupun Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI), melakukan kajian-kajian tentang daerah perbatasan. Dipimpin oleh para peneliti senior di kedua pusat ini seperti Aswatini Raharto (PPK-LIPI) dan Riwanto Tirtosudarmo (PMB-LIPI), mereka menekuni kajiannya sesuai bidang ilmunya. Para peneliti dari PPK-LIPI misalnya, menaruh perhatian secara umum terhadap "dinamika mobilitas penduduk"-nya, sementara peneliti dari PMB-LIPI menekankan pada tema utama "dinamika sosial-budaya dan ekonomi"-nya. Beberapa hasil peneltitian mereka yang sudah dipublikasi akan dibahas sepintas berikut ini.

Pertama, "Dinamika Sosial Budaya Daerah Perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah", adalah kumpulan hasil

⁷ Wacana seperti ini tidak hanya diucapkan secara lisan dan diberitakan dalam media cetak, tetapi juga dirumuskan dalam sejumlah dokumen pembangunan.

studi empat peneliti PMB-LIPI masing-masing: John Haba, Riwanto Tirtosudarmo, Robert Siburian, Herman Hidayat, meliputi empat aspek masing-masing: (1) dinamika mobilitas penduduk di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia, oleh Riwanto Tirtosudarmo; (2) hubungan antar kelompok etnis di kabupaten Nunukan oleh John Haba; (3) dinamika ekonomi masyarakat di daerah perbatasan, studi kasus di pulau Nunukan oleh Robert Siburian; dan (4) sektor kehutanan: problem dan tantangannya oleh Herman Hidayat. Adapun temuan (umum) dari studi ini adalah:

- (a) Meskipun di wilayah kajian warga setempat mengenal adanya batas negara antara Indonesia – Malaysia, namun hal itu tidak menjadi penghalang bagi warga menjalin kontak dengan warga negara jiran. Relasi ini diikat oleh adanya hubungan kekerabatan, pertemanan, dan perdagangan;
- (b) Hubungan-hubungan sosial di wilayah studi (kota Nunukan) berkorelasi dengan urusan keagamaan, kegiatan sosial dan perkawinan dengan intensitas yang tinggi. Sebaliknya, hal serupa tidak begitu menonjol di kalangan warga perantau yang menetap di negeri jiran. Adapun penyebab rendahnya kontak warga antar etnis di negeri jiran berkorelasi dengan status mereka baik sebagai pemukim legal maupun ilegal;
- (c) Letak geografis kota Nunukan memiliki arti strategis sebagai kota transit. Menjadi basis keluar masuknya tenaga kerja Indonesia (TKI), pintu masuk barang dan jasa, lalu lintas penyelundupan dan berbagai aktivitas perekonomian;

- (d) Peran kelompok pendatang terutama etnis Bugis-Makassar yang dominan di berbagai sektor formal dan informal menjadi penggerak utama kehidupan perekonomian dan politik.⁸

Kedua, "Dari Entikong sampai Nunukan, Dinamika Daerah Perbatasan Kalimantan Malaysia Timur (Serawak – Sabah)" disunting oleh Riwanto Tirtosudarmo & John Haba" diterbitkan oleh Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, dapat disebut sebagai hasil studi yang serius dikerjakan selama dua tahun (2001 – 2002) dan merupakan bagian (lanjutan) dari buku pertama di atas. Bedanya dengan buku yang dirujuk di atas adalah wilayah studi meliputi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Selain itu, ketambahan seorang peneliti sekaligus bidang studi. Dalam buku ini, kelima peneliti senior PMB-LIPI ini semakin memusatkan perhatian pada hal-hal berikut: (1) Aspek Historis Daerah Perbatasan Kalimantan Barat, oleh Soewarsono; (2) Aspek Demografi Kalimantan Barat Sebagai Daerah Perbatasan, oleh Riwanto Tirtosudarmo (3) Aspek Ekonomi di Entikong, oleh Robert Siburian; (4) Hubungan Etnis di Jagoi Babang dan Entikong, oleh John Haba; (5) Aspek sosial kehutanan di Entikong dan Jagoi Babang, oleh Herman Hidayat; (6) Karakteristik Kabupaten Perbatasan Nunukan, oleh Soewarsono; (7) Nunukan sebagai wilayah transit, oleh Riwanto Tirtosudarmo; (8) Potensi konflik etnik di daerah perbatasan Nunukan, oleh John Haba; dan (9) aspek perdagangan kayu ilegal di Nunukan, oleh Herman Hidayat. Adapun hal yang dibahas oleh para peneliti dalam buku yang dirujuk ini, terfokus kepada "... manusia, penduduk, dan masyarakat yang bermukim di daerah perbatasan (...)

8 Lihat, John Haba, "Dinamika Sosial Budaya Daerah Perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah: Pendahuluan dan Temuan" dalam John Haba, dkk., *Dinamika Sosial Budaya Daerah Perbatasan Kalimantan Timur dan Sabah*, PMB-LIPI, Jakarta, 2002 (halaman 1 – 9).

dalam konteks transformasi dan dinamika sosial budaya yang berlangsung".⁹

Beberapa simpulan dari hasil studi mereka antara lain:

- (a) warga yang menetap di wilayah yang dipisahkan oleh tapal-batas dua negara ini ternyata memiliki keterikatan sebagai warga etnis yang sama;
- (b) daerah perbatasan merupakan "*melting point*" berbagai kegiatan legal maupun ilegal;
- (c) ciri daerah perbatasan dengan kondisi keterbelakangan, miskin, tidak tertata, dan sejumlah label negatif diperbandingkan dengan ciri penduduk negara jiran;
- (d) rendahnya kualitas sumber daya penduduk lokal berhadapan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan publik menyebabkan warga pendatang dengan kualitas sumber daya manusianya lebih baik memungkinkan mereka memiliki kesempatan memanfaatkan peluang tersebut.

Selain terkumpul dalam kedua publikasi di atas, para peneliti dari PMB-LIPI juga menerbitkan hasil kajian mereka tentang perbatasan, dalam jurnal, baik yang diterbitkan dalam negeri maupun jurnal luar negeri.

Ketiga, "*Dinamika Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan*", hasil studi para peneliti dari PPK-LIPI. Terpusat pada konsep "*mobilitas penduduk*" dalam artian pola dan gerak mobilitas penduduk di daerah perbatasan, hasil studi yang terkumpul dalam buku ini memaparkan realita kependudukan di sejumlah daerah perbatasan dihubungkan dengan aktivitas tertentu. Adapun studi mereka meliputi (1) *Mobilitas Internasional Penduduk di Wilayah Perbatasan*

9 Lihat bab pengantar yang ditulis Riwanto Tirtosudarmo (hal. 8).

Indonesia, oleh Aswatini; (2) Mobilitas Penduduk Sebatik-Tawau: Dari perdagangan sampai pengobatan, oleh Mita Noverina; (3) Mobilitas Penduduk Sangihe, oleh Suko Bandiyono; (4) Dinamika Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan NTT ke Perairan Australia, oleh Alvini Pranoto; (5) Dinamika Mobilitas Sosial Budaya Masyarakat Skou di Perbatasan Papua, oleh Eniarti B. Djohan; (6) Feminisasi Migrasi: Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara oleh Ade Latifa; dan (7) Perdagangan Lintas Batas Belu-Timor Leste dan Keberadaan Pasar Perbatasan, oleh Bayu Setiawan. Simpulan umum dari ketujuh hasil studi yang disebut di atas adalah sebagai berikut:

- (a) Mobilitas penduduk di daerah perbatasan merupakan hal yang terjadi sejak adanya penduduk di kawasan itu dan sebelum terciptanya garis demarkasi atau penentuan tapal-batas antar negara.
- (b) Ada dua pola mobilitas, yakni non-permanen dan semi permanen.
- (c) Di setiap lokasi studi – dengan perbedaan karakter lingkungan geografisnya – menunjukkan perbedaan pola serta alasan atau motivasi mobilitas penduduknya.
- (d) Letak geografis yang berdekatan memungkinkan terjadinya mobilitas ulang-alik penduduk dalam waktu singkat (harian/mingguan).
- (e) Mobilitas penduduk di daerah perbatasan dilakoni oleh semua umur dengan alasan kunjungan kekeluargaan.
- (f) Motivasi mobilitas antara lain adanya ikatan kekerabatan, kegiatan ekonomi, pemenuhan layanan sosial. Namun, dari semua lokasi studi, kegiatan ekonomi yang paling menonjol dalam memotivasi mobilitas¹⁰.

10 Lihat halaman 239 – 242.

Keempat, "Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan dan Kegiatan Ilegal" kumpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh sembilan peneliti Pusat Penelitian Kependudukan-LIPI, lima orang di antaranya (Ade Latifa, Aswatini, Bayu Setiawan, Eniarti B. Djohan, dan Mita Noverina) telah disebut dalam karya di atas. Adapun hasil studi para peneliti ini membahas aspek mobilitas penduduk dalam rupa pengerahan tenaga kerja ilegal, studi Aswatini; perdagangan manusia (*human trafficking*), studi Ade Latifa; mobilitas penduduk khususnya PSK di wilayah perbatasan, studi Sri Sunarti Purwaningsih dan Eniarti Djohan; dan, pelaku kegiatan perdagangan ilegal, studi Haning Romdiati, Andy Ahmad Zaelany, Bayu Setiawan, Mita Noveria, dan Toni Soetopo.

Berbeda dengan dua hasil studi yang dikerjakan oleh peneliti dari PMB-LIPI terkonsentrasi di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia Timur atau di pulau Kalimantan, studi yang dilakukan oleh Mita Noveria dan kawan-kawan ini lebih luas wilayahnya, yakni di Batam (Indonesia – Singapura), Nunukan (Indonesia – Malaysia Timur), Perbatasan NTT-Timor Leste, Perbatasan Papua-PNG, dan perbatasan laut Indonesia-Australia. Selain keempat kumpulan studi yang dirujuk di atas, masih dapat ditemukan laporan-laporan penelitian yang dikerjakan baik oleh peneliti PMB-LIPI maupun PPK-LIPI dalam rupa mimeograph.¹¹

Kumpulan tulisan tentang perbatasan – dalam perspektif yang lebih luas – yakni dari perspektif hukum, kelembagaan, politik, ekonomi, kemasyarakatan, dan keamanan, dapat dilihat dalam "Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial" disunting oleh Poltak

11 Dua diantaranya dapat disebut disini, "Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Daerah Perbatasan Kalimantan Timur" oleh Aswatini Raharto dan Eniarti Djohan. Puslitbang Kependudukan, 1999; Laporan Pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Sangir Talaud: Konsep dan Strategi Alternatif Pembangunan. Oleh, Widayatun, Bayu Setiawan & Aswatini Raharto. Puslitbang Kependudukan, 1999.

Partogi Nainggolan¹². Seperti terbaca baik pada judulnya maupun fokus perhatiannya, studi ini lebih merupakan hasil kajian atas sejumlah kebijakan dan berbeda dengan tiga kumpulan hasil studi yang sudah dirujuk di atas yang memusatkan perhatiannya pada aspek manusia – di wilayah perbatasan – dalam konteks dinamika sosial dan budaya.

Hasil studi tentang wilayah perbatasan juga dapat dibaca dalam buku “Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan. Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan, dan Sebatik” karya Mustafa Abubakar. Buku yang semula disertasi penulisnya di IPB ini menarik karena berupaya menghimpun keterangan dari semua pulau-pulau kecil yang tersebar di perbatasan, termasuk pulau Marore dan Miangas.

Buku “Mengawal Perbatasan Negara Maritim” karya Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno, SH., bersifat biografi karir penulis selama mengabdikan dirinya di TNI-AL. Rekam-jejaknya menarik untuk disimak. Dan, lebih menarik lagi adalah bab 10 buku tersebut, karena berisikan informasi penting soal pulau-pulau kecil di perbatasan, antara lain menyebut Pulau Marore.

Selain terhimpun dan diterbitkan dalam rupa buku, sejumlah hasil kajian para peneliti – tentang daerah perbatasan – dapat pula dibaca dalam berbagai jurnal, seperti Jurnal Ekonomi dan Pembangunan¹³; Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia¹⁴; dan sebagainya. Hasil studi yang diterbitkan dalam rupa artikel ini masing-masing membahas tentang identitas warga di perbatasan dapat dibaca dalam karya Dave Lumenta, berjudul: “*Borderland Identity*

12 Lihat catatan kaki (1) di atas.

13 Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, diterbitkan oleh Pusat Penelitian Ekonomi (P2E-LIPI). Lihat Vol. XIX (1), 2011. Membangun Daerah Perbatasan Sebagai Beranda Bangsa.

14 Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, diterbitkan oleh LIPI. Lihat jilid XXX, No. 2, 2004; dan nomor-nomor lainnya.

Construction Within a Market Place of Narratives: Preliminary Notes on the Batang Kanyau Iban in the West Kalimantan"; tentang aspek budaya, dalam karya Robert Siburian, berjudul: "Ikatan Budaya Masyarakat Lintas Batas sebagai Modal Sosial Pembangunan Daerah Perbatasan di Kabupaten Belu"; tentang kondisi perekonomian dalam karya Robert Siburian, berjudul: "Kondisi Perekonomian Masyarakat Perbatasan: Entikong dan Nunukan"; dan tentang strategi pengembangan wilayah perbatasan, dalam karya Eddy MT Sianturi dan Nafsiah.

Kumpulan tulisan yang bersifat teoritik, kebijakan dan hukum dapat pula dibaca dalam "Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan. Kumpulan tulisan ini merupakan "... sumbang saran bagi formulasi kebijakan nasional tentang pengelolaan kawasan perbatasan..."¹⁵ dari Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, disunting oleh Ludiru Madu, Aryanta Nugraha, Nikolaus Loy, Fausan.

Keterangan tentang kelompok masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia – Filipina yang bermukim di kepulauan Sangihe dan Talaud dapat ditelusuri secara kronologi sejak tahun 1938, jika karya D. Brilman berjudul "*Onze Zendingenvelden. De Zending op de Sangi – en Talaud – eilanden*" atau edisi Indonesianya berjudul: Kabar Baik di Bibir Pasifik mau dijadikan penanda awalnya; disusul dengan disertasi Adrian B. Lopian "Orang Laut, Bajak Laut. Raja Laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX"; serta dua buah monografi tentang Nusa Utara tulisan Alex J. Ulaen berjudul "Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan"; serta karya dua penulis yakni Winsulangi Salindeho, seorang birokrat; dan Pitres Sombowadile, seorang aktivis dan penulis/sastrawan,

15 Sebagaimana ditulis dalam kata Pengantar (halaman vii).

yang berjudul: Kawasan Sangihe – Talaud – Sitaro: Daerah Perbatasan, Keterbatasan, Pembatasan.

Karya Brilman tidak semata-mata sebuah laporan kegiatan pekabaran injil karena di dalamnya berisikan paparan tentang ciri-ciri sosial budaya dan sejarah komunitas di kepulauan Sangihe dan Talaud. Brilman dalam karyanya, mengantar pembaca mengenali keadaan geografis kepulauan Sangihe dan Talaud seakan mengikuti pelayaran dari Manado ke utara. Sesudah menjelaskan letak kepulauan berada pada 2° 4° dan 5° 35° Lintang Utara dan 127° 10° Bujur Timur. Brilman, dalam bab I meringkas paparan tentang kepulauan Sangihe dan Talaud dengan pernyataan:

“... Sommige dicht bijeen, andere ver van elkander verwijderd, liggen ze daar tusschen de Celebes-Zee en de Grooten Oceaan als uitgestrooid door den machtigen arm van Hem, van Wien het Profetenwoord getuigde: ‘Hij werpt de eilanden daarhenen als dun stof.’ Met elkander een zeventig in getal, vormen ze als het ware een eilanden brug, die de Minahasa, het noordelijk deel van het eiland Celebes, verbindt met Mindanao, het grootste eiland der Philippijnen-group..”¹⁶

(“... Beberapa pulau sangat berdekatan, lainnya terpisah jauh dari yang lain, berada di antara Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik, bagaikan ditebar oleh tangan Dia yang Maha Kuasa, yang tentangNya para nabi bersaksi: ‘Ia mencampakkan pulau-pulau seakan debu halus kesana’. Seluruhnya berjumlah 70 mereka laksana membentuk suatu jembatan pulau-pulau yang menghubungkan Minahasa, bagian utara pulau Sulawesi, dengan Mindanao, pulau terbesar di gugusan pulau-pulau Filipina.”)

16 Brilman, 1938:1.

Sesudah mencatat keindahan alamnya Brilman menyajikan keterangan satu persatu mulai dari pulau Taghulandang, pulau Ruang, pulau Siau dengan gunung apinya, tentang negeri Ulu, pulau Mahengetang, pulau Sangi dan gunung Awu, Tamako, Manganitu, Taruna, Petta-Enemawira, Gunung (tempat pemondokan Zending untuk anak-anak sekolah), pulau-pulau Talaud; Karakelang, Beo, Salibabu dan Lirung, pulau-pulau Nanusa dan pulau Miangas. Berikut tentang iklim, tetumbuhan, dan margasatwa.

Uraian tentang penduduk dalam bab kedua diawali keterangan tentang asal usul, bahasa-bahasa, tentang ikatan keluarga, tentang kerajaan-kerajaan, tentang hubungan kekeluargaan, tentang hak milik dan warisan, tentang watak penduduk, tentang keadaan desa, tentang tempat tinggal, tentang perabot rumah, persenjataan, perlengkapan dapur, pakaian, pekerjaan, tentang keadaan ekonomi, adat kebiasaan pada waktu bersalin, kebiasaan-kebiasaan pada pertunangan, adat kebiasaan pada pernikahan, adat kebiasaan pada penguburan, pesta rakyat dan permainan rakyat, tentang pemerintahan, perpajakan, peradilan, dan peraturan adat. Brilman melanjutkan paparannya tentang agama penduduk dahulu kala dalam bab III. Keterangan didalamnya mencakup apa yang disebutnya dengan kepercayaan *mana*, penyembahan orang mati, kepercayaan pada roh-roh dan dewa-dewa, ketakutan pada suatu kuasa yang terlepas secara mekanis, ketakutan terhadap makhluk sihir, ketakutan terhadap jiwa orang mati, amulet-amulet, tindakan-tindakan pencegahan, dukun, tukang sihir, praktek-praktek shamanis, serta sistem kepercayaan lainnya. Singkat kata, membaca tiga bab karya Brilman di atas memberi kesan mendalam betapa seorang Brilman yang diutus sebagai pekabar injil, mungkin dibekali dengan pelajaran *etnografi* yang baik.

Bab IV karya Brilman merupakan *entre-point* atau pintu

masuk ke kegiatan utama yang dia lakoni di kepulauan Sangihe dan Talaud seperti terbaca pada judul bukunya: *Onze Zendingsvelden* atau Lahan-garapan pekabaran Injil (kita). Dalam bab IV ini Brilman memaparkan keadaan sebelum kedatangan para pekabar injil tukang. Bagian ini diawali dengan gambaran persentuhan daerah kepulauan ini dengan bangsa Eropa yang ditandai dengan kedatangan orang Portugis di Maluku, permulaan kegiatan pekabaran injil di Ternate, sentuhan pertama dengan penduduk Siau dan warga Nusa Utara lainnya, kedatangan bangsa Belanda, persaingan Belanda dengan Spanyol di Nusa Utara, perjanjian para raja Sangihe dengan VOC dan kedatangan para pekabar Injil yang belum terorganisir. Pada lima bab selanjutnya (bab V – bab VIII) berisikan kegiatan-kegiatan pekabaran Injil. Karya Brilman ini – dalam pemahaman penulis – terbilang karya yang penuh keterangan sahih pada masanya dari seorang pengamat dan pekabar Injil yang tinggal lama di Sangihe dan Talaud dan sangat disayangkan kalau ada peneliti maupun pemerhati masalah sejarah dan kebudayaan di daerah ini yang melewatkan begitu saja karya berharga tersebut.

“Orang Laut, Bajak Laut. Raja Laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX” adalah judul sebuah disertasi Sejarah Bahari yang dipertahankan oleh Adrian B. Lopian di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1987. Dua belas tahun setelah itu (2009) disertasi tersebut diterbitkan dalam bentuk buku oleh Komunitas Bambu dengan sokongan sejumlah lembaga keilmuan.¹⁷ Isinya tentang sejarah kelompok komunitas

17 Adapun lembaga keilmuan yang mendukung penerbitan buku ini adalah: *École Française d'Extrême Orient* (EFEO); Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; Jurusan Sejarah Universitas Padjadjaran; KITLV-Jakarta, *Total E & P Indonesia*; Arsip Nasional Republik Indonesia. Dukungan lembaga keilmuan tersebut menyiratkan isi karya dari Sejarawan Maritim pertama Indonesia ini memiliki arti dalam dunia ilmu pengetahuan, khususnya Sejarah. Dua pakar sejarah, Prof. DR. Anthony Reid menyatakan bahwa “Tidak ada sarjana Indonesia yang telah mendemonstrasikan keahliannya sebagai sejarawan lebih baik dari Adrian B. Lopian”. Guru Utama Sejarawan Indonesia, Prof.

bahariwan yang ada di Laut Sulawesi, di mana warga Nusa Utara tercakup di dalamnya. Sebagaimana lazimnya dalam sebuah karya keilmuan, dalam bab Pendahuluan, Lopian merumuskan permasalahan, ruang lingkup, bahasan atas penelitian terdahulu, kerangka konseptual yang digunakan dan sumber yang digunakan. Paparan tentang Laut Sulawesi (bab II) tidak semata membahas keadaan fisik serta perubahan alam. Diawali dengan gambaran tentang daerah perbatasan dan kesatuan wilayah, dalam bab ini juga disajikan keadaan penduduk, tentang kebudayaan maritim; tentang sejarah singkat sampai abad XIX. Tiga bab secara berurut berupa paparan yang dipilah atas "Orang Laut"; "Bajak Laut"; dan "Raja Laut". Orang Bajau merupakan representasi konsep "Orang Laut". Bajak Laut Papua, Bajak Laut Tobelo, Lanun, Mangindano, dan Balangingi merupakan representasi konsep "Bajak Laut"; dan kerajaan-kerajaan pribumi (Sulu, Mindanao Selatan, Sangir-Talaud, semenanjung Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur); kekuatan asing (Spanyol, Belanda, Inggris, dan kekuatan asing lainnya seperti Prancis, Italia, Belgia, Australia, Jerman, dan Amerika Serikat); dan Adi-Radja Laut (Senjata api, kapal api, pemberantasan bajak laut) merupakan representasi konsep Raja Laut. Keterangan tentang warga Nusa Utara tidak hanya terbaca dalam sub bab Sangir-Talaud (180 – 183), tetapi juga dalam bab II (44-45;53); dan bab-bab lainnya.

"Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan," karya Ulaen berupa sebuah etno-histori Kepulauan Sangihe

DR. Sartono Kartodirdjo, Promotor A.B. Lopian, menyatakan: "...Apa yang dilakukan Adrian B. Lopian dengan karyanya ini benar-benar merupakan keberhasilan cemerlang. Ia sudah melakukan prinsip yang mengarah ke *excellence*. Caranya memegang dan menghayati prinsip ini dalam berkarya sebagai akademisi mengingatkan bahwa '*only the best is good enough*'."

dan Talaud. Diawali dengan paparan tentang penduduk dan lingkungan alamnya; penulisnya berupaya menggambarkan latar kesejarahan dan kultural yang dapat mengekspresikan identitas-etnik penduduknya. Seperti terbaca pada judulnya, dengan merujuk pada bukti kesejarahan, penulisnya mau mengatakan bahwa ketika periode perniagaan menandai kawasan Asia Tenggara, pada masa itu pula, kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi lintasan niaga. Berakhirnya status sebagai lintasan niaga dan beralih menjadi daerah perbatasan ketika kepulauan Filipina menjadi koloni Spanyol dan Nusantara menjadi koloni Hindia Belanda. Kenyataan itu seakan memilah satuan atau jejaring yang telah tumbuh sekian masa dan warga yang hidup di wilayah perbatasan diperhadapkan dengan kenyataan bahwa jejaring-niaga yang pernah ada dan terjalin bebas, kini harus berakhir dibawah pengawasan negara kedua belah pihak. Sayangnya, karyanya tersebut menjadi sebuah kisah yang belum selesai. Dalam kata pengantarnya, menurut penulis, karya ini merupakan salah satu dari tiga karya yang merupakan satu kesatuan.

Buku berjudul: "Kawasan Sangihe – Talaud – Sitaro: Daerah Perbatasan, Keterbatasan, Pembatasan," karya Salindeho dan Sombowadile merupakan monografi yang kaya informasi. Dalam beberapa hal, buku ini seakan mau melengkapi karya Ulaen yang banyak dirujuknya. Berbeda dengan pemaparan Ulaen yang melihat Nusa Utara apa adanya, karya kedua penulis – yang satu birokrat (bupati Kepulauan Sangihe dan yang satu lagi aktivis dan penulis cum sastrawan, melihat Sangihe-Talaud-Sitaro dalam konteks yang lebih luas. Mulai dari Nusa Utara dalam kancah bangsa-bangsa, peran warga Nusa Utara dalam perjuangan kemerdekaan dengan menyertakan keberadaan tokoh Nusa Utara yang menjadi pengikut sekaligus kepercayaan Bung Karno dalam kapasitasnya sebagai tokoh pergerakan nasional. Selanjutnya kedua penulis menyoroti arti dan makna pulau-pulau kecil,

berada di daerah perbatasan, ditandai dengan ciri daerah bencana (vulkanik) yang dalam agenda pembangunan nasional semasa Orde Baru, kurang mendapat perhatian karena program pembangunan nasional lebih berorientasi ke daratan. Karya ini dilengkapi dengan kajian kebijakan menyangkut Perjanjian Lintas-Batas Indonesia Filipina, serta situasi perkembangan mutakhir yang memungkinkan kawasan ini menjadi lintasan kejahatan transnasional. Kedua penulis mengisyaratkan bahwa agar tidak menjadi kancah dan lintasan kejahatan transnasional maka tidak ada cara lain selain usaha mensejahterakan warga perbatasan.

Wilayah perbatasan ini ternyata menarik perhatian peneliti berkebangsaan asing maupun peneliti dari negara tetangga. Adapun peneliti yang mengkaji kawasan perbatasan dan melihatnya dari realita historis, sosial budaya penduduk di wilayah dua negara yang berbatasan (Mindanao, Sangihe, dan Talaud); serta mobilitas penduduk pelintas-batas baik dari Mindanao bagian selatan ke pulau-pulau Sangihe dan Talaud maupun sebaliknya, dapat disebut disini Shinzo Hayase bersama kawan-kawan melakukan kompilasi atas *"Silsilah/Tarsilas (Genealogies) and Historical Narratives in Sarangani Bay and Davao Gulf Regions, South Mindanao, Philippines, and Sangihe-Talaud Islands, North Sulawesi, Indonesia"* (1999). Shinzo Hayase sendiri sebelumnya telah menulis disertasi tentang Mindanao (Davao) pada tahun 1984. Ia kemudian menulis buku berjudul, *"Mindanao Ethnohistory Beyond Nations, Maguindanao, Sangir, and Bagobo Societies in East Maritime Southeast Asia"* (2007); setahun kemudian menerbitkan bukunya berjudul: *A Walk Through Maritime World as a Historical Space*, (2008). Dalam ketiga karya tersebut dapat ditemukan keterangan tentang kepulauan Sangihe dan Talaud serta hubungannya dengan Mindanao maupun Filipina pada umumnya.

Darinegeri-jiran, Evelyn Tan-Culamarmengkaji keberadaan warga Sangihe dan Talaud di Mindanao serta implikasinya

terhadap hubungan Indonesia – Filipina, sebagaimana terbaca dalam tesisnya berjudul: *“The Indonesian Diaspora in Southern Mindanao: Implication for the Philippines – Indonesia Relations”* (1989). Bagian dari studinya tersebut ia tulis dalam sebuah artikel berjudul: *“Migrations Across the Sulawesi Sea”* (1998).

Perhatian terhadap wilayah perbatasan Sangihe dan Talaud semakin menarik perhatian peneliti negeri-jiran (Filipina), yakni Djorina Velasco yang menulis karyanya berjudul: *“Between Manado and Davao: How the Indonesian Island of Miangas is making use its Philippine ties”* (2007); serta *“Navigating the Indonesian-Philippines Border: The Challenges of Life in the Borderzone”* (2010). Kedua tulisan tersebut didasarkan pada kerja-lapangan yang intensif. Sepertinya, Velasco tidak mengalami hambatan bahasa dan interaksi dengan warga setempat. Kesan itu tampak dalam beragam informasi yang dia peroleh dibandingkan dengan hasil karya peneliti Indonesia yang pernah berkunjung ke wilayah perbatasan.

Keberadaan para pelintas batas di wilayah perbatasan Indonesia – Filipina juga mendorong penelitian bersama antara peneliti asing (Jepang) dengan peneliti lokal. Adalah Alex Ulaen & Takashi Shiraishi – sebagai anggota tim *Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, Japan* yang melakukan kajian berjudul *Dynamics Studies on the Everyday Life and Resources Management in Maritime World Wallacea* (2002 – 2004). Salah satu hasilnya adalah karya berjudul: *“The Traffic Zone Reconsidered: Manado – Sangihe/Talaud – Mindanao”*, yang diterbitkan sebagai salah satu bab dalam buku yang disunting oleh Noboru Ishikawa (2008) berjudul: *Flows and Movements in Southeast Asia: New Approaches to Transnationalism*. Dalam karya tersebut kedua penulis memaparkan alur-alur mobilitas para pelintas-batas (baik yang legal maupun ilegal). Bagaimana orang dari pelabuhan Manado bisa sampai di Mindanao, sementara para pelintas batas yang legal hanya berlaku bagi warga yang menetap di wilayah Lintas-Batas atau *Border*

Crossing Area yang bepergian lewat pos Marore ke Minadano melalui pintu masuk pos Batuganding begitu sebaliknya atau lewat pos Miangas ke Mindanao lewat pintu masuk pos Tibanban. Di jalur resmi ini para pelintas batas yang memiliki kartu pelintas-batas bepergian dengan bebas serta membawa barang bawaan seperti yang disyaratkan dalam perjanjian lintas batas. Ada pula yang melalui lautan tanpa melewati pos-pos yang ada dan merekalah yang melakoni kegiatan-kegiatan ilegal. Dari sejumlah kegiatan ilegal yang terlacak lewat penelitian mereka adalah para pelaku teroris yang melewati jalur ini.

Aswatini Raharto, terbilang peneliti senior LIPI yang pernah menekuni kajian tentang warga perbatasan. Karya awalnya berjudul: *Migrasi Kembali Orang Sangir Talaud dari Pulau-pulau di Wilayah Filipina* (1993), sebuah laporan penelitian dari tim peneliti yang dipimpinya, dan kemudian ia sendiri menulis sebuah makalah untuk simposium di Osaka-Jepang (1998), berjudul: *“Return Migration Among the Sangirese: Life and Adjustment in the Homeland”* (2000), dalam buku yang disunting oleh , ABE Ken-ichi & ISHII Masako (Eds.), berjudul: *Population Movement in Southeast Asia: Changing Identities and Strategies for Survival*.¹⁸

Hasil studi tentang wilayah perbatasan yang sudah dirujuk pada halaman-halaman di atas, ada dua tulisan (studi), yakni dari Suko Bandiyono, “Mobilitas Penduduk Sangihe” dan dari Ade Latifa, “Feminisasi Migrasi: Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara”; jika diperbandingkan dengan tulisan-tulisan peneliti semisal Eveline Tan-Culamar tentang Orang Sangihe dan Talaud, atau Shinzo Hayase, Djorina Velasco, A.B. Lapijan, dan lain-lain,¹⁹

18 JCAS Symposium Series 10. 2000.

19 Baik Hayase maupun Velasco tidak hanya mengadakan kerja lapangan berbulan-bulan, tetapi keduanya paham sekali dan dapat berkomunikasi dengan bahasa daerah

mengundang munculnya kesan terutama tentang keseriusan kedua peneliti LIPI tersebut memperoleh keterangan serta kekritisan mereka menyaring informasi. Salah satu contoh, Bandiyono, dalam karyanya di atas (Mobilitas Penduduk Sangihe), tertulis: "... dari atas menara suar di P. Marore dapat terlihat sinar Kota Davao yang ada di Filipina..." (hal.81). Bagi mereka yang pernah menginjakkan kakinya di pulau Marore dapat melihat bahwa posisi suar terletak di atas bukit sangat memungkinkan untuk melihat ke arah mana pun. Tidak usah sampai memanjat menara suar. Dari ujung dermaga, jika kita melihat ke arah utara, akan tampak pulau Balut. Jadi yang tampak adalah 'sinar-sinar lampu' di pulau Balut dan bukan Davao. Karena selain jarak Kota Davao kurang lebih 100 mil dari Marore, pandangan mata juga akan terhalang dengan daerah pegunungan di wilayah selatan Kota Davao, semisal Davao del Sur dan Alabel. Kalau tokoh yang dimaksud adalah cahaya lampu kota General Santos, maka pandangan mata dari pulau Marore ke General Santos (Gensan) akan terhalang dengan tanjung di Glan. Barangkali, yang dimaksud adalah lampu-lampu di pulau Balut dan pulau Sarangani.

Hal lain yang perlu diluruskan adalah hasil amatan Bandiyono seperti yang terbaca dalam kutipan berikut: "... Di wilayah Sangihe, nelayan belum memiliki tradisi memanfaatkan energi angin untuk berlayar. Oleh karena itu, di wilayah tersebut tidak dijumpai sampan yang menggunakan layar.." (hal. 83). Pernyataannya dapat diterima jika melihat keadaan dewasa ini. Namun, ia mengabaikan keadaan dua atau tiga puluh tahun lampau. Setidaknya, pada akhir tahun 1970-an masih ditemukan jenis-jenis sampan dan perahu

setempat. Selain itu, keduanya menggunakan dokumen-dokumen Belanda dan Spanyol tentang daerah ini (hasil komunikasi dari kedua peneliti tsb.).

tak bercadik yang lebih besar menggunakan layar²⁰. Apalagi pada tahun-tahun sebelumnya. Nelayan dan pelaut berlayar sampai ke Manado dan bahkan ke daratan Mindanao hanya dengan menggunakan layar dan dayung. Adapun tipe perahu nelayan yang mereka sebut “pambut”, sebuah kesalahan lidah yang tak mampu menyebut “*pump-boat*”, karena mesin yang digunakan adalah mesin pompa air yang bergerak se arah saja; adalah prototipe pinjaman dari model perahu bercadik dari negara tetangga (Filipina). Hingga saat penelitian ini, masih ditemukan satu dua perahu bercadik prototipe asli yang mengandalkan layar dan dayung dan belum menggunakan mesin ditemukan di pesisir utara dan timur pulau Sangihe.

Baik hasil studi Bandiyono maupun Latifa, tidak menyinggung soal posisi dan arti pulau Marore dalam hubungannya dengan gerak mobilitas warga dari Tinakareng ke Mindanao dan sebaliknya. Padahal, setiap pelintas batas yang memiliki kartu pelintas batas dari Tinakareng menuju pulau Balut dan pulau Sarangani maupun sebaliknya, harus melapor di pos Lintas Batas Marore. Kekurangcermatan ini memberi peluang untuk mempelajari aspek sosial budaya warga perbatasan dengan mengambil kasus pulau Marore.

Tulisan Aswatini, dkk., juga terfokus ke warga kampung Tinakareng pulau Nanusa²¹ dan kampung Bukide di pulau Bukide. Dalam uraian pendahuluannya, penentuan dua

20 Lihat koleksi slides hasil perekaman Audio-Visual berjudul: “Talaud 79” Koleksi Yayasan Mitra Budaya Indonesia dan UNESCO. Untuk koleksi Yayasan Mitra Budaya Indonesia, tersimpan kurang lebih 2.000 slides tentang aktivitas kehidupan sehari-hari di kepulauan Sangihe dan Talaud, tersimpan di PDII-LIPI Jakarta. Kegiatan perekaman audio-visual (etnografik) ini dikerjakan oleh Alex J. Ulaen dibawah bimbingan Paramita Rahayu Abdurrahman (Lembaga Riset Kebudayaan Nasional-LIPI) atas biaya UNESCO lewat Yayasan Mitra Budaya Indonesia-Jakarta.

21 Mungkin yang mereka maksudkan adalah pulau Manipa, yang juga dikenal dengan nama Nusa. Adapun sebutan Nanusa merujuk ke pulau-pulau paling utara di kepulauan Talaud, dimana pulau Miangas merupakan bagiannya. Untuk lebih meyakinkan, lihat Peta LLN-28 (Sulawesi Utara) yang dikeluarkan oleh Bakosurtanal dan Dinas Hidrooseanografi TNI-AL.

lokasi itu didasarkan pada keterangan pihak pemerintah daerah bahwa di kedua tempat itulah paling banyak warga yang pergi dan sudah kembali dari Filipina. Hal itu benar pada tahun-tahun awal 1990-an. Jika tulisan Aswatini lainnya (2000) dikaji lebih lanjut, akan menjawab bahwa warga yang memilih kembali dan bermukim di Halmahera, sebagian besar bukanlah warga kampung Tinakareng dan Bukide. Membaca kedua tulisan Aswatini (1993, 2000) sangat memperkaya pemahaman kita tentang mobilitas penduduk di daerah perbatasan. Dan, dengan tidak mencakup warga pulau Marore di dalamnya, maka kedua tulisan Aswatini tersebut seakan memberi peluang untuk mempelajari aspek sosial-budaya dan mobilitas warga Pulau Marore.

1.3 Cakupan Studi dan Tulisan ini

Kajian yang secara khusus membahas dua pulau (terdepan) di wilayah perbatasan Indonesia – Filipina, yakni pulau Marore, dan pulau Marampit – sepanjang hasil penelusuran referensi – belum pernah dilakukan. Tulisan yang ada dan baru terbit tahun 2011 tentang pulau Miangas, dikerjakan oleh Alex J. Ulaen, Triana Wulandari dan Yuda B. Tangkilisan dengan editornya, Endjat Djaenuderajat, diterbitkan oleh Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Satu-satunya publikasi tentang pulau Marore, hasil penelitian dari Sri Suharjo, Nasrun Sandiah, dan Pristiwanto dengan editor Helmi Aswan, diterbitkan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado²². Pada halaman 5, tim penulis memaparkan bahwa:

22 Lihat Sri Suharjo, Nasrun Sandiah, Pristiwanto, "Marore, Suatu Kampung di Wilayah Perbatasan". Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado, editor Helmi Aswan, 2002.

“..... ruang lingkup materi yang disajikan dalam tulisan ini meliputi: (1) kehidupan masyarakat yang meliputi kondisi sosial, ekonomi maupun budaya masyarakat kampung Marore, (2) pelaksanaan kegiatan Border Crossing Agreement di Kepulauan Sangihe dan Talaud dengan negara tetangga Philipina...”;

keterangan tentang “keadaan sosial dan ekonomi” serta “aspek budaya”²³ yang dimaksud oleh tim penulisnya sangat ringkas dan yang lebih banyak dipaparkan adalah soal pelaksanaan serta permasalahan seputar Perjanjian Lintas Batas atau *Border Crossing Agreement*²⁴. Adapun aspek sosial, ekonomi maupun budaya yang dipaparkan dalam buku “Marore, Suatu Kampung di Wilayah Perbatasan” tidak lebih dari informasi tentang “... sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah (menengah pertama dan menengah atas); halaman 22 - 27; paparan tentang jumlah penganut agama di pulau tersebut (halaman 28 - 29); aktivitas perekonomian (halaman 30 - 32); mata pencaharian (halaman 33 - 36); organisasi sosial (halaman 36-38); dan aspek budaya (halaman 38 - 40). Selain sangat singkat, paparan tentang aspek sosial dan budaya yang ditemukan dalam buku tersebut belum dapat memberikan gambaran-utuh tentang aspek-aspek tersebut dalam keseharian “orang Marore” di perbatasan. Tanpa menafikan upaya tim penulisnya, masih banyak aspek sosial budaya masyarakat Pulau Marore di daerah perbatasan ini yang perlu dikaji dan dipaparkan.

Tulisan ini adalah hasil kerja dari tim yang memiliki latar

23 Istilah “keadaan sosial dan ekonomi” serta “aspek budaya” di atas seturut kutipan dari buku yang dirujuk, yaitu “Marore, Suatu Kampung di Wilayah Perbatasan”. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado, editor Helmi Aswan, 2002.

24 Dalam buku berukuran 14 cm. x 20 cm., ini paparan tentang aspek sosial dan ekonomi sebanyak 16 muka (halaman 22 - 38) dan aspek budaya 2 muka (halaman 38 - 40). Rata-rata setiap muka isinya 27 baris, dan setiap baris berisikan 6 - 9 kata.

ilmu yang berbeda (antropologi, geografi, sejarah). Berangkat dari perbedaan itulah maka diperlukan adanya kesamaan cara pandang serta strategi bagaimana menghasilkan sebuah tulisan yang didalamnya berupa “paparan serta gambaran tentang aspek sosial dan budaya kelompok komunitas – warga pulau Marore – yang ada di perbatasan”²⁵. Untuk itu, pedoman pertama adalah, tema yang dipilih oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado, yaitu: “Kajian ekspresi keragaman budaya”. Pedoman kedua adalah rumusan dalam Kerangka Acuan Kerja bahwa: “.... Studi tentang daerah perbatasan ditujukan untuk penguatan jadi diri bangsa sehingga dengan pengetahuan sosial dan budaya yang dimiliki menjadikan penguatan dalam menuju NKRI”. Pedoman ketiga adalah judul yang diberikan. Bagaimana anggota tim ini memahami atau menafsirkan setiap kata dalam judul yang ada, yakni: “Studi tentang Sosial Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe”.

Agar tujuan studi ini tercapai, maka judul yang ada dipilah-pilah sebagai berikut: (a) ‘sosial budaya’; (b) ‘masyarakat daerah perbatasan’. Frasa kedua atau butir (b) ‘masyarakat daerah perbatasan’ dipertegas oleh rumusan sub-judul: ‘studi kasus masyarakat di pulau Marore, kabupaten Kepulauan Sangihe’.

Kajian tentang ‘sosial budaya’ meliputi banyak aspek dan sangatlah beragam. Untuk memahami aspek ‘sosial’ misalnya, akan mengundang munculnya pertanyaan antara lain, apakah

25 Bandingkan dengan kajian Shinzo Hayase, *MINDANAO ETHNOHISTORY BEYOND NATIONS. Maguindanao, Sangir, and Bagobo Societies in East Maritime Southeast Asia*. 2007. Paradigma serupa, juga dianjurkan oleh Heddy Shri Ahimsa-Putra untuk mengkaji perilaku warga kelompok komunitas terhadap bencana, dan dinamainya “paradigma etnosains”. Lihat, “Etnosains untuk Kajian Bencana” dalam *RESPONS MASYARAKAT LOKAL ATAS BENCANA*. Kajian Integratif Ilmu, Agama, dan Budaya. Agus Indiyanto & Arqom Kuswanjono (Eds.), 2012, halaman 7 – 27.

yang mau dikaji adalah 'identitas sosial' (*social identity*) atau 'mobilitas sosial' (*social mobility*) atau 'jejaring sosial' (*social networks*) atau 'struktur sosial' (*social structure*) dan seterusnya. Begitu pula dengan aspek 'budaya'. Bagi mereka yang belajar antropologi, pemahaman tentang kata budaya akan mengingatkan pelajaran dasar dalam antropologi yaitu adanya tujuh unsur kebudayaan yang ditemukan dalam kehidupan setiap kelompok masyarakat. Pada tahapan konseptual, seperti halnya konsep 'sosial' begitu pula dengan konsep 'budaya'. Ini berarti bahwa perlu adanya pilihan. Pilihan atas (1) aspek yang dipandang dapat merepresentasikan serta mengekspresikan keragaman budaya dari sebuah komunitas (etnis) yang berada di wilayah perbatasan antar-negara. (2) Apakah identitas warga komunitas (Marore) yang bermukim di sebuah pulau terluar (terdepan) di perbatasan antar-negara ini perbedaannya dengan warga komunitas etnis di wilayah negara tetangga (Mindanao-Filipina) dapat dengan mudah ditemu-kenali? Pilihan kedua ini berkaitan dengan rumusan dalam Kerangka Acuan Kerja yang sudah dikutip di atas, yakni: "... ditujukan untuk penguatan **jadi diri** bangsa sehingga dengan pengetahuan sosial dan budaya yang dimiliki menjadikan penguatan dalam menuju NKRI..."

Status sebagai warga wilayah perbatasan merupakan konsekuensi dari sebuah realita kehidupan berbangsa-bernegara. Apakah status ini mempengaruhi perilaku dalam keseharian merupakan pertanyaan yang menarik untuk ditelusuri jawabannya. Namun, upaya mengungkap persoalan jati diri memerlukan pendekatan keilmuan, yang dalam kajian ini – anggota tim berlatar antropologi – akan mengungkap keberadaan komunitas etnis di mana warga Marore terhisab di dalamnya.

Apakah warga menetap di sebuah pulau yang terpencil di wilayah perbatasan merupakan sebuah pilihan atau kenyataan yang harus diterima karena mereka dilahirkan

di sana, memerlukan jawaban dengan mengungkap latar kesejarahannya.

Aspek sosial budaya yang dipandang dapat merepresentasikan ekspresi budaya warga Marore di wilayah perbatasan dipilih dengan mempertimbangkan aktivitas utama dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah pulau kecil seluas $\pm 3.12 \text{ km}^2$ dengan topografi didominasi oleh bebatuan dan dihuni 672 jiwa yang terhimpin dalam 170 rumah tangga dengan mata pencaharian sebagai nelayan. Ada 47 kepala keluarga nelayan yang memiliki perahu bermotor jenis *pump-boat* atau pambut dalam sebutan lokal. Belum terhitung perahu bercadik yang jumlahnya puluhan. Setiap perahu bermotor jenis *pump-boat* ini dioperasikan oleh 3 nelayan. Kenyataan ini mengarahkan pilihan pada aspek sosial budaya bahari yang diangkat dalam studi ini. Apalagi salah satu tradisi yang dilakoni oleh nelayan ketika melaut adalah *badaseng*. Sejak lama dan menjadi kebiasaan yang diwarisi turun-temurun, *badaseng* tidak sekedar berumah sementara waktu dalam hubungannya dengan aktivitas melaut (menangkap ikan) di pulau-pulau sekitarnya yang tidak dihuni maupun pulau yang berpenghuni. Tradisi ini pula menggambarkan gerak mobilitas orang Marore dan Sangihe umumnya. Berawal dari *badaseng* mereka kemudian menetap dan beranak-pinak di tempat tersebut. Alhasil, "ruang-gerak" orang Marore lebih luas dari sekedar menetap di sebuah pulau bernama Marore. Pulau-pulau sekitar Marore seperti pulau Kawio, pulau Kemboleng, pulau Matutuang, pulau Ehise, di wilayah Indonesia, maupun pulau Balut dan pulau Sarangani, bahkan daratan Mindanao seakan menjadi "buana"-nya orang Marore. Praktek *badaseng* tidak semata aktivitas tinggal-sementara, entah seminggu atau sebulan. Ada pedomannya, yaitu sistem pengetahuan tradisional mulai dari siklus waktu yang mereka tandai dengan peredaran bulan dan bintang atau mereka sebut *batiang*, serta pengaruhnya terhadap migrasi ikan, perpusaran

arus, dan sebagainya. *Badaseng* dan *batiang* merupakan aspek budaya yang dipilih dalam studi ini dan diharapkan dapat mengekspresikan keragaman budaya mereka.

Amatan sekilas dan keterangan lapangan baik dari pihak pemerintah kecamatan Marore, petugas Lintas Batas dari pihak Filipina dan warga menyimpulkan bahwa sebagian warga Marore menyadari realita yuridis-administratif-kenegaraan bahwa mereka berada di wilayah perbatasan. Itu berarti bahwa ada aturan yang jelas dari kedua negara bertetangga yang harus dipatuhi. Dan, keterikatan pada "*daseng*" dan *badaseng* sebagai strategi mempertahankan hidup, mendorong mereka menjadi nelayan-nelayan yang "penuh-gerak" (*mobile*) dan kadang secara tidak sadar mereka menjadi "pelintas-batas" dalam pandangan negara. Karena, bagi sebagian warga, *daseng* atau "rumah" mereka juga ada di pulau Balut dan pulau Sarangani wilayah Republik Filipina.

Pemerintah kedua negara sejak berdirinya kedua republik ini (Indonesia dan Filipina) menyadari realita tersebut. Ada ribuan warga Sangihe dan Talaud yang bermukim di wilayah Mindanao Selatan. Begitu pula halnya dengan warga Filipina. Ada ratusan warga yang tersebar mulai dari kepulauan Sangihe dan Talaud hingga pesisir Minahasa, pulau Lembeh dan pesisir Maluku Utara. Sehingga, sejak tahun 1956 pemerintah menandatangani kesepakatan untuk mengawasi pemukim sementara serta pelintas-batas. Kesepakatan tersebut dari tahun ke tahun telah mengalami perbaikan dan hingga kini tetap Perjanjian Lintas-Batas atau *Border Crossing Agreement* tetap dijalankan.

Agar pertanyaan tersebut terjawabkan dengan baik, dan paparan tentang aspek sosial dan budaya terpahami sebagai ekspresi budaya dalam tulisan ini, maka dilakukan

pendekatan kesejarahan dan lebih spesifik etnohistori²⁶ . – dengan memadukan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber kolonial maupun lokal serta “ingatan bersama” (*collectif memories*) yang diperoleh di lapangan – untuk mengungkap baik tentang latar serta gerak mobilitas warga Marore, di wilayah perbatasan. Selanjutnya, pendekatan antropologis dan secara khusus paradigma etnosains seperti yang dibahas oleh Ahimsa-Putra, yakni: “... memaparkan, mendeskripsikan, melukiskan dan menggambarkan kebudayaan suatu masyarakat, komunitas atau kelompok sosial tertentu (agar diperoleh pemahaman tentang)... sudut pandang orang setempat, dan hubungannya dengan kehidupan dalam kegiatannya mewujudkan, merealisasikan pandangannya tentang dunianya”.²⁷

1.4 Kerangka Tulisan

Tulisan ini diawali dengan bagian pendahuluan yang terdiri atas tiga sub-bagian, masing-masing:

- 1) Latar Belakang, tulisan ini membahas secara singkat ketertarikan berbagai pihak untuk mempelajari wilayah perbatasan.
- 2) Kajian-kajian Terdahulu, berisikan paparan tentang hasil-hasil kajian tentang wilayah perbatasan baik secara umum di berbagai wilayah perbatasan di tanah air,

26 Selain kajian Hayase yang dijadikan rujukan, lihat antara lain: (1) John G. Butcher, *THE CLOSING OF THE FRONTIER. A History of the Marine Fisheries of Southeast Asia c. 1850 – 2000*. KITLV Press, Leiden, 2004; (2) Paul H. Kratoska, Remco Raben, Henk Schulte Nordholt (Eds.), *LOCATING SOUTHEAST ASIA: Geographies of Knowledge and Politics of Space*. Singapore University Press, 2005; (3) Robert Cribb & Michele Ford (Eds.), *INDONESIA BEYOND THE WATER'S EDGE. Managing an Archipelagic State*. ISEAS, 2009; (4) Iwao Ushijima & Cynthia Neri Zayas (Eds.), *FISHERIES OF THE VISAYAS*. University of the Philippines Press, Diliman, Quezon City, 1995.

27 Heddy Shri Ahimsa-Putra, “Etno Bencana: Etnosains untuk Kajian Bencana” dalam Agus Indiyanto & Arqom Kuswanjoyo, *RESPONS MASYARAKAT LOKAL ATAS BENCANA*. Buku Kedua, halaman 7 – 24. Mizan, 2012.

maupun secara khusus di wilayah administratif Propinsi Sulawesi Utara yang berbatasan dengan wilayah negara tetangga, Republik Filipina.

- 3) Cakupan Studi dan Tulisan meliputi hal-hal yang mendapat perhatian dalam studi ini, terutama beberapa aspek sosial dan aspek budaya yang terekam lewat amatan dalam aktivitas keseharian warga pulau Marore, ditunjang dengan hasil-hasil kajian yang ada.

Bagian kedua, sebagaimana terbaca pada judulnya “Pulau Marore dalam Peta-Sejarah Nusa-Utara”, dikandung maksud untuk mengidentifikasi warga Marore. Pemaparannya diawali dengan penyajian informasi kartografis, latar kesejarahannya dalam skala lokal (Nusa Utara) dan regional (Nusantara), dan deskripsi singkat tentang pulau Marore.

Bagian ketiga diberi judul: “Budaya Sangihe, Tradisi Bahari” secara umum menggambarkan ekspresi budaya etnik Sangihe dan secara khusus kelompok komunitas Marore, sebagai bagian dari komunitas etnik Sangihe. Pada bagian awal akan disajikan pengetahuan tradisional yang menandai budaya bahari, yakni *batiang* atau sistem penanggalan dan pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan *batiang*.

Bagian keempat, dengan judul: “Dari Tradisi *Badaseng* ke diaspora Marore” berupa paparan tentang tradisi *badaseng*, untuk memahami gerak mobilitas warga Marore. Pada bagian ini diawali dengan keterangan tentang tradisi *badaseng*, kemudian disusul dengan penyebaran atau diaspora warga Marore.

Bagian kelima dengan judul: “Marore-Matutuang: antara Tinakareng – Batuganding” berisikan paparan tentang pola gerak para pelintas batas. Pada bagian ini dipaparkan sekilas tentang keberadaan perjanjian antar dua negara, yakni, Perjanjian Lintas-Batas, dan mobilitas para pelintas batas dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Bagian keenam dengan judul: Marore pulau terluar atau terdepan: Bukan itu Soalnya. Tulisan dalam bab ini akan membahas berbagai permasalahan aktual yang disuarakan warga baik selama penelitian lapangan, maupun yang terekam dalam media sebelumnya.

BAB II

PULAU MARORE DALAM PETA-SEJARAH NUSA UTARA

Dalam bab ini akan dipaparkan keterangan tentang keberadaan kepulauan Sangihe dan Talaud atau dikenal pula dengan sebutan “Nusa Utara” dalam Peta Sejarah Nusantara. Selanjutnya, posisi pulau Marore dalam konteks geo-historis Nusa Utara maupun geo-politik negara, yang kini dikenal sebagai salah satu “pulau terluar” (terdepan) yang berada di wilayah perbatasan antar negara (Indonesia – Filipina).

Sebutan “Nusa Utara” – dalam tulisan ini – akan digunakan secara bergantian dengan sebutan kepulauan Sangihe dan Talaud. Frasa “Nusa Utara” adalah padanan atau terjemahan dari kata “*het noordereilanden*”. Sebutan dalam bahasa Belanda “*het noordereilanden*” ini untuk pertama kalinya digunakan oleh Robertus Padtbrugge, Gubernur VOC di Maluku dalam “*Het journaal van Padtbrugge’s reis naar Noord Celebes en de Noordereilanden*” (Catatan Perjalanan dari Padtbrugge ke Sulawesi Utara dan pulau-pulau di utara).

Sejak kapan frasa “Nusa Utara” sebagai terjemahan dari “*het noordereilanden*” digunakan oleh warga Sangihe dan Talaud, dan siapa yang pertama kali menerjemahkan sekaligus menggunakannya, tidak terlacak dalam ingatan kolektif

warga. Yang jelas, sebelum drs. A. Maluegha menggunakannya dalam judul pidato dies natalis Universitas Sam Ratulangi tahun 1972, dengan judul: *Ikhtisar Perkembangan Kekuasaan Belanda di Kepulauan Nusa Utara*, frasa itu sudah digunakan baik sebagai nama Perusahaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, yakni C.V. Nustar, P.T. Nusa Utara, maupun nama kapal motor (k.m. Nusa Utara).

Pada tahun 2003, frasa tersebut digunakan sebagai judul buku (*Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan*), oleh A.J. Ulaen¹. Sejak itu, frasa Nusa Utara digunakan secara umum dan cenderung digunakan untuk menandai baik gugus pulau-pulau Sangihe dan Talaud maupun warganya sebagai entitas historis-kultural. Sedangkan sebutan Sangihe atau Talaud atau atau Siau-Tagulandang lebih mengacu pada keberadaannya baik sebagai gugusan pulau maupun sebagai entitas-entitas administratif pemerintahan.

Kepulauan Sangihe dan Talaud dapat dipilah seturut latar geografis, yakni (1) gugusan pulau-pulau Talaud pada bagian utara timur laut dengan koordinatnya berada antara 3° 38' - 5° 33' Lintang Utara dan 126° 38' - 127° 10' Bujur Timur; (2) gugusan pulau-pulau Sangihe berada di bagian tengah-barat dengan koordinatnya berada antara 3° 00' - 5° 46' Lintang Utara dan 125° 10' - 127° 10' 00' Bujur Timur, dan (3) gugusan pulau-pulau Siau dan Tagulandang pada bagian selatan dengan koordinatnya 2° 00' - 3° 00' Lintang Utara dan 125° 10' - 127° 00' Bujur Timur. Wilayah ketiga gugus pulau ini lebih besar laut daripada daratan atau luas pulau-pulau yang ada.

Meskipun J.C. van Erde, seorang pakar bahasa mengelompokkan bahasa Sangihe dan bahasa Talaud ke dalam kelompok bahasa-bahasa Austronesia dan lebih spesifik

1 Alex J. Ulaen, "Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan". 2003, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

lagi kelompok bahasa-bahasa Filipina yang juga mencakup beberapa bahasa di daratan Minahasa, namun kedua bahasa ini memiliki kurang lebih 16 (enam belas) dialek yang tersebar di seluruh kepulauan Sangihe dan Talaud.

Ketiga gugus pulau-pulau ini yakni gugusan pulau-pulau Talaud, pulau-pulau Sangihe, dan pulau-pulau Siau, Tagulandang, Biaro – semasa bersentuhan dengan peradaban luar – tumbuh-kembang sebagai kesatuan hidup yang berada dalam “ruang-jejaring-Melayu”². Ketika itu, dalam kehidupan kelompok komunitas di gugusan pulau Sangihe dan gugusan pulau Siau-Tagulandang terjadi peralihan dari sistem kepemimpinan tradisional bertumpu pada kehadiran seorang pemimpin yang bersifat *primus inter pares* beralih ke kepemimpinan para *datu*; dan kelak ketika terjadinya kontak dengan peradaban Barat, para *datu* ini diakui dan dianggap sebagai “raja-raja” atau dalam dokumen para pelaut Portugis dan Spanyol adalah “*el rey*”, dan dalam dokumen Belanda tercatat sebagai “*koning*”.³ Di kedua gugus pulau tersebut – baik menurut dokumen para pelaut dan pelancong serta penguasa kolonial maupun ingatan bersama – dijumpai sejumlah kedatuan dan kerajaan-kerajaan kecil. Sementara, di gugusan pulau-pulau Talaud, hal tersebut tidak ditemukan. Para pemimpin tradisional yang ada sampai kehadiran kekuasaan kolonial sifatnya tetap sebagai *primus inter pares*. Kehadiran kekuasaan kolonial Belanda menetapkan ketiga gugus pulau ini menjadi satu wilayah administratif. Ketika Indonesia merdeka dan berdaulat, satuan ini tetap dipertahankan sebagai satu wilayah administratif setingkat kabupaten.

Paparan dalam bab ini tidaklah semata-mata sebuah

2 Lihat, Endjat Djaenuderadjat (Ed.), SEJARAH WILAYAH PERBATASAN MIANGAS – FILIPINA 1928 – 2010: Dua Nama Satu Juragan, Gramata Jakarta, 2012, halaman 25 – 58.

3 Lihat perjanjian (kontrak) antara VOC dengan para raja Sangihe 1677. Dalam kontrak ini secara resmi para *datu* diakui sebagai *koning* atau raja.

ulasan geo-historis yang berupaya mengungkap pengaruhnya tidak hanya pada cara pandang negara terhadap wilayah yang disebut “perbatasan” tetapi juga melihat sejauh mana pengalaman- pengalaman kesejarahan yang terekam dalam ingatan-bersama warga di gugusan pulau yang ada di wilayah perbatasan ini menafsirkan keberadaan mereka, menjalani keseharian mereka.

2.1 Nusa Utara dalam Peta Rupa-Bumi

Ketika para pelaut Eropa – dalam hal ini Spanyol dan Portugis atau dalam dokumen sejarah disebut Castilia – melayari kawasan Laut Sulawesi dalam perjalanannya menuju ke pulau-rempah-rempah, Maluku; sejak itu pula tercantumlah nama kepulauan Sangihe dan Talaud dalam catatan harian para pelaut yang melewati wilayah kepulauan ini. Salah satu catatan pelaut yang menyebutkan satu per satu nama pulau adalah catatan harian pelayaran Magelhaes yang ditulis oleh salah seorang awaknya, Antonio Pigafetta, dan diterbitkan dengan judul, *Primer viaje en torno del mundo* (Pelayaran pertama mengelilingi bumi).⁴ Dua buah kapal yang tersisa dari armada Magelhaes yakni *Trinidad* yang dinakhodai Gomez de Espinoza dan *Victoria* yang dinakhodai Elcano, pada tanggal 28 Oktober 1521, memasuki perairan Laut Sulawesi dari Filipina. Pigafetta dengan cermat mencatat nama-nama pulau yang dilewati, mulai dari *Cheava* (Marore), *Caviao* (Kawio), *Cabiao* (Kembo ng), *Camanuca* (Memanu), *Cabaluzao* (Kawa uso), *Cheai* (Dumarehe), *Lipan* (Lipaeng), dan *Nusa* (Nusa). Pada awal Nopember 1521, mereka melewati pulau-pulau *Chéoma* (Kalama), *Carachita* (Kahakitang), *Para* (Para), *Zangalura* (Sanggaluhang), *Ceau* (Siau), dan *Paghinzara*

⁴ Diterbitkan di Buenos Aires, 1941. juga terdapat beberapa versi terbitan selain bahasa Spanyol, misalnya dalam bahasa Portugis, Perancis, dan terjemahannya dalam bahasa Inggris.

(Tagulandang).⁵

Tidak hanya Pigafetta yang merekam nama-nama pulau yang ada di wilayah kepulauan Sangihe dan Talaud. Ada rekaman nama-nama pulau dalam beberapa laporan ekspedisi, seperti ekspedisi Loyasa (1537), ekspedisi Ruy Lopez de Villalobos (1545); ekspedisi Robertus Padtbrugge (1677) dan Thomas Forrest (1755).

Keterangan yang diperoleh dari para pelaut inilah yang kelak digunakan oleh para pembuat peta-bumi. Dalam "*India Tercera Nova Tabola*", karya Giacomo Gastaldi (1548) terdapat nama *Sangil* untuk menandai tujuh buah pulau kecil yang terletak diantara pulau *Iava Menor* di sebelah barat dan pulau *Gilolo* di sebelah timur, serta beberapa pulau di sekitarnya masing-masing: *Tidora*, *Colo*, *Taguima* dan *Cadingar*⁶. Ada peta karya G. B. Ramusio, "*Terza Tavola*" (1554) atau "peta ketiga", yang mencantumkan sebutan *Sanghir* untuk beberapa pulau yang diapit oleh pulau *Celebes* dan pulau *Gilolo*. Perbedaan kedua peta ini tidak hanya pada penggunaan sebutan, tetapi juga pada ukuran pulau yang disebut *Sanghir* lebih besar dari ukuran pulau-pulau dalam peta Gastaldi. Juga, antara *Iava Menore* dan *Gilolo* sudah tercantum pulau *Celebes*. Selain sebutan *Sangil* dan *Sanghir* dalam kedua peta di atas, Gerard Mercator (1569) mencantumkan nama *Sanguin* untuk menandai gugusan pulau di antara *Celebes* di bagian selatan dan *Mindanao* di bagian utara; dan di sebelah timurnya terdapat gugusan pulau yang ditandai dengan nama *Talao alijs Tarrao infule* di antara *Gilolo* di bagian selatan dan *Mindanao* di bagian utara.⁷ Sebutan serupa serta letak dan gambar pulau yang tidak jauh berbeda dengan peta Mercator dapat ditemukan dalam peta

5 Lihat Alex J. Ulaen, *Nusa Utara...* 2003.

6 Thomas Suárez, *Early Mapping of Southeast Asia*. Periplus Edition (HK) Ltd, 1999, halaman 132 - 133.

7 Suárez, (1999:141).

Abraham Ortelius (1570).⁸

Ada pula sebutan lain yakni *I: de Sagim* (islas de Sagim) yang menandai gugusan pulau yang pada peta-peta yang sudah dirujuk di atas disebut dengan *Sangil*, *Sanghir*, *Sanguin* dalam peta Petrus Plancius (1594). Selain mencantumkan *I: de Sagim*, pada bagian utaranya tercantum *I: de la Matao* menandai gugusan pulau antara *I: de Sagim* dengan *Mindanao* dan pada bagian timur terdapat gugusan pulau yang diberi nama *I: de Tala*⁹. Jika sebutan *I: de Sagim* dimaksud untuk menandai pulau-pulau Sangihe sekarang, sepertinya keterangan yang digunakan berasal dari pelaut yang sudah melayari gugusan pulau ini. Hal itu tampak dari letak dan jumlah pulau yang diberi nama *I: de Sagim* dan *I: de Tala*. Sebutan *I: de la Matao* sepertinya merujuk ke gugusan pulau-pulau kecil dimana pulau Marore merupakan bagian dari gugusan pulau dimaksud. Sebutan *Sagim* dapat pula ditemukan dalam peta Linschoten (1595)¹⁰ berdekatan dengan *I: de Talaya* menandai gugusan pulau yang dalam peta sebelumnya disebut *I: de Tala* (Plancius), *Talao alijs Tarrao infule* (Mercator), serta nama *Pangincaz* untuk pulau-pulau di antara *Celebes* dengan *I: de Sagim*. Sebutan *I Sangel*, *I. Siau*, dan *I. de Talaya* untuk menandai pulau-pulau di antara *Celebes* dan *Mindanao* dapat dilihat dalam peta Heinrich Scherer (1700)¹¹. Selain peta-rupa bumi yang sudah disebut di atas, masih terdapat sejumlah peta lainnya yang diterbitkan pada rentang waktu 1600 – 1700.¹²

Sejak kehadiran VOC dan terutama ekspedisi Robertus Padtbrugge ke Sulawesi Utara dan Nusa Utara pada tahun 1677, pengetahuan tentang pulau-pulau di kawasan ini makin

8 Suárez, (1999:166-167).

9 Suárez, (1999:178).

10 Suárez, (1999:178).

11 ¹⁰a Suárez, (1999:231).

12 Antara lain: Peta Hondius (1606), Peta Blaeu (1635), Peta Thevenot (1664) dan pembuat peta VOC.

lengkap dan peta Nusa Utara semakin mendekati peta-peta sekarang. Patut disebut di sini upaya François Valentijn menggambar peta Nusa Utara (1724).¹³ Peta Valentijn ini menempatkan enam pulau yang sama ukurannya dan diberi nama masing-masing: *Karkelang*, *Lirong*, *Cabroewang*, *Karkarotang*, *Noessa*, *Karotta* dan satu pulau tanpa nama berada pada posisi 5° Lintang Utara dan 144° 30' Bujur Timur. Ke arah selatan peta ini terdapat sebuah pulau agak besar diberi nama Sangir dengan sebelas pulau pada sisi timur, dua diantaranya diberi nama *Dane* dan *Beeng*. Pada ujung selatan pulau Sangir terdapat delapan buah pulau kecil diberi nama *Salangkere*. Di arah selatan terdapat pulau Sjawu. Di sebelah barat pulau Sjawu terdapat dua pulau masing-masing *Keama* dan *Maquilere*. Sebelah timur pulau Sjawu terdapat dua pulau (tanpa nama). Di sebelah selatan pulau Sjawu berturut-turut terdapat *Pangasare*, *Pasigi*, *Roang*, *Biaro*, *Banea*, terakhir *Talisse*. Peta Valentijn ini tidak mencantumkan gugusan pulau di utara pulau Sangihe.

Pada tahun 1911, Departemen Dalam Negeri Hindia Belanda, atau *Departement van Binnenlandsch Bestuur*, (*het Encyclopaedische Bureau der Afdeeling Bestuurzaken der Buitenbezittingen*) di Batavia mengeluarkan peta wilayah pemerintahan (kerajaan-kerajaan) di Nusa Utara.¹⁴ Khusus untuk gugusan pulau-pulau Sangihe, dari utara ke selatan yang terhisab dalam wilayah kerajaan Kandhar-Taroena, adalah: *Kabio*, *Komboleng*, *Kabaloeso*, *Lipang*, dan pesisir barat bagian utara pulau Sangihe. Pada sisi timur wilayah kerajaan

13 Lihat, *Mededeelingen van het Bureau de Bestuurzaken der Buitenbezittingen, Het Encyclopaedisch Bureau, Aflevering II, 1912. Kaart No. 1. Schetskaart van de Sangi en Talaud Eilanden volgens Valentijn "Beschrijving der Moluccos" Eerste deel, 1724.*

14 Lihat, *Mededeelingen van het Bureau de Bestuurzaken der Buitenbezittingen, Het Encyclopaedisch Bureau, Aflevering II, 1912. Kaart 1. Schetskaart van de Sangi en Talaud Eilanden. Behoorende bij Nota Sangi- en Talaud, Samengesteld bij het Encyclopaedisch Bureau, Aflevering II, 1912. Kaart No. 2.*

Kandhar-Taroena adalah wilayah kerajaan Taboekan, meliputi *Marore, Moemanoë, Matoetoeang, Salehe, Bolang, Malihat, Makohat, Bolontahen, Lenggise, Liang, Poa, Boekide, Nipa, Tekan, Beng Laoede, Beng Doeloenge* dan sisi utara dan timur pulau Sangihe. Pada sisi barat pulau Sangihe, berbatasan dengan wilayah kerajaan Kandhar-Taroena di bagian utara dan wilayah kerajaan Siaoë di bagian selatan, terdapat wilayah kerajaan Manganitu. Wilayah kerajaan Siaoë, selain mencakup bagian selatan pulau Sangihe, yakni *Tamako* dan *Kaloewatoë*, berturut-turut ke selatan adalah pulau *Mahoemoe, Kalama, Karakitang, Mohengetang, Seha, Para, Nitoe, Sehadadio, Sanggeloehang, Bowondeke, Siaoë, Makalehi, Boehias, Masare, Kapoelihan, Mahoro, Pahepa*. Wilayah kerajaan Tahoelandang berada pada bagian selatan dan mencakup *Tahoelandang, Pasige, Roeang, dan Biaro*. Khususnya pulau *Biaro* dikelilingi belasan pulau kecil di sekitarnya¹⁵

Para pelaut Eropa ini bukanlah yang pertama melayari atau melewati kepulauan Sangihe dan Talaud. Baik pelaut Melayu maupun pelaut Cina tampaknya sudah melayari kawasan ini lebih awal. Migrasi "orang Melayu" baik dari Borneo (Kalimantan Utara), Minangkabau (Sumatera), dan Semenanjung ke pulau-pulau Sulu dan daratan Mindanao kemudian menyebar ke pulau lainnya di Filipina yang dipaparkan oleh Najeeb M. Saleeby terjadi lebih awal dari kehadiran pelaut Eropa di Filipina.¹⁶ Persebaran ini, menurut kajian Shinzo Hayase berlanjut ke kepulauan Sangihe dan Talaud.¹⁷ Keterangan Antonio Pigafetta sebagaimana dikutip oleh Alex Ulaen dalam *Nusa Utara* (2003:36) bahwa salah seorang *datu* di Mindanao menawarkan pemandu dua orang pelaut Sangihe memandu mereka ke Maluku. Salah satu

15 Loc.cit.

16 Najeeb M. Saleeby, *The History of Sulu*, 1908.

17 Shinzo Hayase, dkk. *Silsilas/Tarsilas....1999*.

melarikan diri dengan terjun ke laut di perairan Sarangani. Keterangan tersebut membenarkan bahwa para pelaut lokal telah terbiasa melayari perairan ini.

Dalam sumber Cina, sebatas pengetahuan penulis, para pelaut Cina telah melayari perairan yang dikenal dengan Laut Mindanao – Laut Sulawesi – Laut Maluku, sejak abad ke- 15. Salah satu catatan adalah tentang Shao-shan yang tercantum dalam *Ying-Yai Sheng-Lan*, bukunya Ma Huan. Catatan ini kemudian dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris oleh J.V.G. Mills, dengan judul *The Overall Survey of the Ocean's Shores*.¹⁸ Pada appendix 1, halaman 216, nomor 531, tercantum keterangan tentang letak nautikal Shao-shan – yang oleh penerjemahnya (Mills) disebut Salebabu island – pada 3° 55' N; 126° 41' E. antara Mindanao dan Halmahera. Selain itu, Ma Huan juga mencatat route perjalanan dari Filipina selatan – dengan menyebut nama-nama tempat – Shao-shan (Salibabu island), Shao-wu Tan shui chiang (bagian utara Halmahera), Chi lo-li (Galela), Mi-lo-chü (Maluku islands) dan P'ing-yai-I (Banggai island). Hanya saja dalam catatan itu tidak mencantumkan gugusan pulau-pulau Marore, Kawio, dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh Pigafetta.

Semakin majunya kartografi, memungkinkan para pelaut, pembelajar ilmu bumi dan alam dengan mudah melacak dalam peta, letak dari setiap pulau bahkan pulau karang sekalipun serta kedalaman air laut. Dua lembaga yang menghasilkan peta bumi di Indonesia adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, disingkat Bakosurtanal, dan Dinas Hidrooseanografi TNI-AL. Salah satu hasil karya kedua lembaga ini secara bersama adalah Peta Lingkungan Laut Nasional, Peta LLN-28, berskala 1 : 500.000, edisi 1993. Peta ini khusus tentang Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaud.

18 Diterbitkan oleh Hakluyt Society at the University Press, Cambridge, 1990 (1970).

2.2 Nusa Utara dalam Peta Sejarah Nusantara

... *Pertimbangan arkeologis*

Sejak jaman dahulu wilayah Sulawesi merupakan kawasan strategis di kawasan Pasifik, karena merupakan jembatan penghubung antara kawasan Asia dengan kawasan Pasifik (Belwood, 1976; 1996; Daud,1995; Veth,1996). Kepulauan Sangihe dan Talaud secara khusus merupakan salah satu wilayah yang menjadi sasaran penelitian para arkeolog. Wilayah ini diyakini memiliki potensi besar dalam penyimpanan data penting tentang sejarah kependudukan di wilayah Australia dan Pasifik (Daud,1995). Pada masa lalu Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi bagian dari rute perjalanan migrasi fauna dan manusia. Rute migrasi ini melewati Filipina, Sulawesi Utara, Maluku dan kemudian Australia. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan fosil gading, tulang dan gigi geraham *stegodon* (gajah purba) yang ditemukan di Pintareng Kepulauan Sangihe dan sisa-sisa alat batu yang banyak ditemukan pada gua-gua di Kepulauan Sangihe dan Talaud (Soegondo, 2004).

Penelitian arkeologi di Kepulauan Talaud pertamakali dilakukan oleh Peter Bellwood dari *Australian National University* pada tahun 1974. Hasil ekskavasi Bellwood di Leang Tuo Mane'e, Pulau Karakelang, diperoleh gambaran bahwa aktivitas penghunian gua oleh masyarakat prasejarah terjadi pada masa neolitik yaitu sekitar tahun 4000 SM. Daud Tanudirjo dari Universitas Gajah Mada yang melakukan penelitian selanjutnya menemukan bukti bahwa situs permukiman tertua ditemukan di Leang Sarru, Desa Salebabu, yang berasal dari masa plestosin akhir, yaitu sekitar 30.000 hingga 21.000 tahun yang lalu. Penelitian arkeologi di sekitar kepulauan Sangihe dan Talaud masih terus dilakukan hingga saat ini oleh kantor Balai Arkeologi Manado. Dari hasil survey dan ekskavasi arkeologi selanjutnya, diperkirakan aktivitas hunian gua maupun situs terbuka di Kepulauan Sangihe

dan Talaud berlanjut lagi pada masa-masa Awal Masehi sampai Abad XVII Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan berupa fragmen gerabah dan fragmen keramik pada sebagian besar wilayah Kepulauan Sangihe dan Talaud. Situs-situs arkeologi tersebut antara lain : Situs Leang Buiduane, Leang Arandangan, Leang Buida dan Situs Bukit Tiwing di Kepulauan Talaud, Situs Leang Bowoleba di Desa Manalu dan Leang Tetilade Manganitu Selatan di Kepulauan Sangihe, Situs Bukit Tuo Mane'e di Arangka'a, Bowongpesangen di Kabaruan Kepulauan Talaud, Situs Leang Maraheba di Manganitu dan Situs Bukit Hantosa di Tabukan Utara di Kepulauan Sangihe (Soegondho,2005).

... *Pertimbangan kesejarahan*

Menurut Ulaen (2003), ada pendapat yang menyatakan pulau-pulau Sangihe dan Talaud sudah tercatat dalam catatan sejarah, jauh sebelum kehadiran pelaut Cina. Pendapat ini dipopulerkan oleh Muhammad Yamin, dalam karyanya berjudul "6000 Tahun Sang Merah Putih", terbitan Balai Pustaka Jakarta (1958). Dalam tulisannya, Yamin melampirkan peta yang mencantumkan *uda makatraya* di gugusan pulau-pulau Talaud. Pendapat ini didasarkan naskah *Negara Kertagama* karya Mpu Prapanca, atau yang kini lebih dikenal dengan sebutan *Desawarnyana*.¹⁹

Karya Mpu Prapanca yang dimaksud terbaca dalam Canto 14, stanza 3 sampai 5 bunyinya:

*"muwah tanah i bantayan pramukha bantayan len luwuk,
tiken uda makatrayadinikanan sanusapupul.
Ikan saka sanusanusa makhasar butun/banggawi,
Kunir galiyau mwan I salaya sumba solot/muar"*

19 Th. G. Th. Pigeaud, *Java in the 14th Century*. The Hague: Nijhoff KITLV. 1962. Translation Series 4.

Secara bebas dapat dibaca sebagai berikut:

".... juga negeri bantayan (Bantaeng) dengan ibukotanya bantayan (Bantaeng), dan dipihak lain luwuk (Luwuk), kemudian Uda, merupakan trio; yang utama adalah ketiganya menyatu dalam satu pulau (daratan). Selanjutnya dapat dihitung pulau demi pulau, Makasar, Buton, Banggai, Kunir, Galiyao, Salayar, Sumba, Solot/ Muar".

Th. G. Th. Pigeaud, pakar Sanskrit yang mendalami karya Mpu Prapanca ini dalam upaya memahami lokasi-lokasi yang tercantum dalam naskah tersebut, menghubungkan kata *Uda makatrayadinikanan* dengan (*tala*)*uda*. Meskipun dalam uraiannya Pigeaud mengakui bahwa ada banyak kekeliruan pemberian nama tempat dalam naskah yang dikajinya, Pigeaud sepertinya mengabaikan penjelasan dalam stanza, *muwah tanah i bantayan pramukha bantayan len luwuk, tiken uda makatrayadinikanan sanusapupul*. Stanza tersebut dapat dipahami bahwa "Bantaeng, Luwuk dan Uda, merupakan trio. Yang utama adalah ketiganya menyatu dalam satu pulau (daratan)". Lepas dari persoalan bahwa pendapat tersebut telah diluruskan oleh J.H.F. Sollewijn Gelpke dan Christian Pelras, penafsiran Pigeaud yang menjadi sumber dari karya M. Yamin tersebut di atas sangat berpengaruh pada kalangan anak sekolah di Talaud. Udamakatraya digunakan sebagai nama sebuah Sekolah Menengah Atas di ibukota Kabupaten Kepulauan Talaud. Tidak hanya itu saja. Ada organisasi kemahasiswaan (Talaud) di Manado yang dengan bangga menyangand nama "Udamakatraya, Payung Utara".

Kembali ke persoalan kritik atau upaya pelurusan informasi Pigeaud yang dikemukakan oleh dua pakar sejarah dan budaya Nusantara (Sollewijn Gelpke dan Pelras) yang kepekarannya mendapat pengakuan internasional. Sollewijn

Gelpke dalam artikelnya berjudul *The Majapahit Dependency Udama katraya*, diterbitkan dalam *Bijdragen tot de Taal-, land- en volkenkunde*. Deel 148, 1992, 2e Afl., menyatakan bahwa, *udama katraya* bukanlah nama tempat di Talaud melainkan di daratan Sulawesi. Uraianya ditunjang oleh data dan argument yang mencerminkan kemahirannya dalam bahasa Sanskrit maupun pengetahuannya yang luas tentang wilayah Nusantara bagian timur. Hal ini dapat dimaklumi karena selesai menamatkan studinya sebagai seorang *Indolog* atau ahli tentang tanah jajahan, Sollewijn Gelpke menjalani separuh usianya sebagai pejabat pemerintah Hindia Belanda di tanah Papua.

Jika Sollewijn Gelpke hanya menyebut lokasi *udama katraya* berada di daratan Sulawesi; lain lagi halnya dengan Christian Pelras. Peneliti Senior di *Centre Nationale de Recherche Scientifique* Perancis yang menghabiskan banyak waktunya di Indonesia dan Sulawesi Selatan ini dalam bukunya berjudul *The Bugis*, karya yang ditulis atas permintaan Penerbit ternama Blackwell Publisher, Oxford, yang diterbitkan tahun 2001, mengutarakan penjelasan yang sekaligus meluruskan pendapat Pigeaud. Sebagai seorang pakar yang tidak hanya mahir membaca aksara kuno *Lontara* tetapi juga bahasa Sanskrit dan bahasa Indonesia, Pelras menggunakan sejumlah alasan, mulai dari pemahaman atas alur berpikir dalam naskah *Negara Kertagama*, *Canto 14, Stanza 3 – 5* serta sumber naskah *lontara*.

Karya keilmuan lainnya dari Robert Cribb berjudul: *Historical Atlas of Indonesia* (2000),²⁰ seakan memperkuat pendapat Sollewijn Gelpke dan Pelras. Pada peta 3.17 berjudul *Majapahit's overseas empire*, halaman 87, wilayah Majapahit tidak mencakup seluruh jazirah utara Sulawesi. Di jazirah Sulawesi Utara, daratan Minahasa digambarkan

20 Robert Cribb, *Historical Atlas of Indonesia*. University of Hawai'i Press, Honolulu. 2000.

sebagai wilayah yang tidak mendapat pengaruh Majapahit, pengaruhnya hanya sebatas wilayah daratan Gorontalo. Selanjutnya, pada peta 3.46 berjudul *The Makassar empire before 1667*, pada halaman 102, pulau-pulau Sangihe dan Talaud dinyatakan sebagai wilayah yang berada dibawah pengaruh dan diklaim oleh kerajaan Makassar. Meskipun Leonard Andaya, seorang pakar Sejarah Sulawesi dan Maluku, dalam karyanya berjudul: *The Heritage of Arung Palakka. A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century* (1981)²¹ halaman 78 menyebut bahwa pengaruh Makassar hanya sebatas pulau atau kerajaan Tagulandang pada masanya.

Dapat diduga bahwa hubungan antara kepulauan Sangihe dan Talaud dengan Majapahit dan Makassar hanya sebatas hubunganniaga dan bukan sebagai "tanah-jajahan" atau vassal, sehingga tidak meninggalkan jejak baik dalam rupa artifak maupun budaya-tak-benda yang berarti. Dari sisi arkeologi, laporan penggalian arkeologi yang dilakukan oleh Peter Bellwood baik di Karakelang dan Salibabu maupun di Sangihe, misalnya²². Hasil ekskavasi Bellwood tersebut menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa pulau-pulau ini menyimpan artefak atau peninggalan yang menunjukkan adanya pengaruh Majapahit. Selain itu, tidak ditemukan bukti peninggalan peradaban Muslim. Pecahan gerabah yang ditemukan justeru menunjukkan kesamaan dengan hasil-hasil temuan arkeologis di pulau Palawan dan daratan Mindanao yang asal muasalnya dapat ditelusuri hingga pesisir timur Asia daratan.

21 Lihat Leonard Y. Andaya, *The Heritage of Arung Palakka. A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*. 1981. The Hague - Martinus Nijhoff. Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.

22 Lihat Peter Bellwood, "Archaeological Research in Minahasa and the Talaud Islands, Northeastern Indonesia" dalam *ASIAN PERSPECTIVE*, XIX (2), 1976: 240 - 289; *PREHISTORY OF THE INDOMALAYSIAN ARCHIPELAGO*. Academic Press Australia; dan "Southeast Asia before History" dalam N. Tarling (ed.), *THE CAMBRIDGE HISTORY OF SOUTHEAST ASIA*. Vol. I. Part I.

Pengaruh lain dapat dilihat pula dalam kata-kata pinjaman. Dari sekian kosakata Sangihe yang dipengaruhi atau dianggap kata pinjaman, sebagian besar berkorelasi dengan Melayu, Melayu Ambon, bahasa Ternate, dan bahasa Belanda.²³

Jelas bahwa uraian para pakar di atas – Sollewijn Gelpke, Pelras, dan Cribb – berbeda dengan penafsiran Pigeaud yang dikutip oleh M. Yamin. Adapun pendapat Muhammad Yamin – yang menempatkan *Udamakatraya* di gugusan pulau-pulau Talaud – dapat dipahami karena di dasari oleh semangat jaman kala itu, yakni menafsirkan Nusantara tidak hanya meliputi kepulauan Indonesia melainkan juga mencakup kepulauan Filipina dan Semenanjung Malaysia.

“Ingatan-kolektif” warga yang mengisahkan jalur pelayaran lebih awal yang dilakoni oleh “pelaut dan pedagang berbahasa Melayu” sebelum kehadiran bangsa Eropa di kawasan ini, menghubungkannya dengan Nusantara bagian barat, terutama dengan semenanjung Malaka. Keterangan dalam ingatan kolektif warga Nusa Utara dalam rupa tuturan kisah kesejarahan, mendapat pembenaran keilmuan dari para peneliti sejarah dan bahasa, seperti James Warren dan James T. Collins.²⁴

Penegasan lain dari J.C. van Leur, M.A.P. Meilink-Roelofz, Ernest Dodge, dan Holden Furber. Keempat sejarawan tersebut, dalam karya-karya mereka menjelaskan bahwa jaringan pelayaran di kawasan Laut Sulu – Laut Mindanao – Laut Sulawesi, hanya sebagian dari jaringan pelayaran dan perniagaan yang ada di Nusantara hingga Malaka maupun dari Samudera Pasifik pada masanya.²⁵ Route pelayaran dan

23 Kajian yang sedang penulis lakukan dengan mendasarkan pada kosakata Sangihe dalam Sangirees-Nederlands Woordenboek. (Steller & Aebersold), 1959.

24 Lihat, antara lain, James F. Warren, 1981:3 dan James T. Collins, 2005. Bahasa Melayu Bahasa Dunia, Sejarah Singkat. KITLV-Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, halaman 5-7 dan 21.

25 Lihat J.C. van Leur, 1967, *Indonesian Trade and Society. Essays in Asian Social and Economic*

perniagaan tersebut menghubungkan pelabuhan Malaka dengan pulau penghasil rempah-rempah, Maluku. Antara kedua tempat ini, terdapat sejumlah pelabuhan niaga di daratan Mindanao dan pulau-pulau Sulu. Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi semacam pedoman alami dalam lintasan niaga rempah-rempah ini.

Masa berjayanya Kesultanan Sulu pada abad ke- 18 hingga abad ke- 19, turut meramaikan jaringan jalur pelayaran tidak hanya sebatas Laut Sulawesi, Laut Mindanao, dan Laut Maluku, tetapi berlanjut ke selatan sampai Laut Banda kemudian memutar ke arah barat melewati Selat Makassar sebelum kembali ke pulau-pulau Sulu.²⁶ James Warren, sejarawan yang menekuni perniagaan di Kesultanan Sulu bahkan menyebut kawasan Laut Sulu, Laut Mindanao, Laut Sulawesi sebagai "*the Sulu Zone*" atau Zona Sulu karena kejayaan Kesultanan Sulu sebagai negara-bahari.

Aktivitas pelayaran sekaligus perniagaan pada setiap jamannya menjadikan kepulauan Sangihe dan Talaud, dimana pulau Marore merupakan bagian dari gugusan kepulauan ini mengalami berbagai pengaruh peradaban. Mulai dari pengaruh perantau dan pedagang berbahasa Melayu (kuno) sekitar abad ke- 10,²⁷ disusul oleh penyiar agama Islam dari Melayu pada abad ke- 14 – 15,²⁸ dan terakhir adalah pengaruh

History. W. Van Hoeve Publishers Ltd – The Hague; M.A.P. Meilink-Roelofs, 1962, *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*. Martinus Nijhoff; Ernest S. Dodge, 1976, *Islands and Empires, Western Impact on the Pacific and East Asia*. University of Minnesota Press, Minneapolis; dan Holden Furber, 1976. *Rival Empires of Trade in the Orient, 1600 – 1800*. University of Minnesota Press, Minneapolis.

26 James Francis Warren, 1981, *The Sulu zone 1768 – 1898: The dynamics of external trade, slavery, and ethnicity in the transformation of a Southeast Asian maritimes state*. Singapore University Press.

27 Lihat, James T. Collins, 2005. *Bahasa Melayu Bahasa Dunia, Sejarah Singkat*. KITLV-Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, halaman 7, 21.

28 Lihat Najeeb M. Saleeby, 1908, *The History of Sulu*. Bureau of Science Division of Ethnology Publications Volume IV, Part II. Manila; dan Theodore A. Agoncilo, 1990, *History of the Filipino People*. Garotech Publ. Quezon City, 8 Edition, hal. 24 – 25.

peradaban Barat.²⁹

Dalam sejumlah tulisan dan kajian yang sudah dirujuk di atas – baik tentang kawasan dimana pulau-pulau ini menjadi bagiannya maupun secara spesifik tentang pulau-pulau Sangihe dan Talaud – menunjukkan bahwa posisi geografisnya memiliki arti penting dalam sejarah kawasan ini. Kajian yang lebih mutakhir dilakukan oleh pakar sejarah bahari: Adrian B. Lopian. Dengan judul *Orang Laut – Bajak Laut – Raja Laut, Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*³⁰ Lopian memaparkan jaringan pelayaran dan niaga pada abad XIX yang berkonvergensi di Laut Sulawesi.

Sejak abad XVI – menurut Lopian – kekuatan asing dari Eropa terlibat dalam pertarungan kekuasaan laut di wilayah ini. Hasil pertarungan tersebut berdampak pada terbaginya kawasan ini (Laut Sulawesi) yang kini merupakan wilayah dari tiga negara bertetangga, yakni Filipina, Indonesia dan Malaysia. Di mana kepulauan Sangihe dan Talaud merupakan bagian dari sistem laut yang dikajinya. Dalam tulisannya yang lain, Lopian menyatakan bahwa semula, Laut Sulawesi adalah

“.... kesatuan dunia bahari (...) mulai retak dengan kedatangan orang asing (banyaga) dari Eropa Barat. Mula-mula orang Portugis dan Spanyol (Abad ke- 16), kemudian orang Belanda (abad ke-17). Perang antara Spanyol dan Belanda yang berawal di Eropa dan yang sesungguhnya merupakan perang kemerdekaan bangsa Belanda dan telah berlangsung puluhan tahun lamanya, dilanjutkan di wilayah timur Nusantara, termasuk wilayah Laut Sulawesi. Perang ini akhirnya diselesaikan pada perjanjian perdamaian Munster pada tahun 1648 ketika Spanyol mengakui Republik Persatuan Belanda sebagai negara yang merdeka dan

29 Lihat: A.B. Lopian, 2009. *Orang Laut Bajak Laut Raja Laut. Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX*. Komunitas Bambu. Jakarta.

30 Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 1987. 471 halaman + xviii dan 7 halaman peta

berdaulat. Perjanjian perdamaian ini turut menentukan batas-batas wilayah diseberang lautan termasuk di kawasan Laut Sulawesi. Bagian utara menjadi wilayah pengaruh Spanyol dengan pusatnya di Manila, sedangkan bagian selatan masuk wilayah Belanda yang berpusat di Ternate”³¹

Ulaen (2003) dalam karyanya yang diberi Kata Pengantar oleh Lapien yang sebagian dikutip di atas, menyatakan bahwa dengan disepakatinya perjanjian damai antara Spanyol dan Belanda Perjanjian Munster (1648) seperti yang diungkap oleh Lapien, hal itu turut memilah-pisahkan kawasan Laut Sulawesi menjadi dua wilayah, tidaklah sertamerta mempengaruhi geo-politik Nusa Utara. Hal itu justru terjadi karena adanya ekspedisi Padtbrugge yang memaksakan kontrak kepada raja-raja di kepulauan ini. Salindeho dan Sombowadile (2008:50) memperkuat pendapat tersebut dan bahkan menyatakan bahwa hal itu terjadi karena “siasat Padtbrugge.” Siasat Padtbrugge agar dia (VOC) tidak dianggap merusak Perjanjian Damai Munster, Salindeho dan Sombowadile merujuk pada beberapa keterangan Brilman. Antara lain, terbaca dalam isi perjanjian antara Raja Siau, Batahi dengan Gubernur VOC, Robertus Padtbrugge yang di satu pihak mendiskreditkan penguasa Spanyol dan di pihak lain, seakan-akan perjanjian itu diinginkan oleh pihak Siau.³² Sejak adanya *Kontrak* 1677 antara raja-raja Sangihe dengan VOC, peta geo-politik Sangihe dan Talaud, beralih dari status *lintasan niaga* menjadi *Landstreek van Menado*. Ketika kedua negara bertetangga (Indonesia dan Filipina) merdeka, status *landstreek van Menado* tetap berlanjut sekaligus menjadi ‘daerah perbatasan’.

31 A.B. Lapien, “Pengantar” dalam Alex J. Ulaen, *Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003.

32 Uraian rinci tentang muslihat itu dapat dibaca dalam Salindeho & Sombowadile (2008:50 – 59) atau juga dalam Brilman (1938).

Sebagai bagian dari tanah jajahan – mulai dari masa Kompeni (VOC) hingga masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda – kepulauan Sangihe dan Talaud memiliki arti geostrategis bagi Belanda. Kepulauan ini merupakan kawasan *frontier* berhadapan dengan kekuatan Spanyol yang berpusat di Manila. Tidaklah mengherankan apabila perniagaan bahkan penyebaran agama yang berkaitan dengan Spanyol dilarang di daerah kepulauan ini. Konsekuensi pembatasan pelayaran ialah daerah ini menjadi *daerah pinggiran* atau juga *daerah perbatasan* tidak hanya dalam artian geografis, melainkan juga dalam artian sosial-ekonomi-politik dan pemerintahan.



Gambar 2.1 Pulau Marore dalam Peta Pelayaran

2.3 Pulau Marore dalam Peta Sejarah Nusa Utara

Geografis, Marore bukan sebuah pulau yang lepas-sendiri dan terasing. Brilman benar ketika ia mendeskripsikan kepulauan Sangihe. "...beberapa pulau sangat berdekatan, lainnya terpisah jauh dari yang lain (...) mereka laksana membentuk suatu jembatan pulau-pulau

yang menghubungkan Minahasa (...) dengan Mindanao".³³ Deretan pulau-pulau kecil ini satu persatu dari arah selatan ke utara mulai dari pulau Talise kemudian pulau-pulau Biaro, Tagulandang, Siau dan pulau-pulau kecil lainnya sampai ke pulau Sangihe, ibarat "jembatan-alami" yang memandu pelayaran dari selatan ke utara. Dari pulau Sangihe, kemudian ditemukan percabangan. Pada sisi barat terdapat gugusan pulau yang berderet mulai dari pulau Sangihe, pulau-pulau Toade meliputi Toade, Manipa, Bukide, dan Buang serta beberapa pulau kecil lainnya, kelompok pulau-pulau Kawio meliputi Kawaluso, Dumarehe, Matutuang, Memanuk, Marie, Kemboleng, Kawio, dan Marore di wilayah Indonesia, sampai ke pulau Balut dan pulau Sarangani sebelum mencapai Tanjung Tinaka (bagian selatan-tengah pulau Mindanao). Pada bagian timur, berada pada posisi yang sama dengan kelompok pulau-pulau Toade yakni di garis 3 30' Lintang Utara ditemukan gugusan pulau-pulau Talaud, paling selatan adalah pulau Kabaruan, kemudian ke arah utara, pulau Salibabu, pulau Karakelang, kelompok pulau-pulau Nanusa dan Miangas berada paling utara hingga ke tanjung San Agustin (ujung selatan-timur pulau Mindanao).



Gambar 2.2 Pulau Marore dipotret dari arah selatan

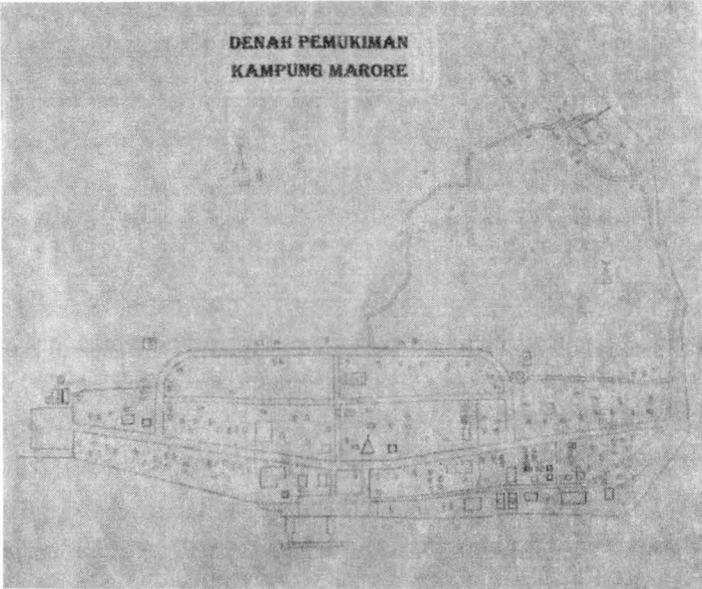
33 Brilman (1938:1)

2.4 Pulau Marore kini

Marore merupakan satu dari lima belas Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kecamatan ini terdiri dari 3 desa (pulau) yaitu Marore, Matutuang, dan Kawio. Wilayah Kecamatan Kepulauan Marore dihuni oleh 1.471 jiwa yang terdiri dari 397 kepala keluarga. Mayoritas penduduk beragama Kristen, sebagian yang lain Katolik dan Islam. Sarana peribadatan yang ada di Pulau Marore terdiri dari 5 buah gereja Kristen dan 1 buah masjid (Data Penduduk Kecamatan Kepulauan Marore Tahun 2011). Sebagian besar penduduk Marore bermata pencaharian sebagai nelayan (30%), PNS (10%), pengusaha / pedagang (4%) dan mata pencaharian lain (6%) (Salindeho, 2008)

Berdasarkan data tahun 2011 fasilitas pendidik yang sudah dimiliki Pulau Marore adalah TK sebanyak satu buah, SD sebanyak tiga buah, SMP sebanyak dua buah dan SMA Negeri sebanyak satu buah. Satu unit Puskesmas Pembantu dengan dua tenaga dokter dan satu bidan melayani kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Terdapat empat buah kios yang menjual kebutuhan sehari-hari yang dikelola KUD dan perseorangan serta sebuah pasar yang pembangunannya didanai oleh pemerintah pusat.

Fasilitas penunjang lalu-lintas batas yang terdapat di Pulau Marore antara lain Kantor Syahbandar, Kantor Bea dan Cukai, dan Kantor Imigrasi. Terkait dengan pertahanan dan keamanan terdapat Pos Angkatan Laut, Kantor Polisi setingkat sektor dan Pos TNI Angkatan Darat. Untuk mendukung pelayanan pemerintahan terdapat kantor desa, kantor Camat BCA. Terdapat pula fasilitas penunjang yang sudah dibangun antara lain berbagai rumah dinas, menara mercusuar, gudang daging dan pabrik es yang menunjang kebutuhan dalam penangkapan ikan. Bangunan pihak asing yang ada di sini adalah *Border Crossing Station* milik pemerintah Filipina.



Gambar 2.3 Denah Kampung Marore
Sumber: Kantor Kepala Desa Marore

BAB III

BUDAYA SANGIHE, TRADISI BAHARI

Hingga kini, baru dua sistem pengetahuan tradisional dalam sistem budaya Nusa Utara yang ditulis dan dipublikasi dalam bahasa Indonesia. Pertama, tentang bahasa-pantang¹ dan kedua, tentang mata angin², sebagai unsur budaya bahari di kalangan warga Nusa Utara. Selain kedua sistem pengetahuan tersebut, masih ditemukan sistem pengetahuan tradisional lainnya yang kental menandai tradisi-bahari, yakni sistem penanggalan atau oleh warga setempat disebut *batiang*; pengetahuan tentang peredaran bulan, perbintangan serta letaknya sebagai penanda pulau-pulau di kepulauan Sangihe dan Talaud. Pengetahuan tradisional penanda tradisi bahari tersebut akan dipaparkan dalam bab ini.

3.1 *Batiang*: “Posisi-bulan/bintang-penanda-musim”

Sejak masuknya peradaban kristiani melalui pendidikan formal, warga Nusa Utara diperkenalkan dengan sistem

1 Lihat R.M. Sutjipto Wirjosuparto, BUNGA RAMPAI SEDJARAH BUDAJA INDONESIA. Penerbit Djambatan, 1964. Bab IX, halaman 104 – 108.

2 A.B. Lopian, 2008:16.

penanggalan atau almanak Gregorian. Padahal, pada masa lampau dan hingga kini masih digunakan oleh generasi tua pelaut dan nelayan adalah sistem pengetahuan dan penanggalan tradisional yang dikenal dengan sebutan *batiang*. Kata *batiang* dapat dipahami sebagai penanggalan; dan lebih luas artinya adalah pengetahuan yang berkenaan dengan sistem penanggalan tersebut. Steller dan Aebersold, dua ahli bahasa Sangihe, dalam *Sangirees-Nederlands Woordenboek* (1959) halaman 39, memadankan lema *batiang* dengan kata *jaar* dan *lange tijd* (dalam bahasa Belanda, yang berarti tahun dan periode panjang).

Penanggalan ini berdasarkan sistem luner dalam perhitungan harinya yakni sebanyak 15 hari dikali dua dalam sebulan, sedangkan penamaan bulan demi bulan didasarkan pada posisi bintang. Ada dua belas bulan dalam setahun. Hari pertama awal bulan saatnya bersamaan dengan munculnya atau bulan tampak di ufuk, dan bulan purnama (terang) merupakan hari ke lima-belas, sedangkan purnama (gelap) merupakan hari terakhir dalam satu siklus bulan. Adapun hari-hari nama bulan itu dapat dibaca dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Urutan hari dan nama bulan di langit dalam bahasa Sangihe dan Talaud

Urutan hari	Nama bulan (Sangihe)	Nama bulan (Talaud)
Bulan hari pertama	<i>Kahumata pakesa</i>	<i>Ajato</i>
Bulan hari kedua	<i>Kahumata karuane</i>	<i>Aruane</i>
Bulan hari ketiga	<i>Kahumata katélune</i>	<i>Atalune</i>
Bulan hari keempat	<i>Sehang u haresé</i>	<i>Ṙarassa mawawo</i>
Bulan hari kelima	<i>Batangeng u haresé</i>	<i>Ṙarassa matangga</i>
Bulan hari keenam	<i>Likudu haresé</i>	<i>Dape</i>
Bulan hari ketujuh	<i>Sehang u lettuh</i>	<i>Atassa</i>
Bulan hari kedelapan	<i>Batangeng u lettuh</i>	<i>Lattu</i>

Bulan hari kesembilan	<i>Likudu lettü</i>	<i>Naworio</i>
Bulan hari kesepuluh	<i>Awang</i>	<i>Naworaalla</i>
Bulan hari kesebelas	<i>Sehangu pangumpia</i>	<i>Pangumpia</i>
Bulan hari keduabelas	<i>Batangeng u pangumpia</i>	<i>Paussa</i>
Bulan hari ketigabelas	<i>Umpause</i>	<i>Ara ajanna</i>
Bulan hari keempatbelas	<i>Limangun bujang</i>	<i>Atoone</i>
Bulan purnama	<i>Teping</i>	<i>Dumaria</i>
Bulan hari keenambelas	<i>Sai pakessa</i>	<i>Umapatta</i>
Bulan hari ketujuhbelas	<i>Sai karuane</i>	<i>Umapatta aruane</i>
Bulan hari kedelapan belas	<i>Sai katellune</i>	<i>Umapatta atallune</i>
Bulan hari kesembilan belas	<i>Sehang u haresê</i>	<i>Rarassa mawawo</i>
Bulan hari keduapuluh	<i>Batangeng u haresê</i>	<i>Rarassa matangga</i>
Bulan hari keduapuluh satu	<i>Likudu haresê</i>	<i>Dape</i>
Bulan hari keduapuluh dua	<i>Sehang u lettü</i>	<i>Atassa</i>
Bulan hari keduapuluh tiga	<i>Batangeng u lettü</i>	<i>Lattu</i>
Bulan hari keduapuluh empat	<i>Likudu lettü</i>	<i>Naworio</i>
Bulan hari keduapuluh lima	<i>Awang</i>	<i>Naworaalla</i>
Bulan hari keduapuluh enam	<i>Sehangu pangumpia</i>	<i>Pangumpia</i>
Bulan hari keduapuluh tujuh	<i>Batangeng u pangumpia</i>	<i>Paussa</i>
Bulan hari keduapuluh delapan	<i>Umpause</i>	<i>Ara ajanna</i>
Bulan hari keduapuluh sembilan	<i>Limangun basa</i>	<i>Atoone</i>
Bulan hari ketigapuluh	<i>Tekaje</i>	<i>Dumaria mbasa</i>

Sumber: Disusun dari beberapa narasumber, terutama: (1) bapak R. Timbul (pensiunan pemilik kebudayaan Sangihe); (2) bapak Magenda (Ratumbanua Kiama); (3) bapak Barahama (Marore); (4) bapak Makahanap (Nakhoda km. Kawaluso).

Selain dalam bahasa Sangihe (dialek Manganitu) dan bahasa Talaud (dialek Lirung) yang digunakan dalam tabel di atas, setiap dialek melafalkannya sesuai nama bulan dan dialek mereka. Misalnya, bulan hari ketiga dalam bahasa

Sangihe, *kahumata katelune*, dalam dialek Tagulandang disebut *tuŕuri*; dalam dialek Siau, *tuŕude*, begitu seterusnya.

Dalam hal menghitung waktu dari bulan hari pertama hingga purnama (terang), periode harinya atau saatnya dihitung sejak bulan tampak di ufuk, selanjutnya sesudah purnama, periode harinya mengawali tampaknya bulan di ufuk.

Ketiga puluh hari berdasarkan sistem lunar atau bulan ini merupakan satu periode yang dalam urutannya dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Nama bulan (waktu) dalam bahasa Sangihe

Dalam bahasa Sangihe	Rasi bintang patokan	Periodenya
<i>Bujangu Hiabe</i>	Pleiadea (Ufuk Utara)	Mengacu kepada posisi bintang tujuh di ufuk utara. Dihitung mulai dari bulan di langit hari pertama. Pada penanggalan Gregorian (Masehi), biasanya jatuh pada bulan Desember – Januari.
<i>Bujangu kateluang</i>	Orion (Ufuk Selatan)	Mengacu pada posisi bintang tiga di ufuk selatan. Dihitung mulai dari bulan di langit hari pertama. Pada penanggalan Masehi, biasanya jatuh pada bulan Januari – Februari.
<i>Bujangu Pahuru</i>		Dihitung mulai dari bulan di langit hari pertama. Pada penanggalan Masehi, biasanya jatuh pada bulan Februari – Maret.
<i>Bujangu Kaemba</i>		Dihitung mulai dari bulan di langit hari pertama. Pada penanggalan Masehi, biasanya jatuh pada bulan Maret – April.
<i>Bujangu Hampuge</i>	Rasi pleiade berada di horison	Dihitung mulai dari bulan di langit hari pertama. Pada penanggalan Masehi, biasanya jatuh pada bulan April – Mei.

<i>Bujangu Hente</i>		Dihitung mulai dari bulan di langit hari pertama. Pada penanggalan Masehi, biasanya jatuh pada bulan Mei – Juni.
<i>Bujangu Arputi Kadio</i>		Dihitung mulai dari bulan di langit hari pertama. Pada penanggalan Masehi, biasanya jatuh pada bulan Juni - Juli.
<i>Bujangu Arputi Gheguwa</i>		Dihitung mulai dari bulan di langit hari pertama. Pada penanggalan Masehi, biasanya jatuh pada bulan Juli – Agustus.
<i>Bujangu Liwuge</i>		Dihitung mulai dari bulan di langit hari pertama. Pada penanggalan Masehi, biasanya jatuh pada bulan Agustus – September.
<i>Bujangu Bewene</i>		Dihitung mulai dari bulan di langit hari pertama. Pada penanggalan Masehi, biasanya jatuh pada bulan September – Oktober.
<i>Bujangu Lurange</i>		Dihitung mulai dari bulan di langit hari pertama. Pada penanggalan Masehi, biasanya jatuh pada bulan Oktober – Nopember.
<i>Bujangu Tambaru</i>		Mengacu pada posisi bintang tiga. Dihitung mulai dari bulan di langit hari pertama. Pada penanggalan Masehi, biasanya jatuh pada bulan Nopember – Desember.

Sumber: Diolah dari keterangan beberapa narasumber, terutama: (1) bapak R. Timbul (pensiunan penilik kebudayaan Sangihe); (2) bapak Magenda (Ratumbanua Kiama); (3) bapak Barahama (Marore); (4) bapak Makahanap (Nakhoda km. Kawaluso); (5) bapak Ch. Rumewo (pensiunan guru).

Selain sistem penanggalan atau *batiang* tersebut, untuk menandai waktu, warga memperhatikan saat-saat pasang-surut air laut. Perhitungan tentang pasang-surut air laut tidak hanya digunakan sewaktu melaut dan bepergian lewat laut, tetapi juga menyangkut aktivitas bercocok-tanam. Arah bepergian dengan menggunakan kendaraan laut – baik

itu semasa warga masih menggunakan dayung dan layar, maupunsudah menggunakan mesin – dengan memperhatikan saat-saat pasang-surut air laut ternyata berhubungan erat dengan perputaran arus. Sebagai contoh, jika nelayan dari pulau Marore mau melaut ke arah pulau Matutuang, ia harus berangkat pada saat air laut sedang pasang-surut. Pada saat itu, pusaran arus bergerak dari utara ke selatan atau dari pulau Marore ke arah pulau Matutuang. Dengan demikian nelayan tidak akan melawan arus, tetapi mengikuti arus. Sebaliknya, setelah saat air laut sedang pasang-naik, maka arus pun akan bergerak ke arah berlawanan.³

Baik sistem penanggalan *batiang* maupun letak bulan di langit tidak sekedar penanda waktu. Para nelayan melakukan aktivitas *badaseng* senantiasa mengacu pada penanggalan *batiang* dipadu dengan hari-bulan. Saat bertolak dari pulau ke tempat beraktivitas atau melaut juga memperhatikan saat-saat pasang-surut air laut. Secara umum, para nelayan tidak melakukan aktivitas melaut pada saat bulan keempat hingga keenam (*sehang u harese* hingga *likudu harese*). Pada saat itu, pusaran arus tidak menentu. Begitu pula dengan curah hujan. Hal serupa – menurut pemahaman para nelayan – terjadi pada bulan ke sembilan belas dan keduapuluh. Juga terjadi pada periode bulan ke sembilan dan ke sepuluh dan bulan ke duapuluh empat dan dua puluh lima. Bulan yang dianggap baik melaut, khususnya untuk mengail ikan-ikan berukuran besar seperti tenggiri, ikan hiu, adalah pada periode bulan ke sebelas hingga bulan purnama. Bulan ke sebelas dan ke duapuluh enam (*sehangu pangumpia*) tidak hanya dianggap saat yang baik untuk melaut, tetapi juga untuk mendirikan rumah, terutama pada saat memasang “tiang raja”.

3 Pengalaman penelitian ketika berlayar dari pulau Sangihe menuju pulau Marore, harus berlayar selama kurang lebih sembilan jam karena melawan arus. Ketika kembali dari pulau Marore ke pulau Sangihe, hanya ditempuh selama tujuh jam karena ikut arus.

Anggapan para nelayan tentang adanya saat-saat baik dan saat-saat kurang beruntung jika melaut, dihubungkan dengan sistem penanggalan *batiang* maupun posisi bulan, jika disimak bukanlah kepercayaan yang sia-sia atau semacam takhyul semata. Anggapan mereka lebih bersifat pengalaman mereka maupun pengalaman dari leluhur yang dikisahkan turun temurun. Hubungan antara pasang-surut air laut yang ditandai dengan perubahan arus merupakan pengetahuan tradisional yang dapat dijelaskan secara rasional. Begitu pula dengan larangan dan anjuran yang berkaitan dengan peredaran atau posisi bulan di langit.

Pengetahuan tentang mata angin di kalangan pendukung tradisi bahari di Nusa Utara terekam dalam 17 (tujuh belas) nama mata angin. Hal ini berbeda dengan pengetahuan serupa di beberapa peradaban di dunia yang hanya mengenal 4 (empat), atau 8 (delapan), atau juga 16 (enam belas) nama dan arah mata angin. Nama mata angin ke 17 adalah *miang* atau dalam bahasa laut atau *sasahara* disebut *mangkahukang*, berada di antara mata angin utara dengan utara barat laut atau berada pada 350°. Setiap mata angin dipandang memiliki pola masing-masing yang disifatkan dalam sebutan bahasa laut. Angin barat dalam bahasa *sasahara* disebut *mohong maļoang* yang harafiah *mohong* berarti mulut dan *maļoang* berarti lebar, atau juga besar.

Tabel 3.3 Nama 17 mata angin dalam bahasa Sangihe

No.	Nama mata angin (Bhs. Indonesia)	Nama mata angin (bhs Sangihe)	Nama mata angin (bhs Sasahara)
01.	Utara	<i>Sawēnahē'</i>	<i>Mamenongkati</i>
02.	Utara Timur Laut	<i>Laessu'iki' sawēnahē</i>	<i>Maēmpukang mamenongkati</i>
03.	Timur Laut	<i>Laessu'iki'</i>	<i>Maēmpukang; maļaesang; mahaingkonang</i>
04.	Timur Timur Laut	<i>Laessu'iki' daki</i>	<i>Maēmpukang malello</i>

05.	Timur	<i>Dak□</i>	<i>Malello; saĵundere; maĵenteeng; masindere</i>
06.	Timur menenggara	<i>Mahaindaki</i>	<i>Maundekang malello</i>
07.	Tenggara	<i>Mahai</i>	<i>Maundekang; tuměntapi; mansohaweng; maėmbekang</i>
08.	Selatan menenggara	<i>Mahaintimuhě</i>	<i>Maundekang matawoĵa</i>
09.	Selatan	<i>Timuhě</i>	<i>Boĵa; matawoĵa; maĵegeėng</i>
10.	Selatan Barat Daya	<i>Tahangeng timuhě</i>	<i>Gumahagha matawoĵa; amboha; masanggohang</i>
11.	Barat Daya	<i>Tahangeng</i>	<i>Gumahagha; mahanggosang</i>
12.	Barat Barat Daya	<i>Tahangeng bahe'</i>	<i>Gumahagha palang ěpa</i>
13.	Barat	<i>Bahe'</i>	<i>Palang ěpa; mohong maĵoang; dadakele</i>
14.	Barat Barat Laut	<i>Poĵoeng bahe'</i>	<i>Mamponggaing palang ěpa</i>
15.	Barat Laut	<i>Poĵoeng</i>	<i>Mamponggaing</i>
16.	Utara Barat Laut	<i>Poĵoeng sawėnahě</i>	<i>Mamponggaing mamenongkati</i>
17.	Utara utara barat laut	<i>miang</i>	<i>Mangkahukang</i>

Dari berbagai sumber

Berbeda dengan pengetahuan modern yang menentukan asal mata angin berdasarkan derajat, misalnya utara pada 0°; timur pada 90°; selatan pada 180°; dan barat pada 270°; pendukung tradisi bahari Nusa Utara menandai mata angin ini dengan posisi bintang. Misalnya, bintang *hiabe* (*pleiadea*) penanda ufuk utara dan seterusnya. Sedangkan di siang hari, matahari dan alun gelombang yang menjadi penandanya.

3.2 Peta-bumi Nusa Utara dalam tradisi bahari

Sudah sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, pelajaran ilmu bumi atau sekarang ini lebih dikenal dengan sebutan geografi, peta dunia dan peta wilayah Hindia Belanda

diberi bingkai dan digantungkan di dinding-dinding sekolah di pelosok Nusa Utara. Setelah Indonesia merdeka, petanya tetap sama hanya namanya yang berubah. Peta bumi Indonesia, dengan batas-batas yang jelas antara wilayah negara-negara yang bertetangga dengan wilayah Indonesia, baik itu di darat (antara Kalimantan dan Malaysia Timur; antara Irian Barat dengan Papua New Guinea; dan antara Timor dengan Timor-Portugal atau sekarang Timor Leste) maupun batas wilayah Laut.

Setiap negara menerbitkan peta wilayahnya dengan batas-batas yang jelas. Ada koordinatnya dan ketentuan-ketentuan yang mengatur perbatasan antar negara. Bahkan, untuk menandai wilayahnya dan bukan wilayahnya diberi pembeda dalam rupa warna. Pemerintah Indonesia, melalui Dinas Hidro-oseanografi TNI-AL bersama Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional yang disingkat Bakosurtanal menerbitkan peta Pulau-pulau Sangihe dan Talaud (edisi 1993) berjudul Peta Lingkungan Laut Nasional atau Peta LLN-28 dan memberi sebuah garis tebal yang dinamai Garis Cakupan 12 mil laut yang membentang-memisahkan wilayah Indonesia dengan wilayah Filipina. Begitu pula dengan negara tetangga, Filipina yang menerbitkan *Political Map of the Philippines* (1997) membuat garis pembatas yang memisahkan wilayahnya dari wilayah Indonesia.

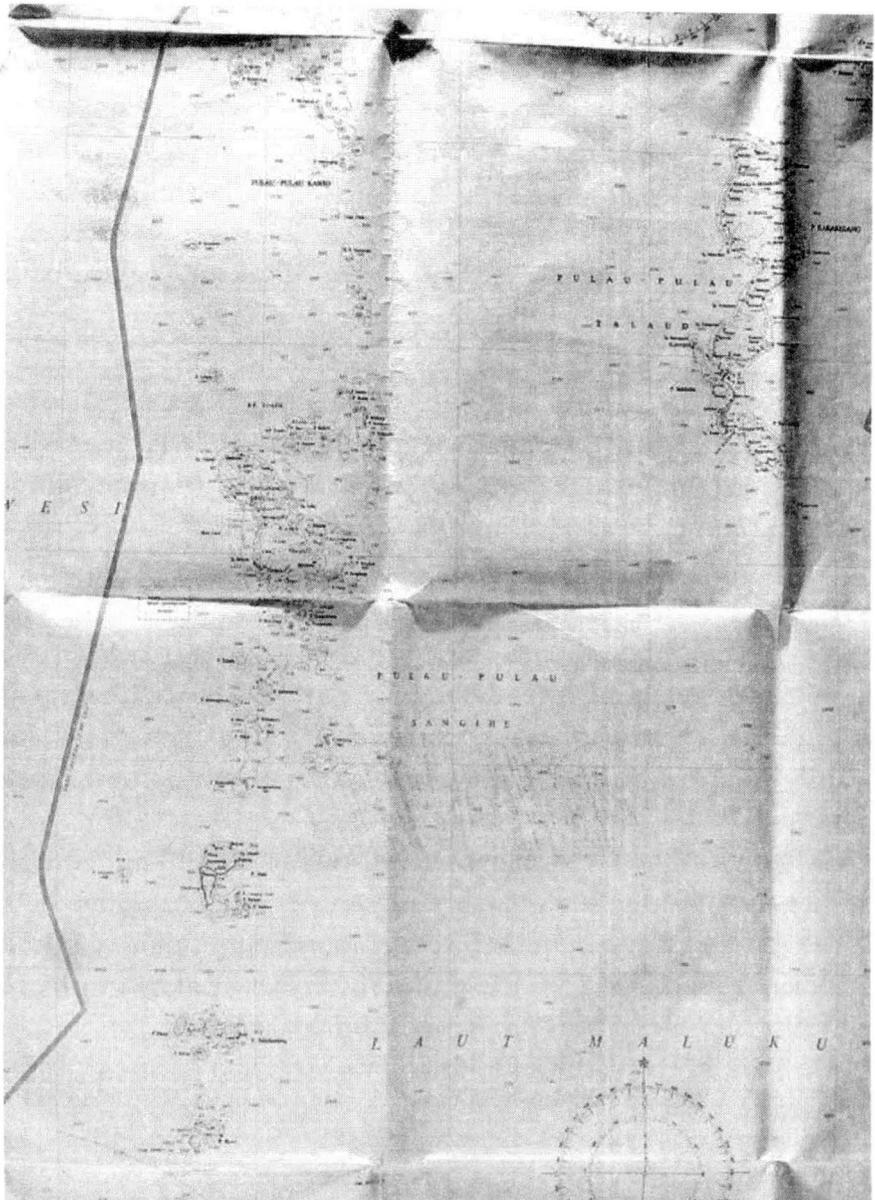
Tentang garis pembatas antar negara dalam peta, A.B. Lopian, (2009:29) menjelaskan fungsinya sebagai berikut:

“... melintasi garis perbatasan suatu negara berarti memasuki wilayah tempat berlaku undang-undang yang lain dan juga peraturan perpajakan, alat pembayaran, serta sistem pos dan telekomunikasi yang berbeda. Lebih-lebih lagi perbedaan ini dinyatakan dalam simbol kenegaraan seperti bendera nasional, lagu kebangsaan, kepemimpinan negara serta sistem pemerintahannya.

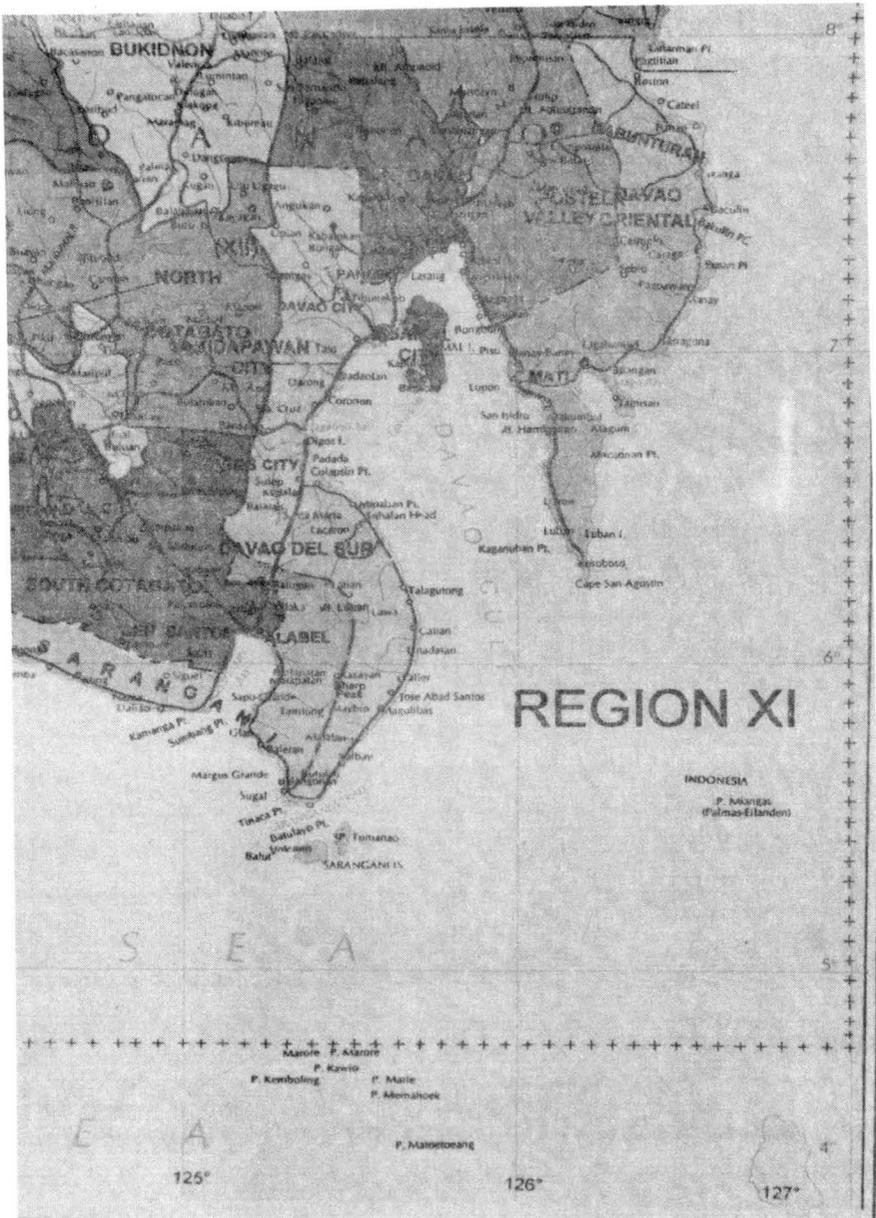
Namun garis perbatasan negara tidak selalu mengikuti garis pemisah antara wilayah kebudayaan, bahasa, suku bangsa, atau satuan ekonomi yang berbeda. Terlebih lagi kalau faktor geografi fisik diambil sebagai pegangan, maka pada umumnya garis perbatasan tidak berfungsi. Iklim dan cuaca misalnya, begitu pula arus laut, gempa bumi, tsunami, taifun, dan sebagainya tidak menghiraukan batas-batas negara...”

Pernyataan dalam kalimat ketiga pada kutipan di atas bahwa “... garis perbatasan negara tidak selalau mengikuti garis pemisah antara wilayah kebudayaan, bahasa, suku-bangsa, atau satuan ekonomi yang berbeda” sebenarnya telah menjelaskan kenyataan sosial budaya dan ekonomi di wilayah perbatasan yang menjadi fokus studi ini. Tentu saja pernyataan Lapien di atas tidak terlalu mengherankan karena penjelasan tersebut adalah bagian dari studinya (disertasi) yang didasarkan pada wilayah dan kawasan yang sama, yaitu Kawasan Laut Sulawesi, di mana terdapat kepulauan Nusa Utara.

Dua gambar peta berikut ini dapat dijadikan contoh penegasan tanda batas-batas wilayah negara. Cuplikan Peta pada gambar 2.4 merupakan contoh pembuatan peta di pihak Indonesia, sedangkan pada gambar 2.5 merupakan cuplikan dari *Political Map of the Philippines*, tanda batas yang didasarkan pada Traktat Paris, diberi tanda (+ + +) sebagai penanda batas negara.



Gambar 3.1 Cuplikan dari peta LLN-28. Garis biru pada sisi kiri adalah penanda batas 12 mil laut dari pulau terluar



Gambar 3.2 Cuplikan Political Map of the Philippines bagian selatan yang berbatasan dengan wilayah Republik Indonesia

Pelajaran ilmu bumi yang mengenalkan nama-nama pulau di Indonesia, koordinat perbatasan Indonesia dengan Filipina, masih bisa diingat oleh pak Baraham (82) warga Marore. Tapi, kalau bicara soal melaut, ia tidak mengenal batas itu. Masa ia masih belia, menemani ayahnya berlayar dengan sampan ke pulau Balut menjadi kegiatan sehari-hari. Tidak perlu pakai pas-jalan, apalagi membawa peta. Berbeda dengan sekarang, kalau mengunjungi keluarga di Balut, kami harus pakai pas pelintas-batas. Padahal tidak ada batas di laut kata pak Baraham. Pandangan pak Baraham mewakili cara pandang warga komunitas bahari. Menurut A.B. Lopian (2009:31), "bagi penduduk bahari laut bagi mereka adalah pemersatu – suatu *continuum* yang memungkinkan mereka berhubungan dengan penduduk di daerah seberang". Pendapat tersebut berlaku bagi warga Marore khususnya dan warga Nusa Utara umumnya. Ketika tradisi bahari yang mereka dukung belum terkalahkan oleh pengaruh peradaban luar, atau ketika mereka masih menjadi "orang laut" yang "(me)raja laut" sebagaimana digambarkan oleh Lopian, warga Marore dan Nusa Utara umumnya menciptakan "jembatan" antara seberang yang di sini dengan seberang yang di sana dengan menggunakan *sakaeng*, dengan beragam tipe dan nama. Steller dan Aegersold dalam *Sangirees-Nederlands Woordenboek* (1959:383-384) pada lema *sakaeng* mencatat 19 jenis *sakaeng* yaitu: *dorehe, sope, konteng, giopě, pamo, bojotû, senta, sikuti, lambutě, dampalå, pelang, tumbilung, londe, bininta, korakora, balasoa, tonda, niune, dan pangku* serta dua nama yang digunakan dalam "bahasa laut" atau bahasa *sasahara* yaitu *malimbatangeng* dan *bangka*. Jenis-jenis tersebut kini sulit ditemukan dan yang tersisa adalah *londe* yakni sampan bercadik dua belah menyebelah dengan ukuran untuk seorang atau dua orang nelayan.

Dalam tradisi bahari, warga Marore dan Nusa Utara umumnya, memilah lingkungan laut atas pesisir atau *saghe*,

dan laut jauh dari pesisir atau *laude*. Aktivitas penangkapan ikan di laut lepas disebut *melaude* dan jenis ikan yang dicari adalah hiu, tuna, tenggiri, dan sebagainya. Dari kata *laude* atau laut lepas, warga Sangihe menandai dan menyebut penduduk yang ada di pulau-pulau arah laut lepas dengan kata *tau laude* yang akhirnya menjadi *talaud*. Sebutan untuk sekelompok pulau di sebelah timur pulau Marore yang kini dikenal sebagai kepulauan Talaud, serta penduduknya, yaitu orang Talaud. Setiap pulau dan tempat – dalam tradisi bahari – memiliki dua nama atau sebutan. Sebutan ketika berada di darat akan berbeda dengan ketika hal yang sama apakah itu nama tempat, benda, diucapkan ketika berada di laut. Nelayan dari pulau Biaro dahulu, ketika mereka masih sedang berkemas di darat menyiapkan perahu, begitu ditanya mau kemana, spontan akan mengatakan bahwa mereka lagi siap-siap mau ke pulau Tagulandang. Setelah sudah berada di laut dan berpapasan dengan perahu nelayan lainnya dan menanyakan kemana arah mereka, maka jawabannya adalah mau ke Mandolokang. Sebutan bahasa laut atau *sasahara* untuk pulau Tagulandang. Jika pertanyaan yang sama diajukan kepada nelayan Marore ketika masih berada di darat, ia akan mengatakan bahwa mereka lagi bersiap-siap mau ke pulau Mindanao, tapi ketika sudah berada di laut dan ada yang ketemu dan bertanya, maka jawabannya adalah mau ke Mangkongkonang. Kalau mau ke pulau Sangihe besar, jawabannya adalah mau ke Tampungang Jawo. Ke Siau, Karangetang, begitu seterusnya. Pada tabel berikut ini dapat dibaca padanan nama pulau dan tempat dalam “bahasa laut”.

Tabel 3.4 Nama-nama pulau dan tempat dan sebutannya dalam bahasa laut

No.	Nama pulau / tempat	Sebutan dalam bahasa laut
1.	Pulau Mindanao	Mangkongkonang
2.	Pulau Sangihe	Tampungang Lawo
3.	Pulau Siau	Karangetang
4.	Pulau Tagulandang	Mandolokang
5.	Pulau Makalehi	Mantetukang
6.	Pulau Mahengetang	Mahinse
7.	Pulau Para	Majekaheng
8.	Pulau Nenung	Kojo-kojo
9.	Pulau Kalama	Mambelekang
10.	Pulau Bebalang	Tojopeti
11.	Desa Laine	Kadadima
12.	Tamako	Mantelagheng
13.	Manganitu	Maobungang
14.	Kalongan	Mansohowang
15.	Kauhis	Batu Lawo
16.	Paghulu	Soatinentang
17.	Tahuna	Malahasa
18.	Tariang	Lombontari
19.	Moade	Saluhang
20.	Bukide	Kaderotang
21.	Dan seterusnya	

Sumber: (1) Bapak R. Timbul (pensiunan penilik kebudayaan Sangihe); (2) bapak Barahama (Marore); (3) bapak Makahanap (nakhoda km. Kawaluso).

Dr. R.M. Sutjipto Wirjosuparto, guru besar sejarah-kebudayaan yang membahas bahasa-pantang di beberapa kelompok etnis di Indonesia, termasuk didalamnya bahasa Sasahara adalah bahasa laut dalam karyanya berjudul:

Bunga Rampai Sedjarah Budaja Indonesia (1964:104-108)⁴. Penggunaan istilah bahasa laut di samping sebutan *sasahara*, sejauh penelusuran pustaka dan dokumen, terbaca – untuk pertama kalinya – dalam karya Wirjosuparto yang dirujuk di atas. Lebih lanjut ia mencatat:

“... Djika orang Sangi sedang berlajar, di tengah laut mereka mempergunakan bahasa pantang tersebut jang sebagian besar terdiri atas segala hal jang bersangkutan dengan alat perahu, keadaan alam di tengah laut dan binatang laut... (1964:105)

Wirjosuparto sepertinya memperoleh keterangan ini dari karya (disertasi, atau Kitab Udjian Universitas Leiden, 1893, halaman 7, 56 – 63) A. Adriani, ahli bahasa yang mempelajari bahasa-bahasa di pulau Sulawesi, termasuk bahasa Sangihe dan Talaud.

Sebutan ‘bahasa laut’ yang diperkenalkan oleh Wirjosuparto untuk *sasahara* sebenarnya tidak semata harus dipahami sebagai penggunaan kata-kata ‘rahasia’ atau ‘alias’ ketika berada di laut. Orang tua di Nusa Utara masa lalu, juga menggunakan kata-kata seperti ini ketika mereka berada dalam perjalanan ke kebun atau di hutan. Sebagai contoh, mereka tidak akan menyebut ‘anjing’ dengan kata *asu* tetapi *mahebuang* yang artinya hewan yang mengaum. Babi sehari-hari disebut *bawi* mendapat nama *masimbulungang* yang artinya hewan berbulu kasar.

Unsur tradisi bahari yang bertautan dengan peta adalah orientasi. Pemetaan wilayah secara tradisional mengenal dikotomi di atas – di bawah baik dalam arti tinggi – rendahnya letak tempat yang akan di tuju karena kontur tanah; maupun

4 Diterbitkan oleh Penerbit Djambatan, Djakarta.

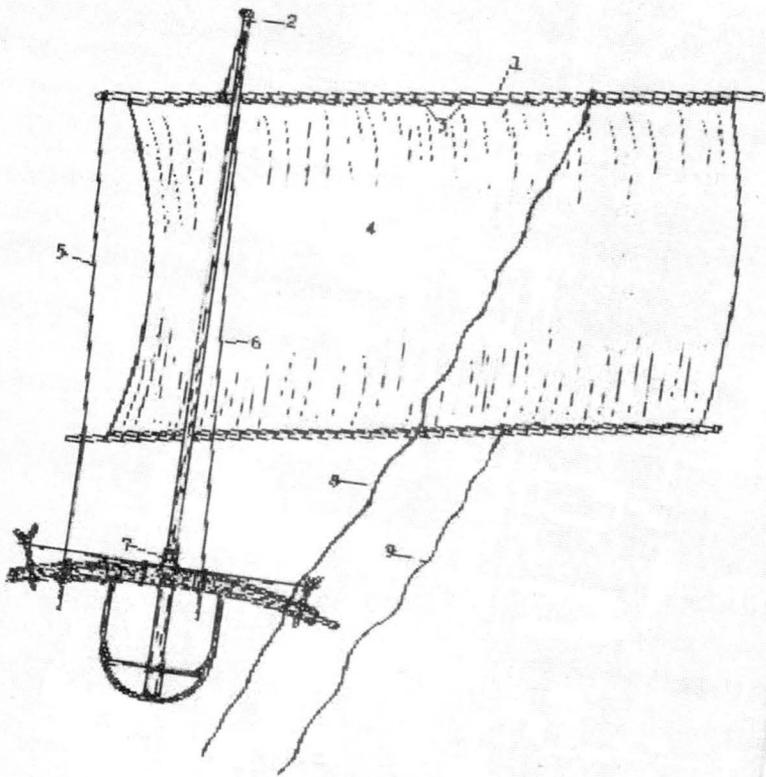
dikhotomi imajiner yang tergantung pada posisi si pembicara. Warga Marore kalau di sapa: “mau ke mana” [*sarang apa*], ia tidak langsung menyebut lokasi tujuan. Dua kata yang sering diucapkan adalah *tana* [ke arah bawah] dan *tara* [ke arah atas]. Contohnya, kalau ke arah pantai, mereka akan menggunakan kata *tana*, ke arah gunung *tara*. Jika tujuannya di luar pulau Marore, akan lain lagi orientasinya dan kata yang digunakan lebih bervariasi. Hal ini memerlukan pembahasan khusus baik dari ilmu kebahasaan maupun kajian budaya.

3.3 Tradisi Bahari: Patah-Tiang, Hilang-Dayung

K.G.F. Steller, seorang pekabar Injil yang diutus ke pulau Sangir Besar pada tahun 1899 dan bekerja di pulau-pulau ini selama 8 tahun kemudian kembali ke negeri Belanda. Ketertarikannya terhadap bahasa dan budaya Nusa Utara bermula dari perkenalannya dengan karya-karya A. Adriani, setelah berada di negeri Belanda, Steller bersama W.E. Aebersold, menyusun *Sangirees-Nederlands Woordenboek* (1959).⁵ Hal menarik dalam buku kamus ini yang berhubungan dengan tradisi bahari, selain nama 18 jenis atau tipe *sakaeng*, juga ungkapan-ungkapan yang berhubungan dengan kegiatan di laut dan rincian dari bagian-bagian perahu yang sempat ia saksikan ketika masih berada di Nusa Utara.

Keterangan Steller tersebut kami gunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman warga Marore – berdasarkan usia atau generasi – tentang perlengkapan perahu dan alat tangkap yang digunakan nelayan.

5 Diterbitkan oleh *het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde* (KITL).



No. 5

viekprauw met zeil

1. sigilaleng
2. palalaleng
3. sanggrilang
4. serigg panggil
5. hawaso
6. hawalung
7. kentajang
8. kalé: wordt achter vastgemaakt
9. holn-waln: wordt merstal in de hand geloude

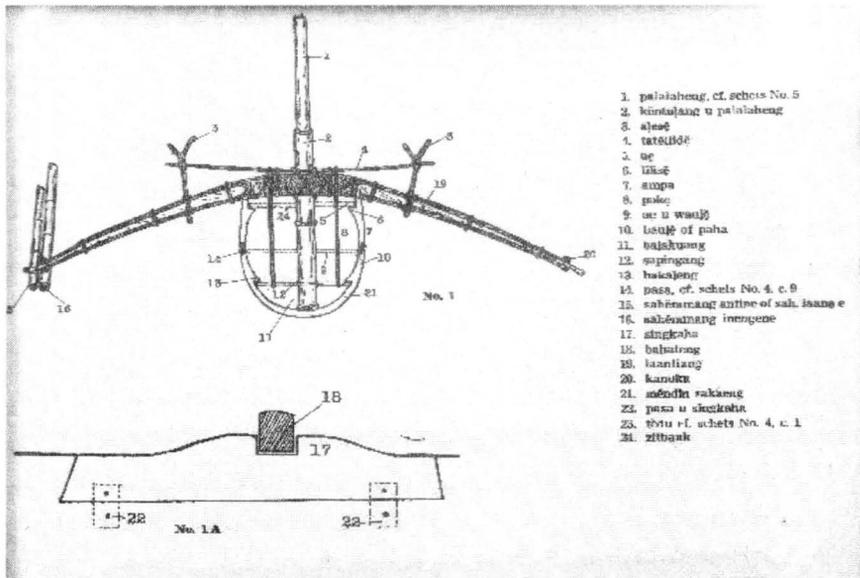
Gambar 3.3 Konstruksi dan nama-nama bagian penampang perahu londe
 Sumber: Steller & Aebersold (1959:600)

Jenis perahu londe ini tidak ditemukan lagi di pulau Marore. Meskipun demikian, masih ada warga – terutama generasi tua – yang dapat menjelaskan nama-nama bagian dari perahu *londe* atau sampan bercadik tradisional tersebut. Contohnya, salah seorang narasumber yang kami temukan dan wawancarai pada tanggal 22 Oktober 2012, pak Barahama (82) di ujung timur desa bersama tetangganya Opo (71). Dari 9 (sembilan) bagian yang dicatat oleh Steller, semuanya dapat dijelaskan oleh pak Barahama meskipun tidak ada lagi perahu jenis londe ini “terparkir” di pantai Marore, selain masih ada dalam ingatannya. Bahkan pak Barahama sempat menambahkan salah satu jenis layar yang disebutnya “layar tongka”, seperti jenis “layar sikuti”. Jenis layar seperti yang ditemukan dalam karya Steller yaitu “*senggo panggili*” menurut pak Barahama, juga digunakan untuk *sakaeng* yang lebih besar seperti *pamo*, *kora-kora*, *pelang*, dan sebagainya. Narasumber kami yang satu ini bahkan menjelaskan bahan-bahan untuk layar yang masih jelas dalam ingatannya, mulai dari kain *koffo*, *tarpal*, bekas kantong terigu dan kain belacu.

Ketika kami tunjukkan gambar penampang londe seperti yang tampak pada gambar 3.7 dengan melipat keterangan yang tersedia dalam bahasa Sangihe, dari 23 item yang ada, pak Barahama mampu mengingat 21 item. Dua bagian yang tidak disebutnya adalah *sahmmang antine* atau cadik kembaran yang digunakan sebagai tambahan untuk cadik utama atau *sahmmang inengene* atau harafiah, cadik induk. Hal kedua yang tidak disebutnya adalah *kanuku* atau bagian ujung kayu tempat mengikat cadik. Sebaliknya, dia memberi penjelasan tentang jenis kayu mana yang biasa digunakan untuk badan perahu, kayu apa yang digunakan untuk rangka cadik, jenis kayu pasak yang digunakan selain bambu, dan sebagainya.

Keterangan pak Barahama tentang jenis kayu yang baik digunakan untuk setiap bagian perahu jenis londe ini di luar dugaan meskipun dia mengaku tidak mampu membuat

perahu, tetapi ia memperoleh pengetahuannya dari paman tua atau *i papa ara*, kakak tertua ayahnya. Jenis kayu yang biasa digunakan oleh orang Marore sebagai bahan perahu adalah kayu *baluhe* dan *dingka*eng. Untuk menebang kayu baik yang mau dijadikan bahan perahu maupun balok rumah, atau menebang bambu untuk *bahateng* (cadik) dan sebagainya mereka harus melihat posisi bulan di langit. Kalau tidak tepat, perahunya cepat lapuk di makan ulat laut.



Gambar 3.4 Konstruksi dan nama-nama bagian penampang perahu londe

Sumber: Steller & Aebersold (1959:600)

"... Jaman dulu – ungkap pak Baraham – kalau mau bikin perahu londe, *i papa ara* harus mengukur panjangnya depa dan panjangnya siku si calon pemilik perahu. Tidak boleh panjang perahu tidak sesuai ukuran 'patah". Maksudnya, kalau dua depa, lebihnya berapa siku. Untuk

mengakali hal ini nanti diperpanjang atau di diperpendek di panjangnya *laembo* atau anak-anak sekarang menyebutnya *tatod*, yaitu bagian ujung yang memanjang baik di bagian haluan maupun buritan. Ujung bagian haluan biasanya lebih panjang dari ujung di buritan.”(wawancara, 22 – 10 – 2012)

Panjang perahu yang tidak sepadan dengan panjang depa dan siku si pemilik acap dianggap sebagai penyebab kecelakaan atau “susah mencari”. Hal yang paling ditakuti nelayan pemilik perahu adalah bagian yang mereka sebut “mata”, yaitu urat kayu bagian dari pangkal dahan. Kalau ada bagian seperti itu, sebaiknya dikeluarkan dan diganti dengan papan untuk menyumbat atau menempel pada bagian yang dikeluarkan. Menurut anggapan para nelayan, ikan tenggiri suka sekali menombak perahu yang ada matanya. Itulah sebabnya, di masa mudanya pak Baraham, untuk memesan perahu, jangandulu dicat supaya garis urat kayu kelihatan jelas. Nanti setelah itu baru dicat. Ada pantangan lain yang harus ditaati kalau mau menebang pohon untuk londe atau untuk dijadikan lunas perahu yang berukuran besar. Pantangan ini berlaku terutama kalau kayu yang mau ditebang berada di lereng gunung atau bukit. Tehnik penebangan diusahakan agar ketika pohon sudah mau rebah, pucuknya tidak boleh terhempas lebih dahulu dari pangkalnya. Kalau pohon yang ditebang rebah meluncur dengan pangkalnya terlebih dahulu, maka itu pertanda baik bagi si calon pemilik perahu. Sebaliknya kalau pucuknya yang lebih dahulu menyentuh tanah adalah pertanda tidak baik. Pilihan waktu untuk menebang pohon didasarkan pada posisi bulan di langit.

“... Biar kata orang, bagus menebang kayu pada saat bulan mati [tidak tampak bulan di langit], tapi bisa diduga posisinya di mana. Apakah berada pada posisi tertinggi ata

di ufuk. Caranya, dengan melihat pasang-surut air laut..”
(wawancara dengan pak Barahama & Opo, 22-10-2012)

Waktu nelayan Marore masih menggunakan *pamo* yaitu jenis perahu berukuran besar dan digunakan untuk mengoperasikan jaring atau *soma'*, si pemilik atau *tonaseng* memesannya dari *tana* \square *abo* [pulau Sangir Besar] terutama di Manganitu, atau juga di pesisir timur. Tetapi sejak pulau Marore ditetapkan menjadi pos lintas batas, perahu jenis *pambut* semakin disukai dan nelayan berusaha untuk mendapatkannya. Mulai dari ukuran *pambut* untuk dua orang sampai yang berukuran besar. Alasannya antara lain adalah ringan, rancang-bangunnya cocok dengan kondisi laut di perairan Nusa Utara dan lincah bergerak di antara ombak.



Gambar 3.5 Generasi tua nelayan Marore yang masih kuat melaut meskipun sudah berusia 70-an dan 80-an tahun

“... umur 20 tahun, Opo (71) *mancari* di Sarangani. Ada *mama hembo* (adik bungsu perempuan) ayah yang dinikahi oleh “orang torang” (maksudnya orang Sangihe) yang tinggal di Sarangani. Kebetulan *papa hembo* dipercaya oleh orang *La Janggias* (maksudnya, orang dari Dadiangas, salah satu pemukiman di pelabuhan tua kota General Santos sekarang) mengelola beberapa pambut. Tahun 1966, saya sudah suka kembali ke Marore bawa satu pambut. Tapi ada saudara katakan, sebaiknya jangan dulu ke Marore karena suasana politik tidak aman. Waktu itu G30S dan orang dengan mudah dituduh sebagai anggota, kalau ada yang iri hati karena kita tahu *mancari*.(wawancara, 22 – 10 – 2012).

Opo kembali ke Marore akhir tahun 1969 dan belum membawa pambut. Padahal dia sudah berpengalaman dan dipercaya pamannya mengelola pambut milik juragannya di kota General Santos. Kepulangannya ke Marore karena berita dari sepupunya, kalau calon istrinya sudah ada pria lain yang mendekati orang tuanya. Desember 1969, orang tua Opo langsung melamar dan bulan Januari 1970 keduanya menikah. Tiga bulan sesudah itu Opo bersama istrinya berangkat ke Sarangani. Tiga tahun lamanya, istrinya menetap dengan *papa* dan *mama hembo*. Kebetulan mereka berdua tidak punya anak sehingga istri Opo menjadi anak kesayangan sang *mama hembo*. Sementara itu, Opo melaut bersama seorang anak dari Glan. Namanya Berto, singkatan dari Roberto. Ia “suku Sangil”. Jadi tidak ada masalah karena bahasanya sama. Mereka berdua *melaude* dan *badaseng* di Matutuang. Di sana umumnya orang Marore dan orang Sangir asal Filipina. Kalau musim cakalang, Opo dan Berto tidak perlu sibuk. Pagi-pagi, atau kadang masih subuh, sudah ada pambut utusan dari penampung memodali kami dengan bahan bakar, box penampungan ikan dengan es batu, dan bekal makanan masak. Sore hari kami ketemu

di tempat yang sudah ditentukan untuk membawa hasil tangkapan. Biasanya dekat Sarangani supaya tidak ada kapal patroli Indonesia yang masuk ke situ. Kalau musim *kemboeng* (ikan hiu) atau *mata belo* dalam bahasa laut, nelayan beralih dari menangkap jenis pelagis dan memusatkan perhatian mereka untuk menangkap ikan hiu.

Dua minggu sekali, Opo dan Berto kembali ke Sarangani. Dengan bekal pas pelintas batas yang waktu itu masa berkunjungnya dibatasi selama 14 hari. Opo mengunjungi istri sekaligus membawa uang hasil penjualan di laut. Tahun 1973, *mama hembo* meninggal dunia. Kata saudara di sana, ia menderita kanker rahim. Penyakit ini dideritanya sudah cukup lama. Khawatir tidak ada saudara perempuan yang tinggal serumah dengan istri dan *papa hembo* yang sudah menduda, Opo bersama istrinya pulang ke Marore.

"... *Papa hembo* membelikan pambut baru untuk saya. Katanya modal hidup di Marore, dan sewaktu-waktu digunakan untuk mengunjungi dia. Opo pulang berdua dengan istrinya menggunakan pambut yang sarat dengan muatan, perabot rumah hasil pembelian istri dan warisan dari *mama hembo*. Pambut satunya yang Opo gunakan bersama Berto, diserahkan ke tangan Berto untuk mengelolanya. Sekalian Berto tinggal sama *papa hembo*." (wawancara dengan Opo, 22 - 10 - 2012).

Tahun 1975, Opo dikagetkan dengan kedatangan Berto dan temannya tiba-tiba tanpa berita lewat nelayan seperti biasanya mereka lakukan. Menurut keterangan Berto, tidak biasanya *papa hembo* melaut sendirian karena dia lebih banyak mengontrol nelayan anak buah juragan mereka daripada melaut. Berto dan Opo punya pikiran yang sama. "*... papa hembo so bapikir pende karena mama hembo kase tinggal...*" [paman sudah nekad karena ditinggal pergi sang istri]. Usaha

pencarian Berto, Opo dan beberapa nelayan sampai ke pulau-pulau Talaud tidak membuahkan hasil.

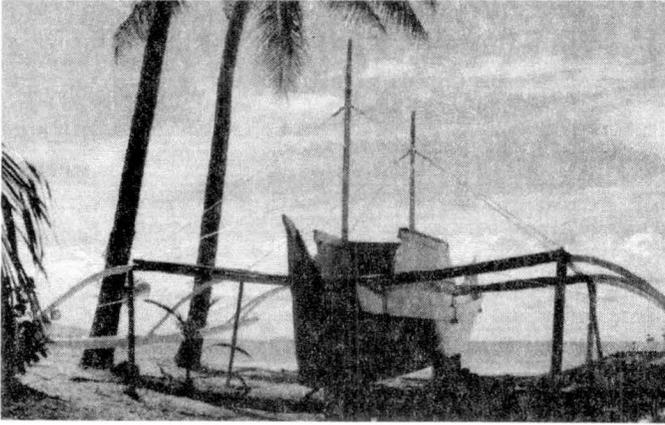
Sewaktu Opo kembali ke Marore dengan pambutnya, menurut dia, sudah banyak orang Marore memiliki pambut, apalagi orang Tinakareng di pulau Manipa. Mereka yang memiliki pambut kemudian menyebar *mancari* ke Talaud. di Talaud mereka *badaseng* di beberapa tempat. Tempat tujuan badaseng di Talaud yang paling tua adalah di wilayah desa Bowombaru. Di sana banyak orang Sangir. Juga dari Bowombaru dengan mudah nelayan *melaude* ke arah Pasifik. Pilihan lainnya adalah pesisir barat pulau Karakelang, terutama di wilayah kecamatan Essang. Ada juga yang memilih menetap di Resduk dekat Beo karena di situ banyak orang Marore yang dipindahkan dari Filipina.

Menurut catatan administrasi di Kantor Kecamatan Kepulauan Marore, terdaftar sebanyak 47 buah pambut yang dimiliki nelayan Marore; 45 buah pambut dimiliki nelayan Kawio; dan 54 buah pambut dimiliki nelayan Matutuang. Dengan demikian, di kecamatan Marore terdapat 146 buah pambut yang dalam kondisi layak layar (Sumber: Administrasi Kecamatan Marore). Jumlah tersebut tidak mencakup sampan dengan prototipe pambut, menggunakan bahan yang sama, hanya bedanya, tidak menggunakan mesin. Semakin banyaknya pemilik pambut dan sampan jenis pambut, minat untuk memiliki sampan tradisional semakin berkurangnya.

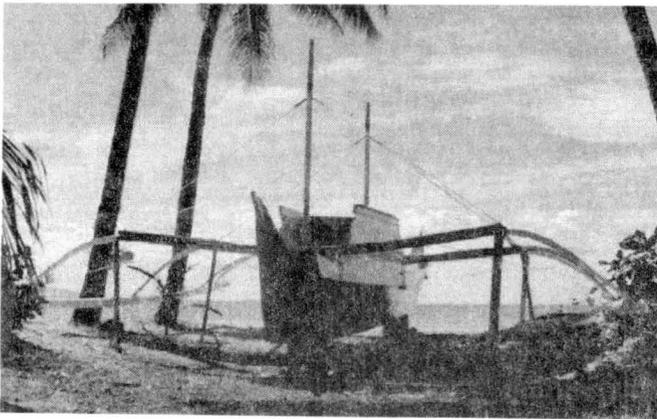
“... Ini bukan soal apa, tetapi lebih mudah mendapatkan bahan untuk bikin *londe* atau sampan model pambut. Bapak lihat saja, kata pak Mahmud (51), salah seorang nelayan dan keluarga muslim satu-satunya penduduk Marore, mana ada pohon yang besarnya melebihi batang pohon kelapa. Kalau mau bikin sampan model pambut, untuk memudahkan pengangkutannya, bahan tripleksnya sudah diiris sesuai ukuran dan boleh muat di pambut.

Bahan seperti itu mudah diperoleh di Balut dan Sarangani.
(wawancara, 22 – 10 – 2012).

Baik Opo (70) maupun Pak Mahmud (51) keduanya masing-masing memiliki pambut yang berukuran lumayan dan masih terlihat baru. Dua gambar berikut adalah dua tipe pambut dengan tipe yang agak berbeda. Gambar 3.9 pambut milik Opo, dan gambar 3.10, pambut milik pak Mahmud.



Gambar 3.6 Pambut milik Opo



Gambar 3.7 Pambut milik pak Mahmud

Berbeda dengan generasi pak Barahama, narasumber yang kami pilih dari generasi usia 30 – 40 tahun, tidak seluas pengetahuan yang dimiliki oleh generasi yang lebih tua, sebaliknya mereka mampu menjelaskan satu per satu bagian dari perahu jenis *pambut*, mulai dari jenis kayu untuk lunasnya, jenis, merek serta kualitas papan tripleks yang digunakan, jenis, merek serta kualitas lem perekat yang tahan getaran mesin dan pukulan ombak serta paku-paku tembaga dan cat yang mau digunakan. Pengetahuan yang tidak dimiliki oleh generasi tua. Singkat kata bahwa ada unsur-unsur budaya atau tradisi bahari (lama) yang hilang, tetapi ada juga pengetahuan yang bertautan dengan tradisi bahari (baru).

Dari 10 warga Marore yang berprofesi sebagai nelayan dengan rentang usia 30 hingga 40 tahun masih memiliki pengetahuan tentang nama musim atau *batiang*, posisi bulan di langit dan menyebutnya satu per satu. Tetapi, 4 warga dari sepuluh orang yang dipilih, mengaku tidak menjadikan pengetahuan itu sebagai penuntun aktivitasnya melaut.

“....kami cukup melihat burung [maksudnya burung camar dan elang] atau mendengar berita dari sesama nelayan bahwa sudah ada rombongan ikan [pelagis] yang masuk ke perairan Marore-Kawio-Matutuang. Orang tua kami penuh perhitungan karena masih berharap pada kekuatan dayung dan layar. Soal arus tidak menjadi masalah. Yang penting, mesin bagus dan ada minyak. Biar semua ada kalau tidak ada minyak, kami tidak bisa apa-apa.”

Pewarisan pengetahuan tradisional seperti *batiang*, nama-nama bulan, bintang dan kemampuan melihat posisi bulan dan bintang di langit umumnya diperoleh dari orang terdekat atau dengan siapa mereka belajar melaut, seperti dari kakek, ayah, atau paman. Pengalaman pak Mahmud melaut bersama kakeknya membuat dia paham soal pengetahuan tradisional

tersebut. Kebiasaan kakeknya setiap senja kalau mereka di Mohong-Sawang (pesisir utara pulau Sangir Besar) atau di pulau-pulau sewaktu *badaseng*, sebelum sembahyang magrib, menatap ke ufuk melihat letak dan posisi bintang maupun bulan serta warna awan. Jika kebetulan pak Mahmud yang kala itu masih remaja, ikut kakeknya, si kakek langsung menjelaskan apa yang dilihatnya dan maknanya apa.

“.... salah satu bintang bintang yang paling dicari kakek adalah bintang *hiabe* di ufuk utara. Kalau musim utara dan bintang *hiabe* kelihatan jelas, itu berarti meskipun ada angin dan hujan rintik-rintik, tetapi angin tidak akan bertiup kencang. Jangan kalau bintangnya tidak kelihatan. Itu pertanda akan ada angin dan hujan” (wawancara pak Mahmud, 22-10-2012).

Soal konstruksi utama pambut dan sampan bercadik, prinsipnya sama, tetapi ada bagian yang beralih fungsi. *Palalaheng* sampan tradisional misalnya, berfungsi sebagai tiang layar; sedangkan fungsinya dipambut adalah pengikat sekaligus penyeimbang cadik. Itulah sebabnya ujung tiang dihubungkan oleh seutas kawat atau tali yang kuat dengan keempat ujung cadik (lihat gambar 3.6 dengan gambar 3.9 dan 3.10). Berbicara soal cadik sampan yang terbuat dari bambu, berdasarkan hasil amatan, ada sejumlah pambut yang menggunakan bahan dari paralon – yang biasanya digunakan sebagai saluran air – menjadi cadik atau *sahemang*, dengan cara menyumbat kedua ujungnya dengan kayu yang direkatkan dengan lem.

Generasi putra kedua narasumber (Opo & Pak Mahmud) terbilang generasi yang tidak lagi mengenal bagian-bagian dari struktur dan penampang perahu *londe*. Berbeda dengan generasi orang tua mereka, kedua anak muda ini tidak tahu dan tidak terbiasa menggunakan layar dan dayung. Meskipun

mewarisi pengetahuan tentang mata angin tetapi mereka tidak lagi melihat angin sebagai 'tenaga' yang sewaktu-waktu dapat membantu mereka menghantar sampai tujuan.

"...untuk hal-hal tertentu, seperti membaca awan penanda angin keras, melihat arah terbangnya camar-laut penanda ikan, mereka sudah tahu. Soal mata angin juga mereka tahu, tapi soal melihat pedoman bintang kalau berlayar malam hari, mereka sudah tidak paham lagi. Apalagi soal dongeng atau cerita-cerita tentang jin laut. Putra saya yang tua, ujar pak Mahmud, setiap berlayar dia bawa kompas, tapi kami tidak punya peta. Tapi itu rasanya tidak perlu karena kalau mau ke Balut, pulaunya kelihatan jelas. Kalau mau ke pulau Karakelang, Marore belum hilang dari pandangan, Karakelang sudah nampak jelas. Kecuali kalau cuaca tidak baik, kami tidak bisa lihat apa-apa. Paling sulit bagi kami kalau mau ke pulau Miangas. Susah mencari pulau kecil itu (wawancara, 22 – 10 – 2012).

Peralihan penggunaan sampan tradisional seperti *londe*, *pelang* serta jenis lainnya yang digerakkan oleh tenaga manusia dan bantuan angin ke pambut yang semata bergantung pada kekuatan mesin dan ketersediaan bahan bakar, di satu sisi telah memotong satu mata rantai yaitu dari pulau Marore menuju tempat (pulau) untuk *badaseng* selanjutnya melakoni aktivitas *melaud*. Di sisi lain, belum sepenuhnya menghapus konsep 'buana' dalam tradisi bahari. Bentangan alam (laut) yang mencakup pulau-pulau di Nusa Utara dan pesisir selatan Mindanao, masih mereka pahami sebagai tempat mereka beraktivitas. Jadi, dunia bahari orang Marore, bukanlah bentangan laut yang tersedia sebagai tempat mereka beraktivitas, tetapi "bentangan pekerjaan" seperti yang dikemukakan oleh Ingold sebagaimana dikutip oleh

John Urry (2012:809). Jika semula, untuk bergerak dari satu sisi ke sisi lain dalam kawasan itu memerlukan waktu dan tempat antara, dengan adanya peralihan sarana transportasi – sampan ke pambut – lebih mempercepat dan mendekatkan sisi-sisi dalam kawasan bahari ini.

Generasi anak-anak kedua narasumber (Opo & pak Mahmud) boleh saja dinilai tidak lagi memahami bagian-bagian dan aktivitas-aktivitas dalam tradisi bahari yang pernah dilakoni oleh generasi ayah mereka. Tetapi dengan kehadiran alat transportasi bermesin seperti pambut, mereka telah menjadi pendukung pengetahuan baru – misalnya tentang mesin – mampu mengutak atik mesin tanpa bekal pelatihan serta ilmu selain menjalani praktek ‘mencoba-gagal-dan mencoba lagi’ atau *trial and error practices* dengan risiko yang kurang lebih sama dengan sekedar mengandalkan dayung serta layar, yaitu ‘hanyut terbawa arus’ ke bukan bentangan laut buana mereka.

Fenomena peralihan dari bentuk transportasi tradisional ke transportasi bermesin, mengingatkan temuan Lopian di kawasan yang sama yaitu kawasan Laut Sulawesi pada abad ke- XIX. Ketika orang-orang laut dan raja-raja laut dikalahkan oleh Adi daya laut, yaitu kekuatan bangsa Eropa yang bermodalkan senjata api dan mesin penggerak kapal laut. Lebih lanjut Lopian menjelaskan bahwa sebenarnya kehadiran Adi Kuasa (bangsa Eropa) di tengah-tengah orang laut, bajak laut dan raja laut di kawasan Laut Sulawesi sudah berlangsung lama. Berbeda dengan bajak laut dan raja laut yang saling berkompetisi memperluas wilayah niaganya, kehadiran kelompok Adi kuasa awalnya juga berkompetisi kemudian menampakkan pola kerjasama dan pembagian wilayah. Lopian merujuk pada Perjanjian Damai Munster yang implikasinya pada pemilahan sebuah ruang-jejaring niaga. Dengan paradigma ini mereka mampu menguasai penguasa-penguasa lama di wilayah itu. Paradigma tersebut

dapat dianalogikan pada kehadiran budaya-benda yang saling melengkapi – atas azas fungsi – dan menggeser budaya-benda lama yang diwarisi turun temurun. Perahu dengan bahan baku kayu lapis dipadu dengan mesin dan berbagai produk menggeser posisi perahu *londe*.



Gambar 3.8 Foto bersama, dari kiri ke kanan, Opo, putranya Opo, Alex, putranya pak Mahmud, Pak Mahmud Dengan latar pambut pak Mahmud (22-10-2012)

Proses penerimaan unsur budaya-benda yang disinggung di atas juga terjadi pada perlengkapan-perengkapan nelayan. Untuk mendapatkan tali pancing, pendukung tradisi bahari di Nusa Utara masa lampau menyamak kulit pohon dipintal menjadi tali kail. Agar awet diberi pewarna sekaligus pengawet yang bahannya juga dari kulit mangrove. Tali pancing tradisional tersebut sejak nelayan mengenal penggunaan tali nilon, atau warga menyebutnya dengan tali plastik, telah ditinggalkan. Begitu pula dengan jaring yang dipintal dari serat pohon Abaka atau *hote*, tidak ditemukan. Satu-satunya alat tangkap tradisional di Nusa Utara yang

masih digunakan hingga kini adalah alat tangkap yang disebut *seke*. Nelayan yang mewarisi alat tangkap *seke* ini menetap di pulau Bebalang, ujung selatan Sangir Besar. Nelayan di pulau Marore, Matutuang, dan Kawio, tidak mempunyai pengalaman mengoperasikan alat tangkap seperti itu. Untuk mengoperasikan alat tangkap seperti *seke* memerlukan banyak tenaga kerja. Sama halnya dengan pengoperasian jaring berbagai jenis dan ukuran besarnya, kecuali jaring jenis *landra* untuk menjaring ikan terbang yang dapat dioperasikan oleh seorang nelayan saja.

3.4 *Messambo*: Yang Kalah Dari Hiruk-Pikuk Suara Pambut Dan derum Katinting

Peralihan atau proses transformasi unsur-unsur budaya-benda pertanda tradisi bahari seperti penggunaan perahu sampan bercadik ke 'kembaran'-nya yang disebut *pambut* atau untuk ukuran yang lebih besar disebut *fuso*, hilangnya perahu pamo, perahu kora-kora, perahu sikuti, atau semua jenis perahu yang digerakkan oleh layar dan dayung ke penggunaan perahu berbahan baku kayu lapis dan kapal motor berkonstruksi serat *fiber* dan besi, diikuti oleh sejumlah unsur budaya nirbenda yang hilang dari ingatan. Berbagai pengetahuan yang mendukung tradisi bahari – seperti yang sudah dikemukakan dalam awal bab ini – dan seni sastra khususnya *messambo* makin hilang di tengah hiruk pikuk dan derum mesin pambut dan katinting. Begitu pula dengan kebiasaan melantunkan lagu-lagu daerah dan lagu rohani ketika berperahu, sebagai pengiring dan penyemangat para pendayung tidak terdengar lagi. Yang ada derum mesin motor tempel atau *outboard* yang mendorong beban perahu melaju.

Sudah menjadi kebiasaan nelayan Nusa Utara, terutama ketika mereka di melaut malam hari, sambil mendayung sampan mereka mendengarkan *sasambo*. Ada beragam versi *sasambo*, dan yang paling banyak dilagukan oleh nelayan

adalah *sasambo raralo* dan *sasambo kakaꞑiomaneng* atau lirik puji-pujian dan permohonan doa kepada Yang Maha Kuasa, Pemberi Kehidupan. Salah satu lirik *sasambo raralo* yang biasanya dinyanyikan oleh nelayan ketika sudah memasuki tempat di mana biasa ia mendaratkan sampannya adalah sebagai berikut:

<i>Tarimakase namuna</i>	[terima kasih kami telah ditibakan]
<i>Saꞑamate namaꞑango</i>	[puji syukur hingga dapat membuang sauh]
<i>Tarimakase nituꞑung</i>	[terima kasih karena pertolongan]
<i>Saꞑamate nitaꞑentu</i>	[puji syukur karena kasih sayang]

Lirik lain dari *sasambo raralo* yang dilagukan oleh narasumber kami sebagai berikut: “*dimalong apeng tinꞑntang, lingung lua ꞑimairo*”.

Contoh lain dari lirik *sasambo*:

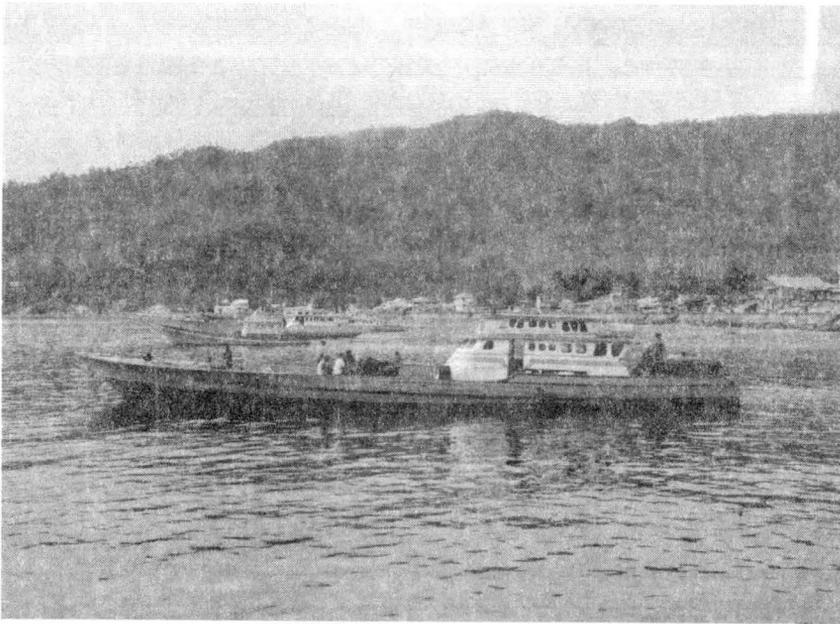
Nalang u saꞑenseh' u alang
Saꞑiaheng binalangeng
Kalu daꞑogaeng
*Daꞑogaeng ganturu*⁶

Jangankan mendengar *sasambo* yang dilantunkan oleh nelayan maupun kebiasaan mereka menyanyi ketika berlayar. Untuk bercakap-cakap dalam pelayaran pun agak sulit karena bisingnya bunyi mesin.

Opo, pak Mahmud dan pak Barahama – generasi tua

6 Narasumber kami menemui kesulitan untuk menerjemahkannya dengan baik

di Marore – bahkan sudah tidak bisa melantunkan *sasambo*. Yang kami bisa lakukan hanyalah mendendangkan lagu-lagu rohani, ungkap Opo dan pak Barahama. Lain lagi dengan pak Mahmud. Kalau melafalkan ayat-ayat Al quran berupa doa permohonan, dia sanggup melakukannya. Kakek nenek saya adalah penganut ajaran Islam Tua di Mohong Sawang. Waktu pemerintah menjadikannya aliran kepercayaan pada tahun 1970-an, mereka sekeluarga memilih untuk meninggalkan kampung halamannya.



Gambar 3.9 Kapal motor berbagai ukuran di pelabuhan Petta yang beroperasi ke pulau-pulau kecil di bagian utara

BAB IV

DARI TRADISI *BADASENG* KE DIASPORA MARORE

Aktivitas *badaseng* sekilas seperti mengembara mencari nafkah dengan menetap sementara terutama di pulau-pulau kecil dan sepanjang pesisir pulau-pulau besar. Ada kesan menyamakan pelaku *badaseng* dengan perilaku nomaden. Karena, dengan melihat sesaat, mereka akan tampak sebagai orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, berkelana dari satu tempat ke tempat lain, pada musim-musim tertentu sesuai dengan keperluan mereka¹. Memang, kelihatan di permukaan dan sesaat, pelaku aktivitas *badaseng* seperti nomadis. Namun, setelah mengikuti dan menelusuri jejak kembara dan perilakunya dalam rentang waktu yang lama, jawabannya adalah mereka bukan pelaku nomaden. Pertama, ada hubungan permanen yang tercipta antara berbagai tempat yang mereka kunjungi dan tempati. Kedua, ada alasan-alasan baik yang diwarisi turun-temurun maupun yang didasarkan pada pengalaman pribadi untuk selalu menghubungkan tempat-tempat yang mereka kunjungi dan tempati. Ketiga,

1 Lihat lema nomad dalam KBBI, 1989:616.

ada cara pandang yang melihat tempat-tempat tadi bukan sebagai 'tanah seberang' yang asing tetapi merupakan bagian dari buananya. Ketiga alasan di atas menggiring orientasi pemahaman atas realita pelaku *badaseng* pada realita 'sedentarisme' dan bukan 'nomadisme' (John Urry, 2012:807-811). Pendukung budaya bahari – seperti sudah disinggung dalam sub-bab 3.2 di atas – melihat pulau-pulau dan laut yang mengantarainya adalah tempat tinggal di mana mereka menetap dan bergerak tanpa-batas.

4.1 *Badaseng* dalam aktivitas kehidupan sehari-hari

Harafiah, kata *daseng* pertama diartikan sebagai pondok tempat tinggal sementara baik itu di kebun maupun di pesisir pantai ketika menjalani aktivitas yang jauh dari rumah tinggal. Dari kata *daseng* menjadi *p̄dasengang*, untuk buana atau dunia ini². Tidak ditemukannya lema dalam bahasa daerah untuk dunia, selain kata *dunia*, *bowon dunia* secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa

Pengibaratan yang dikemukakan oleh salah seorang narasumber kami (pak Barahama, 82) tentang alam yang sederhanakan ke dalam gagasan tentang 'rumah', dengan pembagian berikut: kampung halaman adalah kamar tidur. Laut lepas adalah pekarangan tempat beraktivitas. Lokasi-lokasi *badaseng* adalah dapur. Aktivitas *badaseng* atau tepatnya *m̄daseng* bertalian erat dengan aktivitas *m̄laude* atau melaut. Dengan pengibaratan ini, manusia pendukung tradisi bahari di mana *badaseng* menjadi salah satu aktivitas yang dijalani, berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam artian geo-administrasi, sebenarnya hanya berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain. Ia akan dianggap pindah rumah apabila melakukan pelayaran yang menyimpang dari jaringan

2 Lihat lema *daseng* dalam Steller dan Aebersold, 1959:90.

imajiner yang dilakoni turun temurun. Sebagai contoh, ketika seorang nelayan *melaud* ke arah timur dari pulau Marore dan melewati pulau-pulau Talaud, dan terbawa arus hanyut sampai ke pulau Morotai; itu berarti dia 'terlempar' jauh dari rumahnya. Lain lagi halnya dengan mereka yang *melaude* hingga Halmahera dan *badaseng* di sana. Lalu, apa saja batas-batas antara aktivitas *badaseng* dan merantau?

Seseorang dikatakan mau *badaseng* kalau tempat yang dituju sudah jelas menjadi tempat tujuan *badaseng* dari orang tua dan nenek moyang mereka. Ada ikatan yang jelas antara nelayan yang datang dengan warga di tempat yang baru yang sudah diketahui turun-temurun. Sudah menjadi kewajiban bagi nelayan yang datang *badaseng* di satu tempat – yang baru untuk dia, tetapi ayahnya atau kakeknya pernah *badaseng* di tempat itu – ialah memperkenalkan diri. Maka pengetahuan tentang silsilah menjadi bekal utama atau semacam asuransi. Karena ayahnya atau kakeknya atau kakek buyut yang pernah *badaseng* di tempat yang dituju tidak hanya memperkenalkan diri, tetapi juga mengisahkan adanya pertautan silsilah antara mereka dengan salah satu keluarga di tempat tujuan ini. Tanpa ada pertautan keluarga, tidaklah mudah untuk diterima apalagi diberi izin mendirikan pondok sementara di pesisir pantai yang dituju. Sikap seperti itu sangat umum. Brilman, dalam karyanya *Onze zendingsvelden* (1938) membahas soal ikatan kekeluargaan dengan membandingkan keadaan serupa di dunia barat atau Belanda, negeri asalnya. Bagi orang Eropa sama sekali sudah tidak merasa ada hubungan keluarga, sebaliknya bagi warga Nusa Utara, itu masih terbilang 'keluarga dekat'. Secara lengkap kesaksian Brilman dapat dibaca dalam kutipan berikut:

"... De bewoners der verschillende eilanden zijn dan ook veelal door familieverband met elkaar verbonden, waarbij dan echter wel in het oog gehouden moet worden, dat zij nog spreken

van 'naaste familie' voor gevallen, waar Europeanen gewend zijn iedere familiebetrekking reeds lang te zijn vergeten". (1938:22)

[penduduk berbagai pulau terikat dalam hubungan kekeluargaan, tetapi dalam hal mana mereka memperhatikannya dan menyatakan bahwa itu masih 'keluarga dekat', hal yang bagi orang Eropa sudah bukan lagi keluarga atau tidak memiliki hubungan keluarga]

Brilman juga memperhatikan kemampuan orang-orang tua yang menuturkan silsilah atau dalam istilah setempat slahbom, dari kata Belanda *slagchtboom* harafiah 'pohon keturunan' dari beberapa generasi di atasnya dan memiliki ingatan yang mampu mempertautkan hubungan seseorang dengan orang lain atau keluarga lain. Kehidupan sebagai keluarga – dalam amatan Brilman – mengambil tempat yang sangat penting dalam kehidupan penduduk dan setiap warga. Jika mereka atau seseorang dapat membuktikan ikatan kekeluargaannya lewat silsilah, pasti akan diterima dengan baik oleh 'keluarganya' meskipun sebelumnya mereka belum bersua atau ketemu.

Kisah pak Mahmud merupakan contoh yang menguatkan hal ini. Berasal dari Mohong Sawang atau Tabukan Utara, sekaligus seorang muslim, ia bisa diterima di Marore yang umumnya beragama Kristen, karena memiliki ikatan kekeluargaan lewat garis ibunya dengan pak Barahama dan Opo. Mereka pun hidup bertetangga hingga kini dan tidak ada yang mempermasalahkan perbedaan agama.

Seperti telah disinggung sepintas di atas, aktivitas *badaseng* hanya berhubungan dengan mata pencaharian di laut atau melaut sebagai nelayan dan pekerjaan yang berhubungan dengan laut yaitu memproses atau memasak garam. Pada masa Hindia Belanda, pembuatan garam merupakan pekerjaan yang menjanjikan dibandingkan dengan berkebun dalam

sistem perekonomian *subsisten*. Untuk aktivitas *melaude*, tujuan *badaseng* adalah mendekati diri dengan lokasi penangkapan ikan-ikan hiu, tuna, cakalang dan tenggiri, dan bukan untuk menangkap ikan demersal. Jika seorang nelayan *badaseng* dan sudah diterima dengan baik oleh warga di sekitarnya karena mampu membuktikan hubungan kekeluargaan, ia dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan bahkan mendapat bantuan dari warga dengan siapa ia membuktikan bahwa mereka memiliki hubungan kekeluargaan.

Pada masa sebelum kemerdekaan, pelaku aktivitas *badaseng* datang bersama keluarganya untuk menetap selama sebulan hingga lima atau enam bulan, tergantung pada musim angin apa yang bertiup. Pada musim angin selatan, lokasi-lokasi *badaseng* yang dipilih adalah pada sisi utara pulau karena pantainya tenang dan tidak berombak. Begitu sebaliknya, kalau musim utara, maka sisi selatan dari pulau tujuanlah yang dipilih sebagai tempat *badaseng*. Ketersediaan air menjadi syarat utama sewaktu menentukan lokasi *badaseng*. Hal itu hanya berlaku bagi mereka yang baru kali pertama memilih tempat tujuan. Pada umumnya, lokasi *badaseng* diwarisi turun-temurun.

Pondok atau *daseng* atau lebih tepat *shelter*, merupakan bangunan darurat dan sangat sederhana. Atapnya menggunakan anyaman daun kelapa. Begitu pula dengan salah satu sisi dindingnya. Untuk tempat tidur, dibuat para-para yang menggunakan tiang setinggi setengah meter dan kayu bulat sebagai tempat merebahkan diri. Pada malam hari, sisi pondok atau gubuk yang tak berdinding diberi pelindung dengan menggunakan layar perahu. Perlengkapan masak pun seadanya.

Di beberapa tempat, lokasi *badaseng* telah berubah menjadi pemukiman dengan rumah semi-permanen. Tempat-tempat *badaseng* warga Marore yang sudah menjadi pemukiman, contohnya di pantai Lawasan Pulau Salibabu. Pemerintah

Kabupaten Kepulauan Talaud sejak tahun 2007 telah menetapkan lokasi ini sebagai sentra perikanan dan sudah membangun sebuah *coldstorage* mini. Selain warga Marore, nelayan-nelayan asal pulau Sangir Besar yang berada di lokasi ini umumnya dari Tabukan Utara.

4.2 Tana abo (pulau besar): Balut dan Sarangani di Utara, Minahasa di Selatan

Pada awal abad ke- 19, di pulau Sangir Besar terdapat empat kerajaan yaitu Kerajaan Manganitu dengan wilayahnya berada pada bagian selatan pulau, Kerajaan Tahuna dengan wilayahnya berada di teluk Tahuna, Kerajaan Kendahe (Kandahar) dengan wilayahnya pesisir barat bagian utara pulau, dan Kerajaan Tabukan dengan wilayahnya berada di bagian timur pulau. Wilayah kerajaan-kerajaan ini mencakup pulau-pulau kecil di sekitarnya. Ketika kekuasaan Hindia Belanda menempatkan pejabat pemerintah setingkat *Controleur* di samping pemerintahan para raja di Nusa Utara, salah satu dokumen penataan wilayah berisikan keterangan tentang wilayah pulau-pulau kecil di bagian utara pulau Sangir Besar ke dalam dua wilayah kerajaan, yaitu kerajaan Kendahe atau Kandahar meliputi daratan barat/utara pulau dan empat pulau kecil yaitu Lipaeng, Kawaluso, Kawio dan Kemboleng. Pada sisi timur, wilayah kerajaan Tabukan meliputi pulau-pulau Beeng Dolong (sekarang Beeng Darat), Beeng Laud, Manipa, Bukide, Poa, Liang, Lenggise, Bo ontohe, Mekohahe, Buang, Salehe, Dumarehe, Matutuang, Marie, dan Marore. Pemilahan pulau-pulau kecil yang berada di utara pulau Sangir Besar ini didasarkan pada peta wilayah *badaseng*.



Gambar 4.1 Pulau Kawio, Kembojeng (kiri) dan pulau-pulau Nusa (Manipa, Bukide)

Di bagian utara, pada periode yang sama yaitu awal abad ke- 19, terdapat dua kedatuan (kerajaan), yaitu Mangindano dan Buayan. Kedatuan Mangindano menganggap kerajaan Kendahe sebagai bagian dari wilayahnya, dan kedatuan Buayan menganggap kerajaan Tabukan adalah bagian dari wilayahnya. Kisah-kisah kesejarahan serta silsilah keluarga yang berhubungan dengan kerajaan Tabukan menyebut tokoh Gumansa anggi berasal dari daratan Mindanao berlayar ke selatan dan menetap kemudian oleh warga setempat didaulat menjadi pendiri kerajaan Tabukan. Hal serupa dapat ditemukan dalam kisah-kisah kesejarahan serta daftar silsilah keluarga di Kendahe dan Mangindano (Hayase, dkk., 1999; Lopian, 2009:180-182). Lepas dari persoalan saling mengklaim di atas yang berlanjut pula pada usaha VOC dan Kesultanan Ternate yang menganggap kerajaan Kendahe dan kerajaan Tabukan sebagai vassalnya, juga turut menyatakan hak mereka (VOC dan kesultanan Ternate) atas wilayah kedatuan atau kesultanan Mangindano dan kedatuan atau kesultanan Buayan. Hal yang menarik adalah sebagian dari warga kedua kedatuan tersebut adalah kelompok komunitas etnis Sangil, yang bertutur-kata dalam bahasa yang sama dengan kelompok komunitas etnis Sangihe. Kenyataan tersebut menyebabkan Lopian mengajukan pertanyaan: "... apakah penduduk

Mindanao yang berbahasa Sangil merupakan diaspora dari sukubangsa Sangir di Nusa Utara?" (Lapian, 2003:vi)³. Jawaban pertanyaan tersebut sepertinya sudah terjawab oleh hasil kajian kebahasaan yang dilakukan oleh Alice Maryott, "*The nuclear prediction in Sangir*", (1963)⁴ dan Kenneth R. Maryott dalam sejumlah karyanya, antara lain "*the Phonology and morphology of Tabukang Sangir*", (1961)⁵; "*the Substantive phrases of Sangir*", (1963)⁶; "*the Phonemics of Sarangani Sangir*"⁷, (1977); dan "*Sangiré*", (1978)⁸. Jawaban lain dapat dibaca dalam hasil kajian Hayase, *Mindanao Ethnohistory Beyond Nations: Maguindanao, Sangir, and Bagobo Societies in East Maritime Southeast Asia* (2004); bahwa tiga komunitas etnis (Maguindanao, Sangir, dan Bagobo) menyebar melampaui batas-batas wilayah "bangsa". Lebih khusus Hayase mencatat:

"... For the Sangirs, who became neither 'Lords of the Sea' nor free moving seafarers, the primary concern became the ability to obtain food nearby. Therefore, they had their own 'territory' that served as their sphere of livelihood. However, since they had hardly any sense of belongingness, they created a diaspora phenomenon" (2004:195).

Di kalangan ethnohistorian, sejarawan, linguist, dan antropolog yang menaruh perhatian terhadap Mindanao dan Sangihe Talaud, Shinzo Hayase patut dicatat sebagai yang terdepan dalam hal kerja lapangan. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun selama tahun 1980-an hingga awal

3 Lapian, dalam Kata Pengantar buku Nusa Utara: Dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan, oleh Alex J. Ulaen, 2003, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

4 Lihat *The Philippines Journal of Science*, Vol. 92, No. 1, halaman 111 – 120, 1963.

5 Lihat *Philippine Social Sciences and Humanities Review*, Manila, Vol. 26, halaman 111 – 126.

6 Lihat *Papers on Philippines Language*, Manila, Vol. 1, halaman 50 – 62.

7 Lihat *Studies in Philippines Linguistic*, Vol. 1, No. 1, halaman 93 – 132.

8 Lihat *Studies in Philippines Linguistic*, Vol. 2, No. 2, halaman 145 – 151.

2000-an berkeliling daratan Mindanao dan kepulauan Nusa Utara hingga Maluku Utara dan daratan Minahasa, dan sudah menerbitkan sejumlah karya tentang kawasan ini sejak ia mempertahankan disertasinya tentang Mindanao di Murdoch University, Australia, 1984.

Di kalangan pelaku tradisi *badaseng* dan tradisi bahari umumnya, selain ada pemilahan lingkungan laut atas *saghe* dan *laud*, juga berlaku anggapan adanya *tana* *abo* atau 'tanah (pulau) besar' dengan *wanua kadod*. Tanah besar darimana nenek moyang mereka berasal menjadi 'tanah harapan' untuk mendapatkan suplai bahan makanan ketika mereka *badaseng* di pulau-pulau kecil yang mengantarai *tana* *abo* dengan 'laut lepas' tempat mereka *melaud* atau mencari ikan-ikan seperti tenggiri, tuna, dan hiu. Jadi, pulau Sangir Besar diapit oleh dua 'tanah besar' yakni daratan Minahasa di bagian selatan dan Balut Sarangani di bagian utara.

Di bagian selatan, yaitu Minahasa, dahulu menjadi tempat *badaseng* khususnya untuk memasak garam. Tempat-tempat itu tidak hanya tersebar di pesisir wilayah kabupaten Minahasa Utara, sekarang, yakni dari tanjung Pulisan hingga tanjung Torawitan, tanjung Pisok, teluk Manado, Kalasey, Tanawangko, tanjung Kalapa sampai Wawontulap, teluk Amurang, sampai perbatasan kabupaten Minahasa Selatan dengan wilayah Kabupaten Bolaang-Mongondow. Di sepanjang pesisir tersebut di atas dapat ditemukan kantong-kantong pemukiman warga Nusa Utara, baik keturunan dari mereka yang melakoni aktivitas *badaseng*, maupun warga yang datang kemudian dan bergabung dengan mereka. Tempat tersebut tentu terlalu jauh dicapai oleh warga Marore, kecuali mereka yang datang bukan sebagai nelayan tetapi menjual jasa sebagai pemanjat pohon kelapa sekaligus pembuat kopra, pelayan di toko, tukang kayu dan buruh bangunan. Selain itu, tentunya adalah anak muda yang mau melanjutkan pendidikan mereka di tingkat Sekolah Menengah Atas dan

Perguruan Tinggi.

Orientasi utama warga Marore adalah pulau Balut, pulau Sarangani, dan daratan Mindanao, terutama di pesisir wilayah propinsi Davao del Sur, propinsi Alabel, propinsi Sarangani, dan di kota General Santos, terutama di Dadiangas. Dr. Domingo M. Non, seorang antropolog dan sejarawan, guru besar di Mindanao State University, General Santos, dalam komunikasi lisan menuturkan bahwa orang Filipina membedakan warga Nusa Utara di Balut, Sarangani dan Mindanao atas, 'orang Sangir', 'orang Marore', 'orang Miangas', dan 'orang Indonesia'. Keterangan ini dapat dipahami sebagai penanda bahwa keberadaan warga Marore di wilayah Filipina Selatan cukup signifikan sehingga boleh dibedakan dari sesama kelompok komunitas etnisnya yaitu Sangihe⁹. Di wilayah propinsi Sarangani dan kota General Santos, warga Marore umumnya bekerja sebagai buruh di sektor perikanan. Baik yang bekerja sebagai nelayan di armada penangkap ikan, maupun pekerja atau buruh di pabrik-pabrik perikanan di kota General Santos. Penelitian yang dia lakukan membuat dia mengenal dengan baik beberapa warga yang dianggap sebagai tokoh warga Marore. Kecuali yang menetap di pulau Balut dan pulau Sarangani, Non, tidak mengetahuinya dengan pasti karena daerah itu diluar perhatian kajiannya.

Keterangan yang diperoleh dari warga Marore yang pernah menetap di pulau Balut dan Sarangani seperti Opo (71), warga Marore di Sarangani cukup banyak yang hidup dari hasil kebun. Ada lahan yang sudah mereka miliki, terutama warga yang sudah kawin mawin dengan warga

⁹ Komunikasi pribadi sewaktu kami bertiga (Shinzo Hayase, Domingo, dan Saya melakukan penelitian bersama selama kurang lebih enam bulan melakukan perjalanan di Maluku Utara, Sangihe, Talaud, dan Mindanao bagian Selatan. Selama di Mindanao, perjalanan dilakukan di wilayah propinsi Sarangani, Alabel, Davao del Sur, hingga Cotabato (1996).

setempat atau warga komunitas etnis setempat, tetapi cukup banyak juga yang 'menumpang' di lahan perkebunan maupun pekarangan warga Filipina yang menetap di kedua pulau tersebut. Meskipun mereka statusnya hanya 'menumpang' atau meminjam lahan perkebunan orang, mereka merasa masih lebih baik berusaha dan menetap di pulau Sarangani dan Balut dibandingkan dengan di pulau Marore. Menetap di Marore tanpa modal seperti pambut, berarti hanya menjadi beban bagi keluarga di sana.

Alasan lain yang membuat mereka masih betah menetap di sana adalah soal pola hidup dan murahnya harga bahan makanan dibandingkan dengan di Marore. Warga Marore sendiri baru merasa terpenuhi kebutuhannya ketika ada bantuan beras raskin dari pemerintah pusat.

4.3 Diaspora dan Ruang-Jejaring Marore

Semula, istilah diaspora hanya digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan bangsa Yahudi di berbagai tempat di dunia, "diaspora Yahudi". Dengan kata diaspora dimaksud "*... leaving the homeland forever*" [meninggalkan kampung halaman untuk selamanya] dan "*...it accompanied the feeling of loss, losing one's native idioms, families ties*" [disertai dengan perasaan kehilangan, melupakan bahasa dan ungkapan-ungkapan lokal, serta hubungan kekeluargaan] (Matori Yamamoto, 1997:65).

Pemahaman di atas menurut Yamamoto sudah tidak berlaku lagi dewasa ini. Mendasarkannya pada kasus warga Samoa di beberapa tempat terutama di Australia dan Selandia Baru, dengan adanya jaringan transportasi yang semakin membaik, kebiasaan meninggalkan tempat untuk selamanya dapat saja dianggap sebagai suatu kenyataan. Warga Marore yang dulu bermukim di wilayah selatan Filipina, ketika mereka ikut salah satu program pemerintah yang tertuang dalam Perjanjian Lintas Batas, yaitu memilih dikembalikan ke

Indonesia, ada yang menetap di beberapa lokasi di Halmahera bagian utara. Sebagian ditempatkan di Resduk (Resetlemen Penduduk) di kampung Banti Lama, kecamatan Beo. Warga Marore ini tidak memilih untuk kembali ke Marore tetapi tradisi pulang kampung dengan tujuan utama berziarah ke makam leluhur dan orang tua sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga yang masih menetap di Marore, menjadi semacam agenda utama dalam kehidupan. Kasus seperti ini pula yang menjadi salah satu butir dalam perjanjian lintas batas, yakni mengunjungi kubur atau makam keluarga. Pelayaran dengan menggunakan pambut antara pulau Karakelang dengan pulau Marore atau antara pulau Halmahera dengan Marore bukanlah hambatan berarti bagi pendukung tradisi bahari. Sehingga, batasan diaspora (awal) dengan belajar pada kasus Samoa dan Marore, mengalami redefinisi. Fenomena diaspora Marore dapat dipahami sebagai proses mobilitas warga Marore ke tempat-tempat lainnya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di wilayah Republik Filipina. Di tempatnya yang baru, mereka tidak mengalami rasa kehilangan selama mereka masih melakukan aktivitas sebagai pendukung tradisi bahari. Menjadi nelayan yang mengoperasikan peralatan tangkap tradisional menggunakan pambut dan fuso. Mereka tidak mengalami keterputusan hubungan kekeluargaan. Beberapa kasus individual berikut menjadi penanda fenomena tersebut.

Kasus 1 : (Naung P¹⁰, 46 tahun,
status Warga negara Indonesia - di Filipina
(Undocumented Citizen) menetap di Mabila,
Sarangani,

10 Nama yang digunakan adalah nama keluarga. Banyaknya nama keluarga yang sama menjadi pertimbangan untuk tidak menyamakan nama tersebut yang memang dikutip dari buku register pelintas batas.

orang tua asal Marore, lahir di Mabila dari ibu warga Filipina),

pekerjaan: nelayan, operator pambut pada perusahaan perikanan,

Tercatat pada buku register (masuk) petugas arus pelintas batas, masuk ke Marore tanggal 15 Februari, sendirian menggunakan pambut bernama Syalom.

Tujuan: kunjungan keluarga.

Keterangan lain: pernah berkunjung ke Marore tercatat pada buku register (masuk) pelintas batas tahun 2007, dengan alasan yang sama.

Hubungan keluarga yang dikunjungi: Sepupu.

Kasus 2 : (Makausang, 59 tahun)

Status warganegara Indonesia di Filipina (undocumented citizen) tinggal di Balut, pekerjaan nelayan lepas

tercatat pada register (masuk) petugas pelintas batas di kecamatan, tanggal 20 Juli 2012 dengan pambut bernama Jun Jun (berdua dengan Mamuno, 57)

Tujuan: mengunjungi ibu di Marore

Keterangan lain: pernah berkunjung pada akhir tahun 2008, tujuan sama; pada bulan agustus 2006, tujuan sama

Kasus 3 : (Mamuno, 57)

Status warga negara Indonesia tinggal di Filipina, alamat Balut,

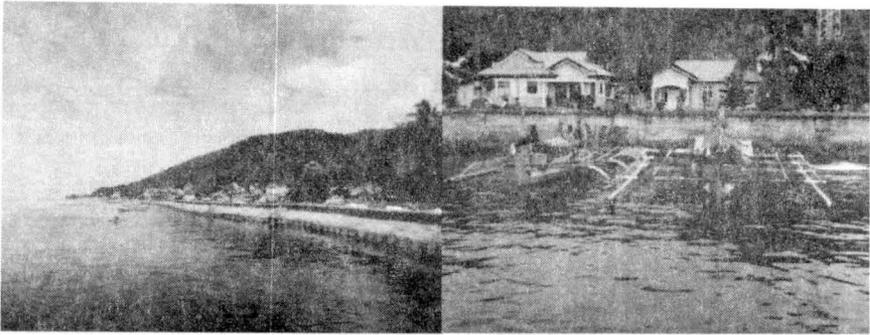
Kawin dengan perempuan suku Sangil (warga Filipina),

Pekerjaan: buruh tani (memiliki lahan)/nelayan
Orang tua sudah kembali ke Marore, menghabiskan masa tua dengan anak perempuan (adik Mamuno)

yang sudah berumah tangga,
Tercatat masuk Marore tanggal 20 Juli 2012 dengan
pambut Jun Jun berdua dengan Makausing (kasus
2)
Keterangan lain: pernah berkunjung pada bulan
Maret 2006.

Ketiga kasus di atas dapat ditambah dengan puluhan nama warga Marore, Matutuang, Tinakareng yang terekam dalam buku register; menunjukkan bahwa jaringan kekeluargaan menjadi tali pengikat. Warga yang masih berkunjung seperti ketiga kasus di atas nantinya akan menjadi penjamin bagi warga Marore yang mau mencari pekerjaan di Balut maupun di Sarangani. Kunjungan yang intensif serta terciptanya hubungan-hubungan berjejaring, akan lebih mendekatkan mereka baik dengan kampung halamannya, keluarganya, dan tidak ketinggalan bahkan menjadi alasan utama adalah pusara kakek nenek dan orang tua. Kedekatan antar warga Marore menjadi sebagai modal utama dalam diaspora Marore.

Amatan lain atas warga Marore di Resduk, Beo (Talaud) menunjukkan bahwa keberadaan mereka di sana dengan mudah dapat dibedakan dari penduduk setempat melalui aksan dialektanya meskipun mereka sudah menggunakan bahasa Talaud dan berdasarkan pekerjaan mereka, yakni nelayan. Di Resduk, mereka memperoleh lahan garapan, tapi bertani bukanlah pilihan utama. Mereka tetap menggarap lahan pertanian dengan cara menggunakan tenaga kerja lokal sesama warga Resduk, dan profesi sebagai nelayan tetap mereka lakukan.



Gambar 4.2 Lokasi berlabuhnya kapal motor ke Marore di belakang pasar Towo'e
Dan tempat sandar pambut Marore di kampung Tidore (dekat dermaga Tahuna)

Dua dari gambar di atas menunjukkan keberadaan diaspora dan jejaring Marore. Untuk melacak keberadaan warga Marore baik di kota Tahuna, kota Petta di Tabukan Utara maupun di pelabuhan Beo (Resduk) maupun di pasar Towo'e dan di rumah sekitarnya yang menyediakan barang-barang selundupan terutama minuman beralkohol, tidaklah terlalu sulit dikenali.

BAB V

MARORE-MATUTUANG: ANTARA TINAKARENG – BATUGANDING

Marore dan Matutuang adalah dua pulau paling utara yang dihuni oleh warga, selain pulau Kawio yang berdekatan dengannya. Ketiga pulau ini sekarang merupakan satu wilayah administrasi setingkat kecamatan yakni Kecamatan Kepulauan Marore. Pulau Matutuang, hingga paroh kedua abad ke- 20 belum diakui secara resmi sebagai pulau yang berpenduduk. Pulau ini merupakan tempat *badaseng* dari warga Marore. Itulah sebabnya, secara administratif hingga menjelang tahun 2000-an, Matutuang merupakan bagian dari desa Marore.

Sama halnya dengan Matutuang, pulau Marore sebelum kemerdekaan adalah tempat *badaseng* dari warga pulau Sangihe besar – terutama warga yang menetap di pesisir utaranya

5.1 Satuan Sosio-kultural yang terpilah-dua

Shinzo Hayase dalam karyanya, "*Mindanao Ethnohistory Beyond Nations, Maguindanao, Sangir, and Bagobo Societies in East Maritime Southeast Asia*" (2007) selain memaparkan wilayah dan gerak mobilitas tiga kelompok komunitas etnis

– Maguindanao (Mangindanao), Sangir, dan Bagobo – yang melampaui wilayah dua negara (bangsa) yaitu Indonesia dan Filipina, juga menerangkan adanya pertalian hubungan kekerabatan yang terjalin antara warga ketiga kelompok komunitas tersebut. Khususnya kelompok komunitas etnis Sangir dalam buku tersebut dimaksud adalah penduduk kepulauan Nusa Utara, dan bukan kelompok etnis Sangil yang diakui sebagai salah satu dari kelompok-kelompok etnis penduduk Mindanao sebagaimana tercatat baik dalam dokumen sensus penduduk maupun tulisan para etnograf dan sejarawan. Perkiraan jumlah Orang Sangil dimaksud, dalam karya Jesus T. Peralta, *Glimpses Peoples of the Philippines* (2003:41) dengan mengutip hasil sensus penduduk Filipina yang diadakan pada tahun 1980, tercatat sebanyak 10.344 jiwa. Mereka tersebar di sejumlah wilayah propinsi dan pulau di pesisir selatan Mindanao. Jumlah terbesar berada di Propinsi Davao del Sur, 4.332 jiwa; di pulau Balut dan pulau Sarangani, yaitu sebanyak 2.085 jiwa, di propinsi Jose Abad Santos, 685 jiwa. Sedangkan orang Sangir Talaud yang berada di Mindanao, dan yang tercatat sebagai “*undocumented citizen*” diperkirakan berjumlah 7.483 jiwa.



Gambar 5.1 Warga Sangir-Sangil di Mindanao & foto penulis bersama warga (2003)
(Suami dari Manganitu, istri etnis Dabayan)
(Dokumen penelitian *New Wind, New Face, New Family*, tahun 2003)

Keberadaan kelompok etnis Sangil di Mindanao yang menurut kajian Marriot yang sudah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, berbahasa sama dengan bahasa Sangir atau dari kelompok-kelompok bahasa yang termasuk dalam grup bahasa Filipina, penutur bahasa Sangil dan bahasa Sangir menggunakan kata-kata yang paling banyak kesamaannya jika diperbandingkan dengan penutur bahasa-bahasa lainnya yang bertetangga wilayah. Kenyataan ini mengundang pertanyaan seorang sejarawan (A.B. Lapien): "...apakah penduduk Mindanao yang berbahasa Sangil merupakan diaspora dari sukubangsa Sangir di Nusa Utara?"¹

Tentu saja pertanyaan Lapien di atas memerlukan kajian dan penelusuran yang lebih mendalam. Namun, dalam karya Hayase dan kawan-kawan berupa kompilasi sejumlah tradisi-lisan baik berupa narasi-narasi kesejarahan (dongeng dan legenda hingga tuturan-kisah) maupun tarsilas dan silsilah (*genealogi*)², merekam berbagai bukti tentang perantauan warga Nusa Utara ke daratan Mindanao maupun sebaliknya. Hal yang menarik lainnya adalah keterangan-keterangan yang ditemukan dalam karya Theodore Agoncillo, seorang sejarawan senior Filipina. Menurut Agoncillo, sebagaimana ia peroleh dari sumber-sumber Spanyol, bahwa "... jauh sebelum kedatangan bangsa Spanyol, orang Filipina telah berniaga dengan orang Cina dan menjadi perantaranya berniaga hingga ke Maluku di timur Nusantara dan Aceh di belahan barat Nusantara.³ Dalam aktivitas perniagaan ini, jasa-jasa mereka

1 A.B. Lapien, 2003, Pengantar dalam A.J. Ulaen, *Nusa Utara: dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan*. Halaman vi.

2 Shinzo Hayase, Domingo M. Non and Alex J. Ulaen, 1999.

3 "... A Spanish document of 1586 noted that the Filipinos were "keen traders and have traded with China for many years, and before the advent of Spaniards they sailed to Maluco (Moluccas), Malacca, Hazian (Ache?), Parami, Brunei (Borneo) and other kingdom. Theodore A. Agoncillo, 1990, *History of the Filipino People*. Garotech Publ. Quezon City. 8 Edition, p. 52. Lihat juga Sonia M. Zaide, 1994, *The Philippines: A Unique Nation*. All-Nations Publ. Co. Cubao.

yang disebut “pelaut Melayu” yang termasuk di dalamnya orang Sangir, sangatlah berperan besar. Dan, daratan Mindanao tidak sebatas tempat “perantauan” warga pulau-pulau kecil di sekitarnya maupun “perantau-peniaga” dari belahan barat bumi Melayu yaitu dari Sumatera, Semenanjung, dan bagian utara pulau Kalimantan, atau dalam dokumen-dokumen tadi disebut “Borneo”.

Realita-historis di atas mengesankan adanya sebuah ruang-jejaring atau satuan kawasan yang mulanya diikat oleh aktivitas perniagaan dan pelayaran. Kegiatan seperti ini membuat warga berinteraksi dan interaksinya memerlukan bahasa. Para ahli bahasa seringkali menyebut adanya *lingua franca* dan untuk kawasan Laut Sulawesi, Laut Mindanao, dan Laut Sulu, merupakan bagian yang oleh Ulaen, Wulandari, dan Tangkilisan (2012) disebut sebagai “ruang-jejaring Melayu”. Mereka mengacu kepada keberadaan “bahasa Melayu” yang kata-katanya banyak diserap ke dalam bahasa daerah baik di Mindanao dan Filipina umumnya, maupun ke bahasa Sangihe dan bahasa-bahasa daerah yang dituturkan oleh warga di sekitar ketiga kawasan laut tersebut.

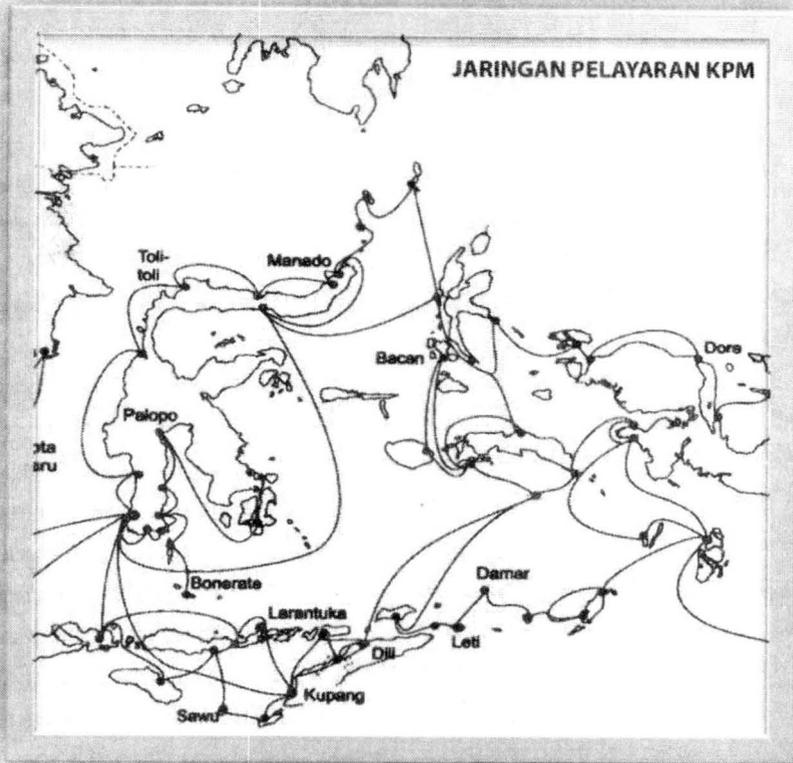
Kehadiran pelaut dan kekuasaan bangsa barat terutama Spanyol yang menguasai kepulauan Filipina, kepulauan Sangihe Talaud, dan Maluku Utara, disusul oleh bangsa Belanda yang direpresentasikan lewat badan niaga yang disebut VOC; persaingan antar bangsa-bangsa ini yang berujung pada tercapainya Perjanjian Damai yang ditandatangani di Munster – seperti sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya – pada akhirnya memilah sebuah kawasan yang disatukan oleh aspek kesejarahan, sosial dan budaya, serta aktivitas perekonomian. Sejak tahun 1565 yang diterapkan di wilayah kepulauan Filipina adalah sistem administrasi pemerintahan *Captaincy-general* yang dijalankan oleh Raja Spanyol melalui *Viceroyalty of Nueva España* (Mexico), diperintah oleh *Real y Supremo Consejo de las Indias* atau

Royal and Supreme Council of the Indies yang dibentuk oleh Raja Charles V tahun 1524. Selanjutnya, mulai tahun 1681, semua tanah jajahan berada dibawah *Ministerio de Ultramar* yang secara harafiah dapat diartikan sebagai Kementerian Seberang Lautan. Pemerintahan dijalankan langsung oleh Raja melalui *Real y Supremo Consejo de las Indias* atau Royal and Supreme Council of the Indies. Sistem pemerintahan seperti itu berlanjut hingga Filipina diserahkan oleh Spanyol ke Amerika Serikat.⁴

Di wilayah kepulauan Nusa Utara, setelah ekspedisi Robertus Padtbrugge, Gubernur VOC di Maluku, ke *het noordereilanden* atau kepulauan Nusa Utara, dan para raja di sana menanda-tangani kontrak dengannya, maka sejak tahun 1677 itu pula, kepulauan ini menjadi bagian dari wilayah perniagaan Belanda (VOC). Lopian, menyimpulkan bahwa sejak kehadiran bangsa Barat, "... satu demi satu kerajaan pribumi masuk dalam orbit salah satu kekuatan kolonial. Pelayaran dan perdagangan lintas laut hanya diperbolehkan dengan seizin pemerintah kolonial yang bersangkutan.." (2009:162).

Setiap kekuatan kolonial mengembangkan jaringan perdagangan dan pelayaran. Di utara, kekuatan kolonial Spanyol menata jaringan pelayaran yang berpusat di Manila dan berujung di Mindanao. Sedangkan, di selatan, kekuatan kolonial Hindia Belanda menata jaringan yang berpusat di Batavia, menghubungkan pulau-pulau yang ada di Nusantara melalui sejumlah pelabuhan dan kepulauan Nusa Utara menjadi titik ujung dari jaringan pelayaran tersebut.

4 *Loc. Cit.*



Gambar 5.2 Jaringan Pelayaran Kolonial yang dioperasikan oleh KPM

Adanya jaringan pelayaran dan perdagangan yang dikembangkan oleh kekuatan kolonial tersebut di atas telah membuat demarkasi tegas dan memilah satu wilayah atau ruang-jejaring mobilitas warga serta niaga yang telah terjadi berabad-abad dan menjadikannya sebagai ruang-jejaring sosial-budaya. Secara tegas kekuatan kolonial terutama Hindia Belanda, melarang aktivitas perniagaan yang melewati batas-batas wilayah yang sudah ditentukan di atas. Tanpa ada izin – dan memang pejabat pemerintahan kolonial baik di keresidenan Manado maupun dua orang pejabat pemerintah kolonial yang disebut *Controleur* yang ditempatkan di kepulauan Nusa Utara – tidak mengeluarkan izin; warga

pelintas batas tersebut di atas dianggap sebagai penyelundup atau juga seperti yang dikemukakan oleh Lapian (2009:162), mereka dianggap sebagai bajak laut.

Apapun tindakan pemerintah kolonial, tidak mampu menghentikan mobilitas warga perbatasan yang bepergian baik dari kepulauan Nusa Utara ke pulau Balut dan pulau Sarangani maupun daratan Mindanao atau sebaliknya dari Mindanao, pulau Balut dan pulau Sarangani, ke Nusa Utara hingga pesisir utara Minahasa terutama pulau Lembeh. Alasan mereka bepergian tidaklah semata-mata semacam kunjungan kekeluargaan, tetapi sebagai kegiatan *mancari* atau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini semakin nampak ketika kota tua Dadiangas atau juga disebut La Janggag, sebuah kota pelabuhan di teluk Sarangani menjadi tujuan pengembangan wilayah yang operasinya dipimpin oleh Jenderal Santos pada awal abad ke-20. Kota yang semula dikenal dengan nama Dadiangas atau juga La Janggag, kini lebih dikenal dengan sebutan General Santos. Pembukaan areal perkebunan kelapa serta komoditas lainnya di sekitar kota, pengembangan kota dan pelabuhannya, membutuhkan tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh warga komunitas etnis di Mindanao, apalagi oleh warga para datu atau Sultan yang melihatnya sebagai ancaman karena memperluas pengaruh kekuasaan kolonial dan mengancam posisi para datu dan pemimpin tradisional lokal. Dan tenaga kerja yang paling banyak terserap memenuhi kebutuhan tenaga adalah warga Nusa Utara. Ingatan bersama atau *collective memories* yang hidup di kalangan pencari kerja dan diwarisi oleh anak-cucu mereka mereka keterangan tentang pekerjaan-pekerjaan yang mereka tekuni, mulai dari merambah hutan dan dijadikan areal perkebunan hingga pekerjaan bertukang, membangun berbagai fasilitas perumahan dan perkantoran. Jenis pekerjaan seperti ini dengan upah yang lebih menarik menjadi pilihan ketimbang mencari pekerjaan di wilayah

keresidenan Manado, menjadi buruh kontrak di perkebunan kelapa dan pembuatan garam.

Ketika kedua negara – Indonesia dan Filipina – lepas dari kekuatan kolonial dan menjadi negara berdaulat atau merdeka, upaya pertama yang dilakukan adalah menentukan tapal batas kedaulatan masing-masing negara. Ketika kedua negara memproklamkan kemerdekaannya, sebagai bekas negara jajahan, tapal batas yang dicantumkan dalam konstitusi masing-masing negara adalah warisan kolonial. Filipina mencantumkan batas-batas sesuai Traktat Paris 1898. Indonesia mewarisi wilayah pemerintahan Hindia Belanda. Penentuan wilayah perbatasan seperti ini diungkap oleh Riwanto Tirtosudarmo, yang memaparkan bagaimana perbatasan sebuah negara dikenal bersamaan dengan lahirnya negara. Meskipun ia mengutip pendapat Smith yang menyatakan bahwa “batas-batas teritorial dari negara bangsa merupakan refleksi dari batas-batas geografis sebuah etnis tertentu.”⁵ Namun, perbatasan negara dengan negara tetangganya yakni Indonesia dan Filipina lahir dari pengalaman kesejarahan, sehingga batas geografis yang berkonotasi etnis tersebut tidak berlaku.

Kebijakan yang diterapkan oleh kekuatan kolonial tentang perbatasan yang sudah dikemukakan di atas berlanjut hingga kini. Praktisi dan penegak hukum (polisi, imigrasi, dan ABRI), politisi, tetap menganggap wilayah perbatasan sebagai tempat dimana berbagai pelanggaran hukum terjadi. Itu sama halnya dengan pendapat pemerintah kolonial yang diungkap oleh Lapien di atas, bahwa para pelintas batas adalah penyelundup atau juga bajak laut. Memang, anggapan seperti itu, sering terjadi dan ditemukan di sana. Tapi, warga yang beraktivitas

5 Riwanto Tirtosudarmo, 2005, “Wilayah perbatasan dan Tantangan Indonesia Abad 21: Sebuah Pengantar” dalam Riwanto Tirtosudarmo & John Haba (Eds.)2005, Dari Entikong sampai Nunukan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

dan pelaku lintas batas memiliki cara pandang lain, yaitu mereka sekedar melanjutkan tradisi yang diwarisi turun-temurun. Mereka bergerak dan tinggal sementara di tanah seberang karena di sana ada keluarga serta kerabat mereka dan dengan siapa si pelaku mobilitas ini menjadi bagian dalam sebuah ruang-jejaring.

Seturut isi Traktat Paris 10 Desember 1898, wilayah Filipina di bagian selatan berada pada titik koordinat 4 45' (empat derajat empat puluh lima menit) Lintang Utara. Garis batas ini memanjang dari titik 118 Bujur Timur sampai 127 Bujur Timur. Ini berarti, posisi pulau Miangas yang berada pada titik koordinat 5 33' Lintang Utara dan 126 34' Bujur Timur, berada dalam wilayah perairan Republik Filipina. Tetapi, dalam peta resmi mereka mencantumkan pulau Miangas yang berada di wilayah perairannya, sebagai milik Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia berpegang pada wilayah Hindia Belanda serta keputusan *Permanent Court of Arbitration* di Den Haag tanggal 23 Januari 1925 dari Dr. Max Hubert selaku arbitrator tunggal, bahwa pulau Miangas adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda. Sehingga, ketika menetapkan wilayah laut, ia mendasarkannya pada pulau Miangas dan pulau Marore sebagai titik terluar dan membuat sebuah garis lurus yang menghubungkan dua pulau tersebut serta menghitung jarak ke utara sejauh 12 mil laut. Namun, hingga kini kedua negara masih dalam tahap perundingan batas laut tersebut.

Persoalan lain adalah masalah penduduk. Pemerintah kedua negara menemukan sejumlah warganya berada di wilayah negara tetangga. Ribuan warga Indonesia khususnya warga Nusa Utara yang berdiam di wilayah Republik Filipina tidak memiliki kartu identitas atau tanda pengenal. Begitu pula sebaliknya. Ratusan warga Filipina berada di wilayah Republik Indonesia tanpa tanda pengenal sebagaimana disyaratkan

bagi penduduk sebuah negara yang bepergian ke negara lain. Khusus kehadiran warga Nusa Utara di pulau Balut, pulau Sarangani dan daratan Mindanao yang tidak memiliki identitas, disebabkan oleh dua hal. Pertama, pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda hingga peralihannya ke pemerintahan Republik Indonesia, kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk belum merupakan satu keharusan atau bagian dari administrasi kependudukan. Waktu itu yang berlaku adalah pemberian "pas jalan" bagi warga yang mau bepergian. Karena bepergian melintasi batas negara khususnya di perbatasan wilayah Hindia Belanda – Spanyol yang sudah dilakoni sejak turun temurun dan perwakilan kekuasaan kolonial di keresidenan Manado, yaitu dua pejabat *Controleur* yang berada di Tahuna maupun di Lirung tidak mau memberikan izin, maka warga yang bepergian melintasi perbatasan ini memilih untuk berlayar tanpa memiliki dokumen. Tokh di daerah tujuan (pulau Balut, Sarangani, dan daratan Mindanao), hal itu tidak dipusingkan karena para pendatang ini adalah warga yang selain datang mengunjungi keluarga serta kerabat mereka, juga menjadi tenaga kerja yang bermanfaat bagi warga, terutama para pemilik perkebunan dan bagi keperluan pemerintah setempat. Itulah sebabnya, ketika perutusan kedua pemerintah memecahkan persoalan ini, tercapailah kesepakatan 4 Juli 1956 mengenai pengawasan para pelintas batas. Bagaimana menemukan solusi agar para pelintas batas yang masuk ke wilayah masing-masing negara memiliki identitas dan perijinan yang jelas. Opsi yang langsung dikerjakan adalah repatriasi warga. Sebagian besar dari warga yang terjaring memilih untuk dipulangkan ke kampung halamannya dan ada juga yang memilih untuk mendapatkan sttaus sebagai warganegara Filipina. Pilihan kedua ini terutama diambil oleh warga baik yang sudah mengawini maupun yang dikawini oleh warga Filipina.

5.2 Perjanjian Antar-negara: *Border Crossing Agreement*

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa pemerintah kedua belah pihak menyadari bahwa keberadaan puluhan ribu Orang Sangihe di Mindanao dan Orang Mindanao di daerah Sulawesi Utara satu saat dapat menjadi masalah mengganggu hubungan diplomatik kedua negara, maka pada pertengahan tahun 1956 keputusan pemerintah kedua negara mengadakan pertemuan yang membahas masalah "pelintas-batas". Hasil pertama adalah tercapainya kesepakatan yang ditanda-tangani pada tanggal 4 Juli 1956 di Jakarta. Pihak Pemerintah Filipina diwakili oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Jose Fuentebella dan pihak Pemerintah Indonesia diwakili oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Soekardjo Wirjopranoto. Isu utama kesepakatan ini menyangkut keberadaan warga kedua negara-bangsa yang berada secara tidak sah di wilayah kedua negara tersebut, dan kesepakatan melakukan pengawasan lalu-lintas di perbatasan⁶.

Agar kesepakatan ini memiliki kekuatan hukum maka perlu diratifikasi oleh kedua negara. Pemerintah Filipina menjadikannya sebagai *Senate Resolution* nomor 94, 1957 (*Resolution Expressing the Concurrence To and Approval of The Senate of The Philippines of The Agreement Between the Republic of The Philippines and The Republic of Indonesia on Immigration Signed at Jakarta on July 4, 1956*). Pemerintah Indonesia meratifikasinya menjadi Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1957 tentang *Undang-Undang Persetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah Di Daerah Republik Indonesia dan Republik Filipina*, Lembaran Negara RI Nomor 1489.

6 Beberapa tulisan yang membahas hal ini, antara lain: Winsulangi Salindeho & Pitres Sombowadile, *Masalah Perbatasan di Kepulauan Sangihe dan Talaud. The Satal Connection*. Tanpa Tahun; Alex J. Ulaen, 2003, *Permasalahan Batas Wilayah Laut Antar Negara: Kasus Perbatasan Indonesia - Filipina*. Paper untuk diskusi tentang "Otonomi Daerah dalam Perspektif Sejarah" Kerjasama Direktorat Sejarah dengan Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang, 28 - 30 Juli 2003.

Dalam keputusan tersebut juga ditentukan batas-batas kawasan yang dijadikan sebagai *Border Crossing Area*. Di pihak Indonesia, pulau-pulau yang masuk dalam kawasan ini adalah kelompok pulau paling utara, yakni:

- 1) Kelompok pulau-pulau Sangi dan Talaud;
- 2) Pulau Miangas;
- 3) Kelompok Pulau-pulau Marore dan Kawio;
- 4) Pulau Nunukan⁷

Di wilayah Filipina, ditentukan:

- 1) Balut Sarangani Island group;
- 2) Sibutu Island group
- 3) Simanul island;
- 4) Manuk Manka Island.

Meskipun sudah ditentukan wilayahnya, namun belum ditetapkan adanya pos bagi pelintas batas. Warga yang dibolehkan melakukan aktivitas lintas-batas adalah mereka yang minimal lima tahun tinggal menetap atau menjadi warga penduduk di delapan wilayah yang sudah ditentukan, yaitu empat wilayah di Filipina dan empat wilayah lainnya di Indonesia. Alasan bepergian adalah untuk kepentingan niaga dan atau mengunjungi keluarga, melaksanakan ibadah keagamaan, dan bertamasya. Mereka mendapat kesempatan untuk menetap selama 59 hari.

Sembilan tahun setelah kesepakatan tersebut di atas berjalan, pemerintah kedua belah pihak terutama pejabat yang diberi kewenangan untuk melaksanakan dan mengevaluasi kesepakatan ini merevisi perjanjian pertama.

⁷ Hanya lokasi nomor 4 ini yang berada di Kalimantan Timur sedang lainnya di Sulawesi Utara

Tepatnya pada tanggal 16 September 1965, sebuah dokumen bernama: *Joint Directives and Guidelines on the Implementation of the Immigration Agreement on Repatriation and Border Crossing Arrangement Between Republic of Indonesia and the Republic of the Philippines*, disepakati di Manila. Di pihak Indonesia, yang menandatangani adalah Konselor Kedutaan Besar Indonesia Jusuf Ronodipuro, dan di pihak Filipina, Konsul Jenderal Leon T. Garcia. Perjanjian kali ini merupakan akhir final dari tiga pertemuan pada tahun 1963 (Manado, Tarakan, Davao) dan penanda-tanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) yang ditandatangani di Jolo-Filipina, 30 Mei 1964. Dalam kesepakatan ini, masih mengatur dua hal yaitu tentang repatriasi dan tentang lintas-batas. Selain itu, juga diatur jumlah dan nilai barang yang dibawa para pelintas batas yakni barang-barang kebutuhan pokok hidup dengan nilai di bawah 500 Pesos Filipina bagi setiap orang, dan sebuah perahu motor yang disebut "kompit" tidak boleh membawa barang kebutuhan pokok yang nilainya lebih dari 5000 Pesos. Perahu dan kapal motor yang diijinkan pun ukuran tonasenya dibatasi dan tidak boleh melebihi 200 meter kubik.

Di wilayah Indonesia, ditentukan:

- 1) Kelompok Pulau-pulau Sangir dan Talaud mencakup pulau Karakelang, pulau Salibabu, pulau Kabaruan, pulau Lipang, pulau Bukide, pulau Manipa, pulau Tehang, pulau Beng laut, pulau Beng darat, pulau Sangi Besar, dan pulau Mahumu.
- 2) Kelompok pulau-pulau Nanusa mencakup pulau Miangas, pulau Garat, pulau Karatung, pulau Marampit, pulau Mangupung, pulau Kakorotan, dan pulau Malo.
- 3) Kelompok pulau-pulau Kawio mencakup pulau Marore, pulau Kawio, pulau Kemboleng, dan pulau Kawaluso.

Di wilayah Filipina, mencakup:

- 1) Balut island;
- 2) Olanivan Island;
- 3) Sarangani Island;
- 4) Manamil Island.

Perjanjian di atas telah mencantumkan pulau Marore dan pulau Miangas sebagai Pos Lintas Batas di wilayah Indonesia, dan Mabila, Balut di wilayah Filipina. Hal yang berbeda dengan peraturan pertama adalah tentang lama waktu penduduk menetap di kawasan yang ada untuk mendapatkan kartu pelintas batas⁸.



Gambar 5.3 Fasilitas Lintas Batas di pulau Marore
Border Crossing Station Marore (Filipina) dan Pos TNI AL (Indonesia)

Pada pertemuan puncak antara Presiden Suharto dan Presiden Marcos di Manado, tanggal 29 – 30 Mei 1974, disepakati sebuah dokumen perjanjian dengan nama *Revised Agreement on Border Crossing Between Republic of Indonesia and*

8 Lihat dokumen *Joint Directives and Guidelines on The Implementation of The Immigration Agreement On Repatriation and Border Crossing Arrangement Between The Republic of Philippines and Republic of Indonesia*

the Republic of the Philippines. Naskah revisi ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1975. Seperti terbaca pada judulnya atau nama dokumen, isinya adalah merevisi aturan lintas batas sebelumnya. Jumlah serta nilai barang masih sama dan yang direvisi adalah wilayahnya. Selain pulau-pulau Karakelang, Salibabu dan Kabaruan di Talaud, pulau-pulau Sangir Besar, Beng Darat, Beng Laut dan Mahum di pulau-pulau Sangihe dihapus dari wilayah lintas batas. Dengan demikian wilayah lintas batas yang masih tercantum adalah:

- 1) Pulau-pulau Nanusa mencakup pulau Miangas, pulau Garat, pulau Karatung, pulau Marampit, pulau Mangupung, pulau Kakorotan dan pulau Malo;
- 2) Pulau-pulau Kawio mencakup pulau Marore, pulau Kemboleng, pulau Kawaluso, pulau Mamanuk, pulau Matutuang, dan pulau Dumarehe;
- 3) Pulau-pulau Bukide mencakup pulau Bukide, pulau Liang, pulau Salehe, pulau Meliang, pulau Mekurang, pulau Balontok, dan pulau Lipang;
- 4) Sub-distrik Tarakan.

Di wilayah Filipina, yang tersisa adalah:

- 1) Pulau Balut;
- 2) Pulau Sarangani;
- 3) Pulau Olanivan;
- 4) Tanjung San Agustin; dan
- 5) Pulau-pulau Tawi-tawi yang berdekatan dengan Tarakan.

Selain naskah revisi di atas, ada juga kesepakatan lainnya yaitu naskah Persetujuan Perdagangan Daerah Perbatasan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Filipina yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1974. Di pihak Indonesia, yang menandatangani perjanjian itu adalah Menteri

Perdagangan Republik Indonesia, Radius Prawiro dan dari pihak Filipina, Menteri Perdagangan Republik Filipina, Troadio T. Quiazon, Jr.; dan naskah *Joint Implementation of the Border Patrol Agreement and Border Crossing Agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia*. Naskah *Joint Implementation of the Border Patrol Agreement and Border Crossing Agreement* ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1975 di Quezon City. Di pihak Indonesia, Marsekal Madya TNI Soedarmono selaku Kepala Staf Operasi Departemen Pertahanan dan Keamanan yang menandatangani naskah tersebut, sedangkan di pihak Filipina, Rear Admiral Romulo Espaldon, *the Deputy Chief of Staff, AFP and Commander Southwest Command*. Dalam naskah perjanjian ini dapat ditemukan kesepakatan yang mengatur Patroli Perbatasan. Atas dasar itu pula dibentuk Komite Perbatasan yang dipimpin oleh pihak militer. Komite ini bertugas mengawasi pelaksanaan persetujuan patroli perbatasan, dan secara rutin setiap tahun mengadakan pertemuan silih berganti tempatnya di Indonesia dan di Filipina.



Gambar 5.4 Kartu Identitas Pelintas Batas & Kartu Lintas Batas awak kapal

Selain Perjanjian Lintas Batas atau *Border Crossing Agreement* (BCA), kawasan Mindanao Selatan dan Nusa Utara juga

masuk dalam pertimbangan sehingga munculnya gagasan dari Senator Vicente T. Paterno, mantan Menteri Perdagangan Republik Filipina; yang giat mengkampanyekan gagasan "go south". Tujuan awal dari gagasan ini ialah menempatkan Mindanao sebagai pusat untuk merekonstruksi serta menghidupkan kembali hubungan niaga yang disebutnya sebagai "... *an old pre-Hispanic commercial link (...) reviving traditional trade routes with "backdoor" neighbors evolved.*"⁹ Senator Paterno sejak awal tahun 1990-an aktif melakukan kunjungan ke beberapa negara ASEAN mengkampanyekan gagasannya ini. Upayanya kemudian membuahkan sebuah Forum kerjasama yang dikenal dengan nama *Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippina, East ASEAN Growth Area*, disingkat BIMP-EAGA.

Berbeda dengan Perjanjian Lintas Batas atau *Border Crossing Agreement*, yang didasarkan pada kenyataan bagaimana mengatur dan mengawasi para pelintas batas serta perniagaan di kalangan pelintas-batas untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup mereka; BIMP-EAGA dirancang pada aras-atas dan bisnis berskala besar. Hal itu dapat dilihat dari program-program yang dirancang serta disepakati dan terbaca dari dokumen pertemuan BIMP-EAGA berikut:

- | | |
|--|--------------------------|
| - expansion of air linkages | Brunei Darussalam |
| - expansion of sea transport & shipping services | Indonesia |
| - joint tourism development | Malaysia |
| - expansion of fisheries cooperation | Philippines |
| - construction & construction material | Philippines ¹ |

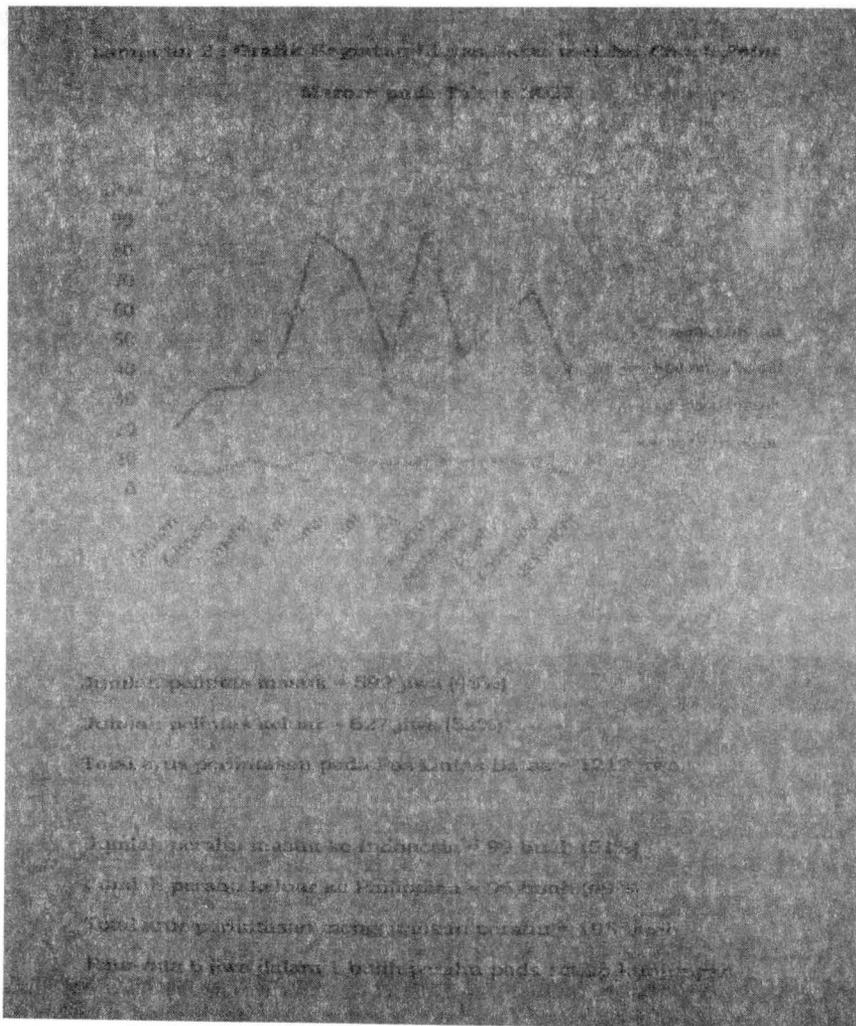
⁹ Antonio Vn. Figueroa, 1994, *The Plygon East ASEAN Growth Area*. JSL Printers & General Merchandise, Davao City.

Dua program yang sempat dijalankan adalah perluasan atau ekspansi layanan pelayaran laut yang dioperasikan PT Pelni, yaitu dengan menghubungkan pelabuhan Bitung dengan pelabuhan Davao dengan km Tilongkabila. Kegiatan mana terhenti dengan alasan bahwa pendapatannya tidak dapat menutupi biaya operasi kapal. Kegiatan lainnya adalah kerjasama di sektor perikanan, yang juga dihentikan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan R.I. Freddy Numberi. Alasannya, kerjasama ini lebih menguntungkan pihak Filipina sementara pihak Indonesia tidak dapat menikmati kekayaan laut yang disedot oleh aktivitas penangkapan ikan.

5.3 Para pelintas-batas kini

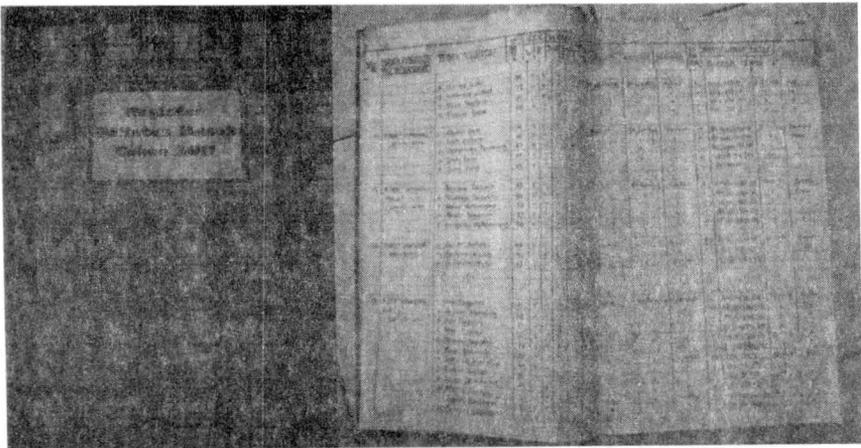
Memahami gerak mobilitas para pelintas batas kini sangat terbantu dengan sistem pencatatan dan pendokumentasian bagian Pelayanan Lintas Batas Kantor Kecamatan Kepulauan Marore. Dokumen pencatatan yang dipilah atas dua buku register yaitu Buku Register Pelintas Batas yang Masuk ke wilayah Indonesia dan Buku Register Pelintas Batas yang keluar wilayah Indonesia tidak hanya mencatat tanggal masuk dan keluar tetapi juga asal atau alamat si pelintas batas, identitas kewarga-negaraan pelintas batas, tujuan bepergian, jenis fasilitas yang digunakan melaut, dan lamanya mereka menetap. Dokumen tersebut dapat ditelusuri hingga tahun 2006. Untuk mendapatkan gambaran tentang gerak mobilitas yang terekam dalam catatan pelintas batas, di sini akan disajikan data pelintas batas yang terekam sepanjang tahun 2011. Menurut catatan tersebut, total pelintas batas sebanyak 1.219 jiwa, dengan rincian jumlah pelintas masuk tercatat sebanyak 592 jiwa dan jumlah pelintas keluar sebanyak 627 jiwa. Total jumlah alat angkut yaitu perahu jenis pambut dan kapal motor sebanyak 195 buah. Ada pelintas batas dengan pambut sendirian, dan jumlah terbanyak terjadi pada tanggal 16 Agustus 2011, sebanyak 39 jiwa yang semuanya warga

Filipina. Meskipun jumlah terbesar dari pelintas batas ini tujuannya terpusat di pulau Marore dan pulau Matutuang, sebagiannya tersebar hingga ke daratan pulau Sangir Besar. Gambaran tentang jumlah pelintas batas yang melalui *check point* Marore dapat dilihat dalam gambar berikut:



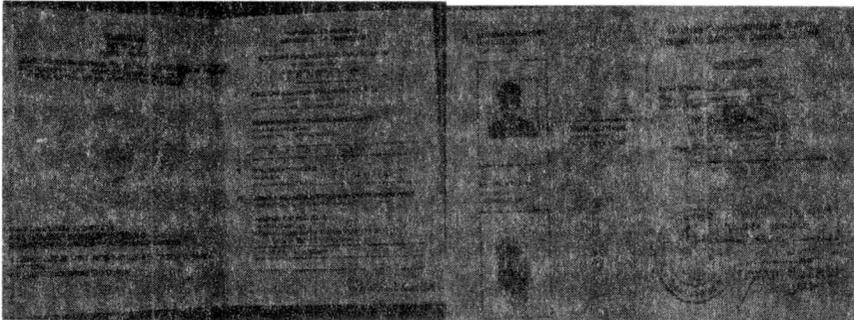
Gambar 5.5 Grafik Kegiatan Lintas Batas melalui *Check Point* Marore 2011
 Sumber: Dokumen Layanan Lintas Batas Kantor Kecamatan Marore

Tujuan utama para pelintas batas pada tahun 2011 adalah pulau Marore, tercatat sebanyak 257 jiwa (43,4 %), terdiri atas 123 orang warga Marore yang kembali dari berbagai tempat di Filipina, 120 orang warga Filipina yang berkunjung ke Marore, dan 14 orang warga Sangihe yang bermukim di Filipina yang datang berkunjung. Pada urutan kedua adalah pulau Matutuang. Tercatat sebanyak 165 orang pelintas batas (27,8 %), terdiri atas 45 orang warga Matutuang yang kembali ke kampung halamannya, 109 orang warga Filipina dan 21 orang warga Sangihe di Filipina yang datang berkunjung ke Matutuang. Tercatat pula sebanyak 44 orang (7,4 %) berkunjung dan atau kembali ke pulau Kawio, dengan rincian 13 orang warga Kawio yang kembali ke kampung halamannya, 6 orang warga Sangihe di Filipina dan 25 orang warga Filipina yang berkunjung ke Kawio. Pulau Manipa, khususnya desa Tinakareng merupakan daerah tujuan lainnya disamping pulau Bukide dan daratan pulau Sangir Besar. Sebarannya dapat dilihat atau dipelajari dalam dokumen register di bawah ini.



Gambar 5.6 Buku Register Masuk & Keluar Para Pelintas Batas
 Sumber: Dokumen Layanan Lintas Batas Kantor Kecamatan Marore

Tidak hanya para pelintas batas yang diwajibkan memiliki kartu pelintas batas seperti pada gambar 5.4 di atas, tetapi juga para awak perahu motor yang melakukan perjalanan melintasi batas antar dua negara. Tanpa memiliki dokumen-dokumen di atas dianggap sebagai pelintas batas ilegal atau penyelundup. Untuk mendapatkan dokumen pelintas batas, persyaratannya adalah warga atau penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk warga yang menetap di pulau-pulau yang berada di wilayah yang ditentukan dalam Perjanjian Lintas Batas. Kartu tanda pelintas batas sebelum berangkat harus mendapat pengesahan dari pihak imigrasi dan ketika tiba di tempat tujuan melaporkannya ke pos imigrasi dan Layanan Lintas Batas. Bagian dalam dari kartu pelintas batas yang sudah mendapat pengesahan dari petugas, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.7 Bagian dalam/lembar pengesahan kartu lintas batas

Selain kartu pelintas batas yang dimiliki secara individual maupun para awak perahu, ada juga daftar pemegang kartu lintas batas awak perahu yang harus disertakan sebagai dokumen perahu atau kapal motor yang digunakan. Dalam daftar tersebut jumlah pengikut termasuk anak-anak yang belum memiliki kartu pelintas batas dicantumkan.

**PEMILIK KARTU LINTAS BATAS
MARIKAPAL**

JOMBANG, 2013

No. Urut	Nama Pemilik	Alamat	Alamat Pemilik				
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gambar 5.8 Daftar Pemegang Kartu Lintas Batas Awak Perahu
Sumber: Layanan Lintas Batas Kantor Kecamatan Marore

Dari sisi perlengkapan atau dokumen, para pelintas batas diijinkan bepergian ke tempat-tempat yang berada di wilayah Perjanjian Lintas Batas. Begitu pula dengan barang bawaan yang dibolehkan terutama bahan makanan pokok sesuai nilai yang ditentukan termasuk pada kategori legal. Namun, tidak jarang ditemukan, sejumlah barang yang seperti minuman beralkohol yang mereka bawa dan perdagangkan. Barang-barang seperti ini bisa lolos dari pengawasan petugas karena dikemas bersama bahan kebutuhan pokok.

Kecenderungan membawa minuman beralkohol dari wilayah Filipina memasuki wilayah Indonesia hanya dilakukan oleh beberapa pelintas batas terutama yang berasal dari desa Tinakareng pulau Manipa. Nama-nama mereka dapat dilacak dalam dokumen pelintas batas, terindikasi lewat intensitas bepergian baik di wilayah Lintas Batas maupun di wilayah kabupaten Kepulauan Sangihe. Nama mereka juga sudah dikenal di kalangan warga. Sejauh penelusuran dalam studi

ini, barang-barang tersebut dapat ditemukan tidak hanya di desa Tinakareng, atau juga di kompleks pertokoan dan pasar di kota Petta, Tabukan Utara, tetapi juga ditemukan di beberapa tempat di kota Tahuna. Alasan memperjual belikan minuman beralkohol ini ialah "barang-koleksi" berupa kemasan minuman beralkohol dalam botol-botol kecil atau miniatur dari kemasan sebenarnya. Isi "barang koleksi" ini berkisar antara 50 – 100 ml., tergantung pada bentuk botol kemasannya. Selain kemasan "barang koleksi" juga tersedia kemasan untuk dikonsumsi. Namun, untuk mendapatkannya, memerlukan pendekatan khusus atau ada orang yang menjamin si penjual bahwa pembeli yang dia bawa bukanlah aparat penegak hukum.

Barang-barang kebutuhan yang umumnya dibawa oleh nelayan adalah perlengkapan melaut, mulai dari papan kayu lapis bahan baku pembuatan pambut, lem perekat, paku tembaga, hingga beragam ukuran alat pancing seperti tali nilon, mata kail, dan umpan-umpan buatan. Kebutuhan pokok seperti beras tidak menjadi prioritas lagi seperti dahulu karena selain harganya lebih mahal dari harga beras di tanah air, juga sudah tersedia jatah beras raskin untuk daerah perbatasan.

Fenomena menarik dari para pelintas batas ini dalam setiap perjalanan yang menggunakan sebuah perahu motor baik itu pambut maupun fuso, adalah latar belakang kewarganegaraan mereka. Selain satu dua warga Marore, Kawio, dan Matutuang yang pulang, penumpang lain adalah warga Filipina atau juga warga Sangihe yang menetap di Filipina. Nama keluarga dari pelintas batas baik warga Marore, warga Sangir yang tinggal di Filipina, maupun warga Filipina akan menunjukkan bahwa mereka yang melakukan perjalanan bersama terikat oleh hubungan kekeluargaan. Setidaknya, warga Filipina yang turut serta – kalau tidak terikat secara kekeluargaan dengan penumpang lainnya – adalah tetangga dan teman sekerja.

Ambil contoh penumpang M/BCA¹⁰ Star Light yang tiba tanggal 7 September 2011. Pemiliknya merangkap nakhoda, S. Laiyang (Pria/44 tahun) bersama Ulister Daling (P/28 tahun), dan Jenifer Singcoy (W/15 tahun) adalah penduduk pulau Sarangani, warganegara Filipina. Ikut bersama sebagai penumpang ada Eving Laiyang (W/24 thn), Juslin Temponusa (W/59 thn), Amiming Mahaling (W/51 thn), Elni Damar (W/25 thn), dan Roger Powang (P/5 thn). Lima penumpang yang disebut terakhir adalah penduduk Marore, warganegara Indonesia. Jelas sekali antara Nakhoda (S. Laiyang) dengan penumpang (Eving Laiyang) memiliki satu nama keluarga atau fam. Hal serupa dapat ditemukan dalam daftar penumpang perahu motor lainnya.

Dari latar jenis kelamin, tampak bahwa pelintas batas pria jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kaum wanita, kecuali pelintas batas dari Marore. Pada tahun 2011 jumlah pelintas batas asal Marore yang kembali ke kampung halamannya seperti sudah dikemukakan di atas sebanyak 123 orang. Kaum pria sebanyak 70 orang atau 58 %, dan kaum wanita 53 orang atau 42 %. Begitu pula halnya dengan warga Filipina yang berkunjung ke pulau Marore pada tahun yang sama sebanyak 113 orang atau 94 % kaum pria, dan 7 orang atau 6 % kaum wanita. Hal menarik adalah jumlah warga Sangihe penduduk Filipina yang berkunjung baik ke Marore, Matutuang dan Kawio, hanya terdiri dari kaum pria. Hal ini mengundang pertanyaan, apakah warga Sangihe yang tinggal di Filipina ini masuk pada kategori *undocumented citizen*? Sehingga yang berani bepergian hanya kaum pria sedangkan kaum wanita memilih untuk tidak bepergian.

Kecenderungan pelintas batas memilih waktu bepergian

10 M/BCA singkatan dari Motor Border Crossing Area, artinya perahu motor yang tercatat dan memiliki ijin beroperasi di wilayah Lintas Batas.

seperti yang tampak dalam gambar 5.5 di atas menunjukkan hubungannya dengan keadaan alam. Seperti diketahui bahwa pada bulan April hingga awal bulan Juni adalah musim tenang. Begitu pula halnya dengan periode pancaroba pada bulan Agustus dan antara bulan Oktober dan Nopember. Pada masa-masa itu, jumlah pelintas batas meningkat hingga kisaran 80 sampai 90 orang, dan umumnya menggunakan perahu berukuran kecil (pambut).

Dalam hal prosentase pelintas batas, seperti telah diungkapkan di atas bahwa tiga pulau di wilayah kecamatan Marore yakni pulau Marore, Matutuang dan Kawio memiliki prosentase tertinggi sedangkan penduduk di pulau Manipa, Bukide prosentasenya rendah. Ini tidak dapat diartikan bahwa intensitas pelintas batas warga Marore, tinggi. Jika diperbandingkan dengan data dalam buku register pelintas keluar, maka warga Marore menggunakan waktu-tinggal sesuai ijin yakni 59 hari kemudian kembali ke kampung halamannya. Dalam daftar tersebut ditemukan nama-nama warga Tinakareng yang lebih sering melakukan kegiatan melintasi batas. Ada yang namanya ditemukan hampir setiap bulan melakukan kegiatan melintasi batas. Hal ini mengindikasikan bahwa kepergiannya bukan semata untuk kunjungan keluarga, melainkan untuk berniaga. Sayangnya penelitian ini tidak menemukan dokumen yang mereka jenis serta jumlah barang bawaan para pelintas batas. Informasi yang diperoleh – baik secara lisan maupun tertulis – Tinakareng di pulau Manipa dapat dianggap sebagai pusat jaringan dalam kegiatan perlintasan-batas melewati Marore dan masuk ke Batuganding (Filipina), maupun dari Tinakareng masuk ke daerah bukan wilayah lintas batas di kepulauan Sangihe, seperti ke Petta dan kota Tahuna.

Bagi warga Filipina yang tidak bisa masuk ke wilayah bukan *Border Crossing Area*, Tinakareng memiliki arti penting sebagai tempat pertukaran barang. Produk-produk unilever seperti

sabun (bubuk dan batangan), pasta gigi, dan sebagainya; maupun rokok kretek, kain batik merupakan barang dagangan yang laris di wilayah Filipina selatan. Tentang barang produk unilever, di Filipina sendiri sebenarnya ada pabrik dan agennya. Tetapi harganya menjadi mahal ketika biaya pengiriman dari pulau Luzon di utara ke pulau Mindanao di selatan terus ke pulau Balut dan Sarangani; lebih tinggi jika dibandingkan dengan biaya pengiriman barang serupa produk unilever dari Surabaya langsung ke kota Tahuna, kemudian ke pulau-pulau kecil disekitarnya terutama pulau Manipa.

(Footnotes)

- 1 *The BIMP-EAGA: Five Years Later. A Report of BIMP-East ASEAN Business Council*, Nopember 17, 1999.

BAB VI

MARORE PULAU TERLUAR ATAU TERDEPAN: BUKAN ITU MASALAHNYA

Marore adalah pulau terluar atau juga terdepan berhadapan dengan wilayah negara tetangga, Filipina. Admnsitratif, pulau seluas 1,68 km² dengan penduduk sebanyak 638 jiwa ini berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Geografis berhadapan langsung dengan dua pulau di wilayah Filipina, yaitu pulau Balut dan pulau Sarangani dengan jarak antara pulau Marore dengan kedua pulau di atas ± 50 mil laut. Berbeda dengan warga pulau Miangas – pulau perbatasan lainnya yang ada di wilayah propinsi Sulawesi Utara – di mana para pelintas-batas yang harus memiliki pengetahuan dasar bahasa Visaya; warga pulau Marore yang berkunjung ke pulau Balut dan pulau Sarangani tidak mengalami kendala bahasa karena kesamaan bahasa yaitu bahasa Sangil dan bahasa Sangir. Selain itu, lebih dari 50 % warga kedua pulau diatas adalah keturunan “orang Sangir”.

Menggantungkan hidupnya pada aktivitas menangkap ikan, aktivitas nelayan di pulau Marore dan sekitarnya tidak jarang menjual hasil tangkapan ke kapal-kapal penampung dari General Santos yang beroperasi di sepanjang perairan Laut Mindanao. Selain lebih mudah memasarkan hasil tangkapannya, hal yang tidak masuk di akal mereka jika harus menjual ikan di ibukota kabupaten yang harus ditempuh

sekitar 6 hingga 7 jam, dan belum ada jaminan pembeli. Di satu sisi, armada penangkap ikan Filipina yang beroperasi dari pelabuhan General Santos, umumnya mempekerjakan "orang Sangir" baik mereka yang menetap di pulau-pulau Balut dan Sarangani maupun di sekitar kota General Santos maupun pencari kerja dari pulau-pulau Marore, Kawio dan sekitarnya hingga pulau Bukide dan pulau Manipa di selatan. Para pencari kerja ini boleh keluar masuk daratan Mindanao berbekalkan "Kartu Lalu Lintas Perbatasan" atau *Kard ng pagbagtas sa hanggahan (Border Crossing Card)* sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya (Bab V). Hal seperti ini sangat dimungkinkan karena mereka bermukim atau penduduk dari pulau-pulau yang masuk dalam *Border Crossing Area*. Dan untuk mendapatkan Kartu Lalu Lintas Perbatasan ini syaratnya adalah pemegang Kartu Tanda Penduduk pulau-pulau tersebut dan biaya mendapatkan kartu ini terbilang sangat murah (Rp. 25.000,-) dibandingkan dengan biaya pengurusan pasport.

Sejak tiga tahun terakhir, pemerintah kabupaten kepulauan Sangihe berinisiatif membuka kerjasama perdagangan dengan beberapa provinsi di Mindanao selatan. Dengan kerjasama baru ini diharapkan sebagai revisi atas isi dari Perjanjian Lintas Batas yang sudah tidak menguntungkan kedua belah pihak. Hanya saja, aktivitasnya belumlah seramai tahun-tahun sembilan puluhan, ketika pedagang Filipina diuntungkan oleh gejolak nilai tukar dolar terhadap rupiah yang berbeda dengan nilai tukar dolar terhadap peso. Ketika itu banyak pedagang Filipina yang datang ke Manado memborong barang dagangan terutama bahan keperluan rumah tangga produk Unilever,¹ rokok kretek, kain batik, dan

1 Hal itu sempat mengundang reaksi pihak Unilever di Filipina terhadap pihak Unilever di Indonesia, karena produk mereka di Filipina lebih mahal dan mereka menduga seakan-akan Indonesia telah melakukan praktek *dumping*. Fenomena sesaat itu terjadi

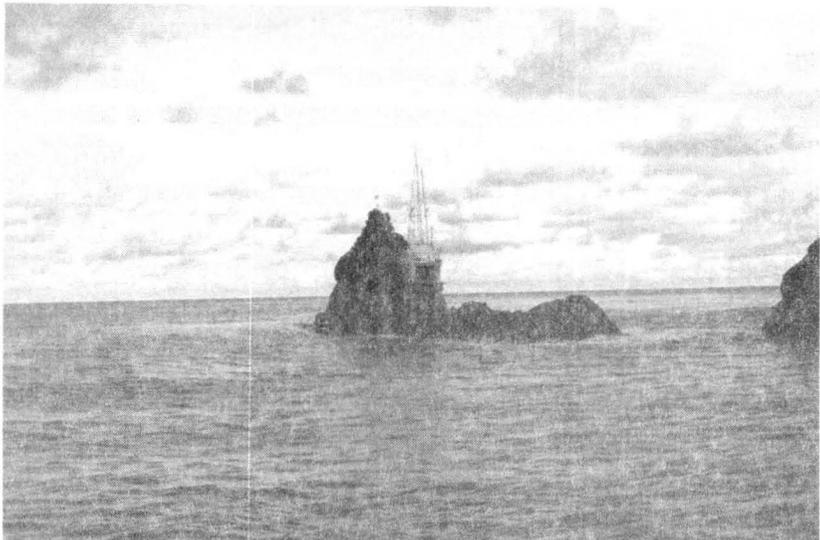
sebagainya. Kunjungan kekeluargaan serta mencari pekerjaan dewasa ini lebih menonjol dilakoni oleh warga Marore. Sedangkan kunjungan untuk berniaga atau membeli produk-produk tertentu dari tanah seberang lebih banyak dilakukan oleh warga pulau Manipa khususnya dari desa Tinakareng maupun warga kota Petta dan kota Tahuna yang mendapat kartu identitas dari Tinakareng.

6.1 Marore, pulau Terluar atau Terdepan

Sebutan “pulau terluar” bagi Marore, maupun pulau-pulau lainnya di seluruh wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga sepertinya bersumber atau sekaligus menginspirasi isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Peraturan pemerintah yang ditanda-tangani oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 28 Juni 2002; pada pasal 11 ayat (3) bunyinya sebagai berikut: “... apabila di kemudian hari Koordinat Geografis Titik-Titik Terluar, **pulau-pulau terluar (bold dari penulis)**, atol, karang kering terluar, elevasi surut terluar, teluk, muara sungai, terusan atau kuala di pelabuhan berubah, maka diadakan penyesuaian (dstnya)...”, dan seterusnya.” Peraturan Pemerintah Republik Indonesia di maksud (Nomor 38 Tahun 2002) adalah penentuan Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Nama pulau Marore tercantum pada nomor urut 35 dan 36, serta nomor urut 37 pulau Batubawaikang. Pada nomor urut 35, pulau Marore yang berada pada koordinat 04° 44’ 14” Utara dan 125° 28’ 42’ Timur (Laut Mindanao), adalah Titik Dasar No. TD. 055, Pilar Pendekat No. TR. 055, antara TD. 055 – TD.055A sebagai Garis Pangkal Biasa, dan pada nomor urut

hanya karena perbedaan nilai tukar dolar terhadap kedua mata uang (rupiah & peso).

36 pada koordinat $04^{\circ} 44' 25''$ Utara dan $125^{\circ} 28' 56''$ Timur (Laut Mindanao), adalah Titik Dasar No. TD. 055A, Pilar Pendekat No. TR. 055, Jarak TD. 055A – TD.055B = 0.58 nm, Garis Pangkal Lurus Kepulauan. Pada nomor urut 37, pulau Batubawaikang, pada koordinat $04^{\circ} 44' 46''$ Utara dan $125^{\circ} 29' 24''$ Timur (Laut Mindanao), adalah Titik Dasar No. TD. 055B, Pilar Pendekat No. TR. 055, Jarak TD. 055B – TD.056 = 81.75 nm, Garis Pangkal Lurus Kepulauan.



Sebagai “pulau terluar” atau “pulau terdepan” perlu diberi penanda kehadiran kekuasaan negara baik dalam bentuk pemerintahan maupun simbol-simbol fisik, seperti halnya “Tugu Perbatasan”, “menara suar”, dan sebagainya. Simbol penampakan kekuasaan negara yang pertama di pulau Marore adalah ditetapkannya Marore sebagai *check point* di wilayah Indonesia dalam Perjanjian Lintas Batas atau *border crossing agreement*. Sesuai peraturan pemerintahan, sebuah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan, membawahi sejumlah desa dan penduduk yang jumlahnya lebih besar dari warga pulau Marore. Namun peraturan itu

dikesampingkan dan hadirnya kepala kecamatan pertama di Marore lebih dikenal sebagai Camat BCA yang memimpin sebuah wilayah dengan tugas melayani para pelintas batas. Statusnya sebagai Wilayah Kecamatan dalam artian yang sama dengan fungsi wilayah kecamatan lainnya baru saja ditetapkan pada tahun 2010 sebagai Kecamatan Kepulauan Marore yang meliputi pulau Marore, pulau Kawio dan pulau Matutuang. Sebelum dimekarkan sebagai wilayah kecamatan (kepulauan Marore), sejumlah institusi pemerintahan serta keamanan seperti Pos TNI-AL, Kantor Imigrasi dan Bea Cukai, merupakan bagian dari kelengkapan institusi dalam rangka Perjanjian Lintas Batas. Begitu pula dengan hadirnya Pos Kepolisian dan Pos Koramil TNI-AD adalah bagian dari statusnya sebagai wilayah kecamatan.

Sejak tahun 2003, bergulir wacana yang intinya menganggap pulau-pulau perbatasan sebagai "pulau terdepan" dan menjadikan pulau terdepan ini menjadi beranda-depan bangsa. Gagasan tersebut mendapat legitimasi pemerintah (pusat). Awalnya dalam dokumen rancangan Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara, pemerintah menggagas konsep "beranda depan" adalah kawasan yang secara geografis berbatasan dengan negara lain dan menunjukkan gambaran tentang kondisi wilayah serta jatidiri bangsa Indonesia yang bermartabat". Persoalannya sekarang adalah bagaimana menerjemahkan gagasan "beranda depan" terhadap pulau Marore yang berhadapan langsung dengan pulau Balut dan pulau Sarangani di wilayah selatan Filipina. Dan itu bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Namun, modalitasnya adalah aspek sosial, budaya serta faktor kesejarahan yang mewarnai kehidupan serta pola mobilitas warga di daerah perbatasan kedua negara ini menarik perhatian pemerintah untuk menggagas kerjasama yang kini dikenal dengan nama Perjanjian Lintas-Batas. Dan atas dasar modalitas tersebut menjadikan pulau Marore sebagai beranda-depan yang ramah

terhadap tetangganya tinggal membutuhkan tunjangan sarana dan prasarana yang menjadi penanda sebagai bagian dari bangsa yang bermartabat dan bukan lagi pembawa permasalahan bagi negara tetangga seperti yang sudah terjadi dan akan dilihat sepintas dalam paparan berikut.

Perjanjian lintas batas telah ada sejak tahun 1956 dan hari demi hari warga setempat mulai mengetahuinya. Meskipun pemahaman awal mereka, perjanjian ini hanya untuk memulangkan warga yang telah menetap di sana sekian puluh tahun serta mengatur dan mengawasi orang yang bepergian melintasi perbatasan. Sementara aktivitas mereka di laut bersama nelayan negara tetangga yang sudah dilakoni turun-temurun seakan berada di luar jangkauan perjanjian tersebut. Begitu pula halnya kalau mereka menjual hasil tangkapan di laut kepada Kapal-kapal pengumpul dan penampung dari pelabuhan General Santos. Mereka rasionalisasi dengan cara pandang bahwa untuk menjual hasil tangkapan di kota kabupaten apalagi propinsi – seperti halnya yang dilakukan oleh nelayan yang berada di pulau-pulau paling selatan Nusa Utara – bagi mereka merupakan hal mustahil baik karena jarak tempuhnya cukup jauh, begitu pula dengan jaminan ada tidaknya pembeli serta menyangkut kualitas ikan.

Bagi penegak hukum dan pengelola negara, aktivitas para nelayan yang terjadi di kawasan perbatasan dan dipaparkan di atas dianggap sebagai tindakan *illegal*. Dan, masih banyak lagi tindakan-tindakan yang dipandang ilegal terjadi di kawasan perbatasan ini. Pitres Sombowadile, pegiat *the Satal Connection*, telah menginventarisir persoalan-persoalan yang dapat dibaca dalam tabel berikut.

Tabel 6.1 Masalah Kejahatan Lintas Negara di Daerah Perbatasan Sangihe dan Talaud

No.	Jenis Kejahatan Lintas Negara Yang Terungkap	Sangihe	Talaud	Keterangan
1.	Perdagangan Senjata masuk ke dalam Indonesia	Terjadi	Terjadi	Sumber berita media dan penanganan polisi. Terutama terungkap masa konflik Maluku, Maluku Utara dan Poso lalu
2.	Pemasukan Mata Uang Palsu/Dollar US	Terjadi	Belum ditemukan kasus	Media dan kasus di polisi
3.	<i>Illegal Fishing</i>	Terjadi	Terjadi Intens	Banyak sekali agen kapal ikan kecil milik pengusaha Filipina dioperasikan orang Sangihe dan Talaud

4.	<i>Fish Transshipment</i>	Terjadi	Terjadi	Dikuatkan oleh temuan penelitian Dr. Charles Keppel dkk.
5.	<i>Illegal Logging/ Trafficking of Products</i>	Terjadi	Terjadi	Laporan situs beberapa LSM di internet.
6.	Pemasukan Barang-barang Berbahaya (Mercury dan Sianida)	Terjadi	Belum	Media
7.	Narkoba	Terjadi	Belum	Media
8.	<i>Trafficking in Person</i>	Terjadi	Terjadi	Hasil penelitian TSC
9.	Penyelundupan Barang melanggar aturan ekspor/ import barang termasuk minuman keras	Terjadi	Belum	Perdagangan barang-barang selundupan besar-besar di Petta
10.	Penyelundupan Satwa Terlindung	Terjadi	Terjadi	Laporan beberapa situs internet
11.	Jaringan Terorisme	Terjadi	Terjadi	Menurut data International Crisis Group dan TSC

Sumber: *The Satal Connection*.

Dari sekian persoalan yang tercatat dalam tabel di atas, yang masih terjadi hingga kini adalah kasus *illegal fishing*.² Pihak Lantamal VIII di Manado mencatat sepanjang tahun 2009 telah terjadi tindak-pidana/pelanggaran yang berhasil ditangkap oleh Satuan Patroli Perbatasan Angkatan Laut di Bitung (49 kasus) maupun Lanal Tarakan (46 kasus), Lanal Nunukan (33 kasus), Lanal Toli-toli (4 kasus) dan Lanal Tahuna (7 kasus). Jika dirinci berdasarkan jenisnya, terdapat 52 kasus penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*); 29 kasus penyelundupan kayu (*illegal logging*); 37 kasus pelayaran ilegal; 8 kasus penyelundupan BBM; 10 kasus bea cukai; 2 kasus keimigrasian; dan 2 kasus penyelundupan benda-budaya. Totalnya 139 kasus. Selanjutnya, untuk periode Januari – Juni 2010, tercatat sebanyak 115 kasus. Penangkapan ikan ilegal menempati urutan pertama yakni 46 kasus; disusul penyelundupan hasil hutan 23 kasus; pelayaran ilegal 21 kasus; penyelundupan BBM 6 kasus; masalah bea cukai 6 kasus; masalah keimigrasian 7 kasus dan penyelundupan benda-budaya 2 kasus.³ Kasus-kasus di atas adalah hasil temuan selama pihak Lantamal VIII mengadakan patroli. Dan kegiatan patroli atau penjagaan laut tidaklah setiap hari.

Dari hasil temuan pihak berwajib, khususnya temuan atas pelaku penangkapan ikan ilegal, para awak kapal dan nelayan, sebagian besar adalah warga pulau-pulau

2 Hariian Komentor, Selasa, 22 Juni 2010, halaman 14, memuat berita tentang penangkapan Kapal Ikan Filipina oleh Direktorat Polisi Perairan (Polair). Berita seperti ini hampir setiap bulannya terbaca di media lokal. Mulai dari penangkapan perahu motor nelayan bertonase kecil hingga kapal motor bertonase besar. Pihak Imigrasi juga paling sering disibukkan mengurus para nelayan di karantina. Di sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan Angkatan Laut Bitung, pelabuhan Tahuna, dan pelabuhan Melonguane, perahu nelayan Filipina yang tertangkap dan terbiar membusuk sudah menjadi pemandangan yang biasa dan menjadi sampah di pelabuhan. Bagi nelayan kecil yang tertangkap, alasan yang paling sering disampaikan adalah mereka merasa masih melaut di wilayahnya. Biasanya mereka dikirim kembali ke negaranya dan kapal motornya disita oleh negara.

3 Sumber: Dokumen Lantamal VIII, Manado.

perbatasan maupun warga yang tercatat sebagai *undocumented citizen* yang berdomisili di sekitar bandar perikanan General Santos dan sekitarnya di Mindanao. Kenyataan ini disebabkan oleh adanya benturan antara pemahaman warga yang menekuni aktivitas penangkapan ikan secara turun-temurun, kerjasama antar mereka yang juga turun-temurun dengan pemahaman (hukum) negara yang masing-masing memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas – dan juga diwarisi dari bangsa penjajahnya – bahwa yang namanya melintasi batas tanpa ijin adalah “...tindakan penyelundupan dan atau bajak laut” (Lapian, 2009:162).

Warga diperbatasan yang sudah mengalami “proses pembelajaran hidup bernegara” pada saat mereka tertangkap melakukan aktivitas ilegal – terutama yang dikategorikan sebagai *illegal fishing* – sebagai satu-satunya pilihan memenuhi kebutuhan hidup mereka, ternyata memiliki pandangan yang seharusnya didengar. Harapan agar pemerintah kedua negara menjadikan “kawasan” yang dianggap sebagai perbatasan ini menjadi “ruang” dimana mereka boleh saling tukar-menukar kebutuhan, saling ketemu dan bersilaturahmi. Sudah saatnya pemerintah kedua negara merancang kebijakan di “perbatasan” untuk kemaslahatan warganegara mereka yang berada di perbatasan.⁴ Bagi mereka, perlu dibedakan antara praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh armada perikanan dari negara tetangga dan keterlibatan mereka sebagai awak atau nelayan yang ikut dalam kegiatan tersebut, dengan kegiatan mereka melaut di wilayah Indonesia dan menjual hasilnya

4 Djorina Velasco, 2007, “Fluid Boundaries: Toward a People-Centered Approach to Border Issues in North Sulawesi” dalam *Asian Transformations in Action. The Work of the 2006/2007, API Fellow*; dan, 2007, “Between Manado and Davao: How the Indonesian Island of Miangas is Making Use of its Philippines Ties” dalam: *Newsbreak 12 February 2007*. Lihat juga, Takashi Shiraishi & Alex J. Ulaen, 2004, “The Traffic Zone Reconsidered: Manado-Sangihe/Talaud-Mindanao” dalam *Dynamics Studies on the Everyday Life and Resources Management in Maritime World Wallacea*, Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.

kepada kapal-kapal pengumpul dan penampung dari Filipina. Untuk kegiatan mereka yang terakhir ini – menurut para nelayan – dapat diatasi dengan cara menyediakan pembeli atau penampung dari pihak Indonesia yang beroperasi di sekitar wilayah perbatasan. Dengan demikian, mereka dapat menjual hasil tangkapan kepada pihak perusahaan perikanan Indonesia dan bukan pihak perusahaan perikanan Filipina. Begitu pula halnya dengan keterlibatan menjadi awak perahu atau kapal-tangkap. Pilihan untuk bekerja bagi pihak Indonesia akan menjadi pilihan selama ada kapal ikan yang beroperasi di kawasan Laut Sulawesi dan sekitarnya yang bersedia menampung tenaga mereka. Dengan demikian mereka tidak perlu menjadi pendatang yang berstatus *undocumented citizen*.

Tinggal di rantau dengan status *undocumented citizen* bukan tanpa risiko. Sejak awal tahun 2000, pemerintah Filipina menggelar razia kartu identitas. Hal ini dapat dimaklumi karena sudah sejak tahun 1956, sejak disepakatinya perjanjian lintas batas, disamping program repatriasi atau memulangkan warga Sangihe dan Talaud kembali ke wilayah Indonesia atau ke kampung halamannya, juga ada program naturalisasi dan legalisasi. Program naturalisasi ditawarkan bagi mereka yang mau menjadi warga Filipina. Program naturalisasi menjadi pilihan warga terutama mereka yang kawin mawin dengan warga setempat. Sedangkan program legalisasi adalah pemberian dokumen imigrasi untuk melegalkan status tinggal mereka. Dari hasil survei yang dilakukan oleh Biro Imigrasi dan Deportasi Filipina bersama Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Davao, sebanyak 1.783 orang memilih repatriasi, 3.672 orang memilih legalisasi dan 256 orang memilih naturalisasi⁵. Pilihan program legalisasi bukanlah hal yang mudah. Warga harus membayar *alien certificate of*

5 Lihat hasil investigasi wartawan Tempo, Hanibal Wijayanta & Verianto Madjowa, "Satu Rumah Dua Paspor" dalam TEMPO, 4 Desember 2005, halaman 74.

registration (ACR) sejumlah 1.060 Peso. Jumlah yang cukup besar bagi mereka yang diupah sebesar 150 Peso sehari. Begitu pula untuk mendapatkan Surat Perjalanan Laksana Paspor, perlu mengeluarkan dana sebesar 350 Peso plus biaya perjalanan ke Davao. Untuk mendapatkan paspor, mereka harus membayar sejumlah uang yang sama dengan biaya ACR ditambah dengan biaya perjalanan dan akomodasi dari tempat tinggalnya ke Davao.

Selain persoalan kartu identitas kependudukan, ada juga perlakuan-perlakuan yang tidak adil, antara lain menjadi "kambing hitam" dari tindakan kriminal. Hasil investigasi wartawan Tempo⁶ mencatat adanya perlakuan terhadap empat warga masing-masing Oscar Makawata, Jaka Antarani, Rahman Janis, dan Jukri Latemboba yang ditangkap aparat keamanan Filipina akhir tahun 2003; dan pada tahun 2004, tiga bersaudara, Allan Panggilawan, Mark Panggilawan dan Charlito Panggilawan dan dua teman mereka Junmar Pareda dan Justinus Barahama. Mereka ditangkap di kota General Santos dan dituduh terlibat jaringan Jemaah Islamiyah atau JI. Padahal kelima remaja ini semuanya beragama Kristen. Tuduhan mana akhirnya tidak terbukti di pengadilan setempat.

Digusur dari tempat tinggal yang sudah dihuni puluhan tahun, juga merupakan pengalaman warga Nusa Utara, seperti yang dialami warga di pesisir pantai Glan. Sebagai reaksi atas penggusuran tersebut, sebagian warga bergabung dengan *New People Army* dan sebagiannya lagi bergabung dengan *Moro National Liberation Front*. Peraturan keagrariaan di sana memang tidak memberi peluang bagi yang bukan warga Filipina untuk menguasai atau membeli sebidang tanah.

6 Lihat Hanibal Wijayanta & Verianto Madjowa, "Perantau dari Nusa Utara" dalam TEMPO, 4 Desember 2005, halaman 71.

Hal ini pula yang mendorong sejumlah warga – keturunan perkawinan antara warga Nusa Utara dengan warga setempat – untuk memilih program naturalisasi, agar warisan ibu atau ayah mereka yang Filipina dapat dipertahankan. Peraturan ini pula yang menjadi penyebab mengapa para pemilik perkebunan kelapa yang mempekerjakan warga Nusa Utara sebagai pemanjat kelapa di perkebunan mereka membolehkan mereka tinggal dan menetap di areal perkebunan. Berbeda halnya jika mereka mengizinkan warga Filipina tinggal di areal tersebut, warga Filipina yang menumpang atas tanahnya setelah menetap setahun atau lebih boleh mengklaim tanah tersebut menjadi miliknya. Hal yang tidak mungkin dilakukan oleh warga Nusa Utara di sana.

Perlakuan diskriminatif lainnya adalah dalam hal pemberian upah. Untuk jenis pekerjaan yang sama, warga tidak mendapat upah yang sama dengan warganegara Filipina. upah rata-rata bagi pekerja kasar warga Nusa Utara dalam sehari, sebesar 150 Peso atau setara dengan Rp. 27.000,- Meskipun demikian, pilihan warga Marore mencari pekerjaan di wilayah Filipina menjadi pilihan utama dibandingkan dengan mencari pekerjaan di wilayah Indonesia. Jaminan untuk mendapat pekerjaan lebih terbuka di sana (Filipina) dibandingkan dengan di Manado, apalagi di Tahuna.

Gagasan menjadikan pulau Marore sebagai “beranda depan”, menjadi etalase untuk memajang potret “kondisi wilayah serta jatidiri bangsa yang bermartabat”, sepertinya bukanlah pekerjaan yang mudah karena citra warga Nusa Utara yang berada di wilayah Filipina seperti yang sudah dipaparkan di atas dengan berbagai stigma, seperti *undocumented citizen*, dicurigai sebagai pelaku tindak kriminal, tidak adanya perlindungan dalam diskriminasi pemberian pekerjaan dan sistem pengupahan, dan warga yang masuk pada kategori “miskin”. Keberadaan warga tersebut lebih disoroti ketimbang warga yang sukses seperti

halnya Alexander Wangkay alias Sander Khan, anak seorang karyawan sebuah toko di pulau Sarangani namun berhasil menjadi penyanyi dan terpilih selama dua periode sebagai Walikota Jose Abad Santos.

Perjanjian lintas batas yang mensyaratkan para pelintas batas memiliki dokumen sedikitnya sudah mulai membangun citra bahwa warga Nusa Utara bukanlah pelintas-batas ilegal. Mereka yang hingga kini terjebak dalam status *undocumented citizen* adalah sebuah tinggalan sejarah ketika kawasan ini masih merupakan ruang-jejaring niaga di mana warga Nusa Utara menjalankan tradisi *badaseng* dan pulau Balut, pulau Sarangani maupun daratan Mindanao adalah *tana labo* tempat di mana mereka bebas *badaseng*, karena di sana ada kerabat, saudara yang dipertalikan oleh silsilah dan tarsilas.

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat adalah menjamin hak mereka sebagai warganegara. "... kami di sini hanya dicari kalau di Indonesia ada Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden", ungkap Nendey Tahulending (63 tahun) kepada penulis sewaktu berkunjung ke pulau Balut, tahun 2003. Pada saat seperti itu, mereka diakui sebagai warganegara Indonesia. Setelah hajatan pemilu dan pilpres usai, keberadaan mereka pun terhapus dari ingatan. Pihak Konsulat Jenderal Indonesia di Davao mempunyai program legalisasi kewarganegaraan sebagai upaya melindungi hak warga. Tetapi dananya sangat terbatas. Padahal, untuk menjangkau warga yang tersebar luas di pelosok pesisir Mindanao, pulau Balut dan pulau Sarangani memerlukan biaya sekitar satu sampai dua milyar Rupiah. Biaya yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan pengeluaran kampanye seorang calon bupati di Nusa Utara. Jumlah petugas penghubungnya pun terbatas. Hanya dua belas orang. Upaya yang dapat dilakukan adalah menjadikan momen pencatatan daftar calon pemilih pada Pemilu maupun Pilpres sebagai kesempatan melegalisasi status mereka. Dengan demikian

ketika mereka menjalankan haknya sebagai warganegara yang menjatuhkan pilihan baik pada partai maupun calon presiden, status mereka sebagai warganegara juga sah.

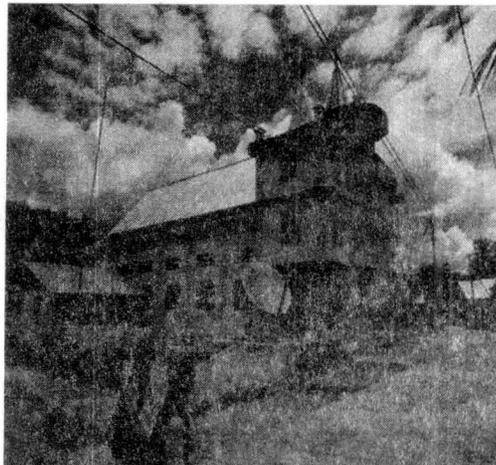
Status pulau Marore sebagai salah satu titik atau pelabuhan *check point* dalam perjanjian lintas batas sebenarnya dapat difungsikan sebagai “beranda depan” yang dapat memperbaiki citra warga Nusa Utara di tanah seberang sebagaimana dipaparkan secara singkat di atas.

6.2 Menjembatani keterisolasian

Sepertinya kontradiksi kalau membicarakan faktor keterisolasian pulau Marore karena beberapa tulisan – dan juga dalam tulisan ini – meletakkan posisi pulau Marore pada jalur atau lintasan niaga. Geografis, pulau Marore dapat dilihat sebagai sebuah pulau yang terisolir. Di sisi lain, pulau Marore menjadi lintasan niaga, pulau yang menjadi panduan alami bagi para pelaut sejak dua kapal sisa armada Ferdinand Magellan melintasi gugusan Nusa Utara dan Pigafetta merekam Marore dengan sebutan *Cheava* disamping *Chaviao* untuk pulau Kawio dan *Cabiao* untuk pulau Kemboleng⁷. Namun, para peniaga dan pelaut yang melintasi gugusan pulau ini bukanlah sebuah *itinerary* yang terjadwal baku. Sehingga, pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Perhubungan Laut menempatkan pulau Marore sebagai salah satu pelabuhan di daerah perbatasan yang harus disinggahi dalam jalur pelayaran perintis. Dalam perspektif “dunia maya” warga Marore termasuk pada kriteria terisolasi. Keterisolasian yang mulai dibuka oleh PT Telkomsel dengan menghadirkan fasilitas telekomunikasi.

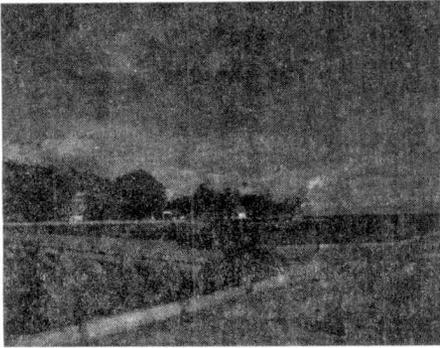
7 Lihat Ulaen, 2003:32-33.

Gambar 6.2 Fasilitas Telekomunikasi Telkomsel di pulau



Sejak tahun 1987, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menerapkan jaringan pelayaran perintis, menjangkau pulau-pulau terisolir. Di wilayah kerja Kantor Wilayah Perhubungan Propinsi Sulawesi Utara, awalnya dioperasikan dua buah "kapal perintis" dari pelabuhan Bitung berlayar ke kepulauan Sangihe dan Talaud. Salah satu pelabuhan yang dituju adalah pulau Marore dan Miangas di perbatasan. Bersamaan dengan program pelayaran perintis, pemerintah membangun fasilitas dermaga, serta menempatkan petugasnya yang mengelola penggunaan dermaga dan penjaga lampu suar. Jaringan pelayaran tersebut hingga kini masih terjadwal dan bahkan kapal yang dijadwalkan menghubungkan pelabuhan-pelabuhan kecil ini semuanya empat buah. Selain itu, sejak bulan Agustus 2012, km Sangiang yang sebelumnya melayari route Bitung hingga Miangas, kini telah menyinggahi pelabuhan Marore.

Gambar 6.3 Dermaga Pulau Marore dan Lampu suar di atas bukit



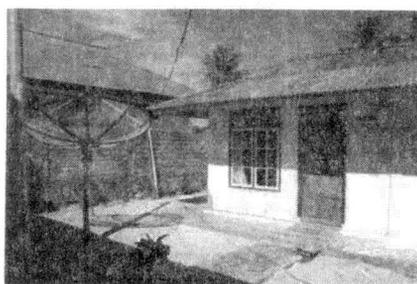
Jadwal pelayaran perintis maupun km Sangiang milik PT Pelni ini tidak selalu berlayar sesuai jadwal. Jika pembatalan pelayaran disebabkan oleh keadaan cuaca yang membahayakan pelayaran, hal seperti itu dapat dipahami warga pulau Marore. Keluhan warga Marore tersebut juga dialami tim peneliti. Tanpa sebab yang jelas, pada tanggal 19 Oktober 2012, km Sangiang membatalkan pelayarannya. Kapal-kapal perintis juga sering membatalkan pelayarannya bukan karena alasan cuaca tetapi alasan teknis seperti kerusakan mesin. Masih pada bulan Oktober, km Daya Sakti yang seharusnya melayari route ini harus berlabuh di pelabuhan Tahuna untuk memperbaiki mesinnya. Meskipun sudah dipoles dengan cat baru, menurut keterangan seorang pelaut⁸ yang membawa tim peneliti ke pulau Marore dengan kapal motornya menjelaskan bahwa kapal-kapal yang terpilih menjadi kapal perintis seharusnya sudah jadi “besi tua”. Sebagai seorang pelaut yang memiliki ijazah mualim pelayaran terbatas, ia mengaku merasa lebih aman menakhodai kapal kayu yang bertonase kecil tetapi kondisi kapalnya atau perahu dan mesin masih layak digunakan untuk berlayar. Ia sendiri

8 Keterangan dari Nakhoda km Kawaluso yang ditumpangi Tim Peneliti dari Tahuna ke Miangas,

pernah ditawarkan menjadi mualim di salah satu kapal perintis. Setelah melihat keadaan kapal, ia memilih untuk menolak tawaran itu. Baginya, tanggung jawab menjaga keselamatan penumpang adalah pilihan yang sudah dia jalani puluhan tahun. Nakhoda yang sudah uzur dan pensiun dari salah satu perusahaan pelayaran itu menuturkan bahwa “orang darat”, maksudnya pengelola usaha pelayaran yang berkantor di darat banyak yang tidak paham soal laut dan meremehkan nasib penumpang termasuk ABK (anak buah kapal). Nakhoda yang sudah makan garam pelayaran ini mengemukakan gagasannya bahwa terlalu banyak uang pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai operasi pelayaran di kawasan ini tetapi tidak tepat sasaran. Ambil contoh, PT Pelni yang mengoperasikan km Sangiang. Hasil penjualan tiket tidak ada artinya jika dibandingkan dengan biaya operasi kapal. Begitu pula halnya dengan kapal perintis. Cara yang hemat tetapi efisien adalah mengoperasikan kapal motor bertonase kecil tetapi frekuensi pelayarannya lebih tinggi dengan selang waktu setiap dua hari sebuah pelabuhan dikunjungi oleh kapal kecil yang menghubungkannya dengan pelabuhan utama di daerah ini, yaitu pelabuhan Tahuna atau Petta. Dari pelabuhan Tahuna, penumpang dapat melanjutkan pelayaran dengan kapal-kapal reguler yang berangkat setiap hari ke Manado. Soal cuaca yang tidak bersahabat, ia mengatakan apa bedanya, kalau kapal perintis juga harus berlindung dan batal berlayar. Kalau kapal motor yang dioperasikan oleh PT Pelni, untuk berlindung memerlukan pelabuhan berdermaga, lain lagi dengan kapal motor kecil yang dapat berlabuh sekaligus berlindung di pelabuhan-pelabuhan desa yang tersebar di pesisir pulau. Sang nakhoda tua mungkin juga benar gagasannya, tetapi, sekali lagi ia mengatakan bahwa tokh yang menentukan adalah “orang darat” yang kurang paham soal laut.

Ditemukannya sejumlah rumah – terutama rumah dinas dan rumah pegawai negeri sipil – yang memiliki fasilitas parabola, dapat dipahami sebagai pertanda bahwa warga Marore tidak terisolir dari sisi dunia maya. Satu saat, dari rumah warga terdengar siaran radio berbahasa Sangehe. Setelah diusut, siaran itu bukan dari stasiun radio pemerintah atau swasta di Tahuna dan sekitarnya. Itu adalah siaran Radio DXCP dengan gelombang 95,5 AM. Stasiunnya di kota General Santos. Pengelolanya Heinrich Wolff. Bukan seorang pria berkebangsaan Jerman atau Austria atau Swiss, jika menilik namanya. Dia adalah putra Nusa Utara dengan kulit pekat dan rambut agak keriting, ciri khas warga Nusa Utara. Ada program “anda mendengar kami meminta”, ada program layanan rohani-keagamaan; ada juga berita-berita suka dan terutama duka di kalangan warga nelayan. Radio ini semula menjadi alat komunikasi bagi 923 orang nelayan warga Nusa Utara. Sebagai Ketua Himpunan Nelayan Indonesia di kota General Santos, Heinrich Wolff, mendapatkan bantuan dari salah satu lembaga NGO di Eropa. Stasiun radio ini beroperasi sejak awal tahun 2000, dengan kemampuan jangkauan hingga Maluku Utara, pesisir utara Sulawesi dan kepulauan Nusa Utara, lokasi para nelayan melaut. Ini menjadi pertanda bahwa warga Marore lebih akrab dengan kerabatnya di tanah seberang dibandingkan dengan mereka yang menetap di ibukota kabupatennya sendiri.

Gambar 6.4 Fasilitas Parabola di rumah-rumah dinas dan rumah warga



Keterisolasian lain tampak pada sulitnya mendapatkan media cetak baik yang diterbitkan di ibukota propinsi maupun media cetak nasional. Keterbatasan baik media cetak maupun audio-visual di kalangan warga menempatkan saluran berita model *mouth to mouth* atau dari mulut ke mulut menjadi pilihan. Setiap sore, ada sebuah warung makan yang menyediakan makanan ringan terutama mie. Di tempat seperti inilah informasi dari mulut ke mulut diperoleh. Tempat kedua yang teramati adalah naungan pohon rindang dekat dermaga. Di tempat ini, setiap sore para petugas imigrasi dan bea cukai dari Filipina membaur dengan warga. Lokasinya memang berada di belakang rumah yang menjadi tempat tinggal sekaligus stasiun lintas batas pihak Filipina. "...Itu ruang kelas saya belajar bahasa Indonesia dan *beran Sangihe*" (bicara bahasa Sangihe), ungkap Mr. Bruce kepada peneliti (20-10-2012). Nyatanya, kemampuan berbahasa Indonesia yang dia miliki terbilang baik dan komunikatif bagi seorang warga asing yang belum lama bertugas di Indonesia.

Berbicara soal keterisolasian pulau Marore dan pulau-pulau lainnya di wilayah perbatasan akan terasa subyektif jika hanya mendasarkan keterangan warga yang menjadi informan serta narasumber, atau keterangan peneliti yang datang selama dua minggu. Tidak ada salahnya jika mengutip kesaksian seorang guru yang berasal dari ibukota (Jakarta) peserta program Indonesia mengajar yang ditempatkan di pulau Kawio pulau yang tepat berada di depan pelabuhan Marore, berikut ini:

".... saya pun terkadang harus meninggalkan pulau (Kawio) untuk urusan koordinasi dengan pengajar muda lain satu penempatan atau sakit (baca malaria). Jadwal kapal yang juga tidak menentu kadang juga membuat orang yang sudah keluar pulau, butuh waktu yang lama untuk kembali (biasanya 5 – 14 hari). Jadi jika masih dalam

kurun waktu yang demikian, masih dalam batas yang dapat dimaklumi. Namun, bagaimana jika seorang guru keluar pulau lebih dari tiga minggu (bahkan bisa sampai tiga bulan)?” (Jessica Hutting, 2012:34)

Itulah kesaksian Jessica Hutting, pengajar muda yang ditempatkan di pulau Kawio, dalam tulisannya berjudul: Para Ujung Tombak Pendidikan⁹. Tamatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2005), Jurusan Komunikasi ini bisa merasakan bagaimana perilaku tepat waktu dan disiplin harus dikalahkan oleh ketidak-tepatan jadwal kapal. Di sisi lain, Jessica memaparkan bagaimana temuannya atas tindakan para guru yang telah meninggalkan kelas dalam waktu relatif lama dan menebus pelajaran sehingga siswa tidak merasa dibiarkan. Mereka ditinggalkan tetapi tidak dibiarkan.

Keterisolasian geografis serta kedekatan dengan negara tetangga lewat pengalaman berkunjung ke tanah seberang, mendengar berita siaran stasiun radio DXCP dengan gelombang 95,5 AM dari kota General Santos dalam siaran dengan bahasa yang akrab di telinga pendengarnya, yaitu bahasa ibu mereka, maupun siaran-siaran televisi dari negara tetangga tanpa disadari telah membuat mereka lebih “berjarak” secara sosial dan budaya dengan komunitas bangsanya sendiri. Meminjam konsep Redfield, *great tradition* versus *little tradition* menumbuhkan angan warga sebagai “tradisi kecil” yang melihat tradisi-tradisi besar itu ada dan hadir di tanah seberang, dan bukan di negaranya sendiri.

9 Lihat Indonesia Mengajar 2, Kisah Para Penyala Harapan Bangsa Mengajar di Pelosok Tanah Air, Karya Pengajar Muda Angkatan II, disunting oleh Ikhdah Henny & Retno Widayastuti, diterbitkan oleh Penerbit Bentang, Juni 2012, halaman 31 – 37.

6.3 Kehadiran Proyek: Rejeki Tambahan

Telah dikemukakan dalam bab II secara singkat tentang mata pencaharian penduduk yang mayoritas adalah nelayan. Kegiatan bercocok tanam dalam arti sesungguhnya sulit dijumpai. Ada lahan yang ditanami dengan sayur-mayur lokal dan ketela pohon. Ada pula yang ditanami talas. Tetapi semua tanaman itu menjadi tanaman sela di antara pohon kelapa. Struktur tanah didominasi oleh bebatuan membuat warga tidak terlalu mengandalkan cara bercocok tanam. Bahan makanan lebih banyak di datangkan dari luar. Baik itu dari pulau Balut dan pulau Sarangani maupun dari pulau Sangir Besar dan Manado. Jenis sayur-sayuran, tomat dan bawang kelihatan sekali berasal dari Manado.

Gambar 6.5 Sayur, tomat dan bawang yang dipajang di salah satu warung di Marore

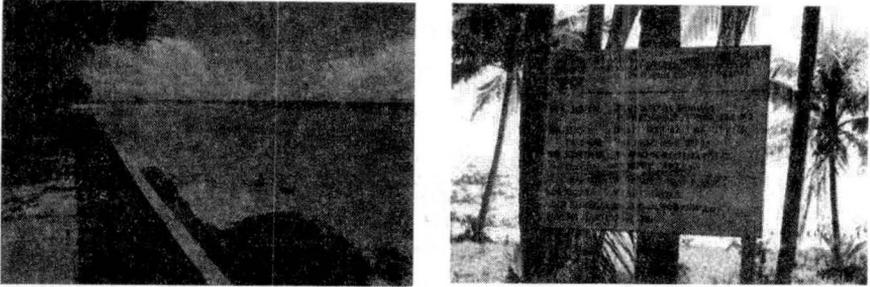


Kopra merupakan andalan warga untuk mendapatkan uang tunai. Namun, tidak semua warga memiliki kebun kelapa. Kalau tokh mereka memilikinya, jumlahnya hanya puluhan pohon, dan itu hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dijadikan minyak kelapa dan santan untuk makanan.

Kehadiran proyek-proyek pembangunan merupakan peluang mendapatkan uang bagi warga. Pada saat penelitian

lapangan ini dilaksanakan, ada empat kegiatan proyek yang sedang dikerjakan. Proyek pertama adalah perbaikan dan penambahan panjang dermaga di dermaga utama. Proyek kedua, pemancangan tiang dermaga penyeberangan atau dermaga kapal ferry di sisi timur pulau Marore. Proyek ketiga, pemasangan pipa air bersih, dan proyek keempat adalah proyek PNPM berupa pembuatan beton jalan desa. Empat buah proyek tersebut memberi peluang bagi warga yang memiliki lahan di sekitar lokasi proyek dan meminjamkan lahannya sebagai tempat penimbunan bahan bangunan dengan imbalan. Selain itu membuka kesempatan bagi warga menjadi tenaga kerja harian di proyek-proyek tersebut, menyediakan bahan-bahan bangunan terutama pasir dan batu alam. Jenis bebatuan di pulau Marore memang memenuhi persyaratan untuk konstruksi beton. Warga menyediakan batu dan batu pecah yang dihargai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) untuk setiap meter kubik. Di beberapa tempat kelihatan warga, baik kaum pria maupun wanita – dengan peralatan sederhana – menekuni kegiatan memecah batu dengan peralatan sederhana. Ada juga ibu-ibu yang menyediakan kue dan jajanan lain seperti pisang goreng untuk para pekerja proyek tersebut. Sebenarnya, ada juga proyek lainnya di Marore, seperti renovasi bangunan sekolah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan dana Bantuan Operasional Sekolah. Hanya saja selain bahan yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut tidak membutuhkan material dari lingkungan alam seperti pasir dan batu, juga nilainya agak kecil dibandingkan dengan empat buah proyek di atas.

Gambar 6.6 Proyek Pembangunan Dermaga alternatif di sisi timur pulau Marore



Gambar 6.7 Aktivitas warga menghancurkan batu untuk proyek dermaga penyeberangan

Air bersih merupakan salah satu kebutuhan warga pulau-pulau kecil di perbatasan termasuk warga Marore. Untuk mendapatkan suplai air minum dan mandi, warga membangun bak-bak beton disamping rumah untuk menampung air hujan. Bak penampungan air hujan seakan sudah menjadi bagian dari setiap rumah, termasuk rumah dinas Kecamatan, tempat di mana tim peneliti diinapkan oleh pemerintah setempat. Sewaktu penelitian lapangan dilakukan, ada proyek penyediaan air bersih. Sebelumnya sudah ada sumur yang

yang sudah menetap di kota-kota tersebut. Begitu pula halnya dengan adanya proyek-proyek pembangunan di wilayah negara tetangga (Filipina), menjadi daya tarik tersendiri.

6.4 *"The Islanders in between"* dan menjadi Indonesia: Tantangan Pendidikan

Tahun 1997, dalam sebuah seminar internasional yang diselenggarakan di Unsrat Manado, 23 - 26 September, dibacakan sebuah makalah berjudul: *Smugglers to Pedlars in the Sangihe and Talaud: "The Islanders in Between" (A Preliminary Study)* yang ditulis oleh Hoetagaol & Ulaen¹⁰. Judul makalah ini menarik karena membahas kegiatan pelaku penyelundupan di perbatasan Indonesia - Filipina pada awal-awal pelaksanaan perjanjian lintas batas yang lambat laun beralih menjadi menjadi pedagang antar negara dalam jumlah yang kecil. Hal menarik adalah sub-judul yang mereka gunakan yaitu *"the islanders in between"*, ditandai oleh faktor bahasa, kekerabatan, mobilitas penduduk, dan peradaban yang berbasis agama. Status sebagai *the islanders in between* tidak semata disebabkan oleh karena mereka berdiam di pulau yang memang berada di antara dua negara, tetapi lebih pada makna sosial budaya. Hasil atau produk dari perjalanan sejarah kedua bangsa di mana pulau Marore, pulau Balut dan pulau Sarangani dan bahkan sebagian dari pesisir selatan Mindanao dihuni oleh warga yang masuk pada kategori *the islanders in between*. Jadi bukan hanya stigma yang dapat diberlakukan pada warga Marore, tetapi juga warga Filipina yang bermukim di pulau Balut, pulau Sarangani dan pesisir selatan Mindanao, di tengah-tengah warga komunitas etnis Sangil yang berbahasa

10 Lihat Sophia Ulaen-Hoetagaol & Alex J. Ulaen, *Smugglers to Pedlars in the Sangihe and Talaud: "The Islanders in Between" (A Preliminary Study)* dibacakan di *International Seminar on Maritime Communities in Changing World: Challenges of Development Programmes, The Cooperation between Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University and Sam Ratulangi University Manado*.

Sangir dan warga Nusa Utara di sana. Berada di antara dua peradaban negara atau dua budaya politik dan dalam artian budaya-bangsa. Penanda kategori ini tampak dalam gaya hidup, mulai dari penggunaan kata-kata dalam bahasa tutur, gaya berpakaian, pola makan-minum, dan sebagainya.

Unsur artefak budaya penanda kategori ini tampak pada penggunaan *pambut*. Nelayan warga Marore adalah kelompok nelayan yang menjadi "agen perubahan" dan pelopor penggunaan sampan bercadik model *pambut* yang kini merebak digunakan oleh hampir seluruh nelayan warga komunitas etnis Nusa Utara yang tersebar di wilayah kepulauan Nusa Utara, Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Sebaran jenis sampan bercadik baik ukuran *pambut* maupun *fuso* meliputi seluruh wilayah kepulauan Filipina dan di luar itu, di kepulauan Sangihe dan Talaud, pesisir utara Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Selain itu, dapat dikemukakan sejumlah artefak penanda kategori ini sehingga bila seseorang yang bukan warga Marore berada di pantai pulau Marore akan merasakan sesuatu yang lain hadir mengelilingi dirinya.

Dalam hal gaya hidup, pilihan warga Marore bekerja baik sebagai pemanjat kelapa, tukang pikul, penjaga gudang, buruh nelayan serta aneka pekerjaan kasar lainnya di wilayah Filipina dengan upah yang rendah jika dibandingkan dengan pekerjaan serupa di tanah air adalah persoalan gaya hidup berkaitan dengan pola makan dan minum. Menikmati makan siang di *barangay* atau warung makan yang ada di pasar setiap pemukiman atau *barangay*, sambil menikmati coca cola, serta beragam jenis bir seperti Red Horse, dan minuman beralkohol seperti Generoso dan Tanduay, harganya terjangkau oleh pendapatan mereka sehari meskipun diupah dengan rendah. Kebiasaan yang tidak mungkin mereka dapatkan ketika bekerja di wilayah Indonesia. Selain harga jenis minuman seperti itu tidak terjangkau, stigma warga Nusa Utara sebagai peminum dan pemabuk akan mereka terima dan akibatnya

mereka dikucilkan dari pergaulan sehari-hari. Sementara di negara tetangga kebiasaan makan dan minum di *barangay* adalah sesuatu yang wajar selama ia tidak mengganggu keamanan sekitarnya. Tidak akan ada stigma peminum atau pemabuk.

Persoalan gaya hidup yang berkaitan dengan status sosial juga menjadi pertimbangan bagi *the islanders in between*. Baik di kepulauan Sangihe dan Talaud maupun di kota Manado dan kota Bitung, ragam status sosial komunitas etnis Nusa Utara khususnya warga Marore lebih beragam. Mulai dari pekerja dan buruh kasar sampai pejabat, dari penjaga keamanan (Satpam) sampai rohaniwan. Keragaman seperti ini menghadirkan warga komunitas etnis Nusa Utara khususnya Marore yang setiap pagi dan sore hari berjalan kaki mengenakan sandal jepit menyandang ransel berisikan peralatan tukang kayu menuju proyek bangunan; atau yang berseragam Satpam bersepatu dengan potongan rambut pendek dan muka yang agak seram menuju tempat kerjanya; atau anggota warga Marore yang berpakaian seragam PNS, yang kesemuanya membuat jarak antara seorang dengan lainnya. Hal seperti itu juga teramati di Marore. Staf kelurahan yang menyandang pakaian dinas menjadi makhluk yang berbeda dengan saudaranya nelayan yang berjalan hanya dengan celana pendek dan kaus oblong. Lain lagi halnya dengan di tanah seberang yang umumnya warga Marore dan Nusa Utara di sana mayoritas profesinya adalah nelayan, buruh kasar, pemanjat kelapa, penjaga gudang, dan aneka pekerjaan kasar lainnya. Hampir tidak ada pembeda-tegas dan status sosial yang memisah-bedakan mereka. Satu-satunya tokoh pemimpin informal adalah rohaniwan baik Kristen maupun Islam.

Di tanah seberang, meskipun mereka dapat bergaul akrab dengan penduduk setempat baik dari komunitas etnis Sangil maupun etnis-etnis lainnya, mampu berkomunikasi

dengan menggunakan bahasa Visaya dan Tagalog, makan bersama di *barangay*, namun mereka tetap merasa sebagai “perantau-perantau Nusa Utara”. Perasaan seperti itu bahkan mendasari pengambilan keputusan-keputusan penting dalam kehidupan. Investigasi wartawan Tempo, mencatat keberadaan sejumlah keluarga yang tetap mempertahankan statusnya sebagai warga Marore meskipun sudah menikah dengan warga setempat. “Satu rumah dua paspor”¹¹ mengisahkan pengalaman Virginia Gampamole yang memilih untuk menjadi warganegara Filipina sedangkan suaminya Mathius Landia tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia meskipun ia termasuk pada kelompok *undocumented citizen*. Pasangan suami istri ini bukanlah satu-satunya warga yang “satu rumah dua paspor”.

Fenomena *the islanders in between* seperti ini setidaknya menuntut pendekatan-pendekatan khusus yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah setempat, tokoh-tokoh pendidikan dan tokoh agama serta tokoh masyarakat jika status pulau Marore sebagai “beranda depan” bangsa dan etalase jatidiri bangsa. Bagaimana merancang “rekayasa sosial” sehingga ketika di wilayah tanah air, mereka memiliki “ingatan bersama” atau “*collective memory*” serta “mengangankan dirinya” sebagai bagian dari bangsa ini, sementara ketika berada di tanah seberang, mereka akan hadir sebagai duta-duta rakyat (bangsa) yang bermartabat. Datang sebagai pencari kerja yang profesional dan sebagainya, sama halnya dengan Oma Nendey Tahulending yang tetap berjualan nasi jaha atau lemag. Di usianya yang sudah enam-puluhan, hidup dari pendapatan berjualan nasi jaha yang hanya cukup untuk biaya makan setiap hari, tetapi tetap mempunyai mimpi untuk kembali ke kampung halamannya di Tabukan Utara¹².

11 Lihat Tempo, 4 Desember 2005, Satu Rumah dua Paspor. Halaman 74.

12 Lihat Tempo, 4 Desember 2005, Perantau dari Nusa Utara. halaman 72.

Status pulau Marore sebagai “beranda depan” tidak hanya sekedar wacana yang berkembang di kalangan awam dan beredar dari mulut ke mulut atau merupakan percakapan di warung kopi.

Kebijakan Pemerintah Pusat menjadikan pulau-pulau terluar ini sebagai “beranda depan” tertuang dalam dokumen yang masih bersifat draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Beranda depan dipahami sebagai “... kawasan yang secara geografis berbatasan dengan negara lain dan menunjukkan gambaran tentang kondisi wilayah serta jatidiri bangsa Indonesia yang bermartabat.” Pada bab 26 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, tercantum kegiatan-kegiatan pokok yang berhubungan dengan pembangunan wilayah perbatasan dalam hal ini pulau Marore salah satu di antaranya, meliputi:

1. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain, penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan seperti: pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), *public service obligation* (PSO) dan keberintisan untuk transportasi, penerapan *universal service obligation* (USO) untuk telekomunikasi, program listrik masuk desa;
2. Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, termasuk hasil hutan (*illegal logging*) dan perdagangan manusia (*human trafficking*). Namun demikian perlu pula diupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang secara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan;

3. Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara. Selain dari pada itu, perlu pula dilakukan pengembangan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan;
4. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan. (PerPres No. 7/2002, IV. 26-7)

Proyek-proyek pembangunan yang teramati sewaktu kerja lapangan di Marore menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok yang dirumuskan di atas telah hadir di sana. Misalnya fasilitas yang berhubungan dengan “... *public service obligation* (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, penerapan *universal service obligation* (USO) untuk telekomunikasi, dan program listrik masuk desa..”. Begitu pula halnya dengan “... fasilitas kepabeanan, keimigrasian, serta keamanan dan pertahanan..” yang telah ada dan merupakan bagian dari adanya Perjanjian Lintas Batas antara dua negara. Program yang nampak adalah “... peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara..”. Padahal, dalam realita keseharian, warga nelayan di sana telah terbiasa melakukan kerjasama dengan nelayan dari negara tetangga seperti sudah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya. Hal yang mendesak untuk dilakukan adalah “.... peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat..”

Khusus tentang peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat, yang perlu dilakukan bukanlah kegiatan semacam penerangan tentang ideologi negara, penataran-penataran atau

juga simulasi-simulasi seperti yang sudah dilakukan semasa Orde Baru. Suasana sosial budaya warga dengan mudah menjadi ranah tumbuh-kembangnya wawasan kebangsaan ketika mereka merasa diperlakukan sebagai warga bangsa lewat program dan proyek pembangunan di wilayahnya. Karena gambaran tentang sejarah bangsa, pengetahuan mengenai ideologi negara terutama sila-sila yang ada dalam Pancasila, telah mereka peroleh dan bahkan mereka hafal kata per kata semenjak mereka menamatkan pelajarannya pada tingkat Sekolah Dasar, apalagi Sekolah Menengah Pertama dan Menengah Atas yang ada di kampung halamannya di Marore. Simbol-simbol ideologi negara juga terpampang di berbagai monumen Pancasila yang ada di kampungnya, atau terpampang di dinding kantor desa dan dapat mereka baca kembali. Persoalannya sekarang adalah, bagaimana implementasi setiap sila, setiap ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945, (Negara) yang dapat mereka rasakan langsung dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Catatan di atas semata didasarkan pada hasil-hasil percakapan dengan warga Marore yang tampak dari penampilannya begitu lugu dan seakan-akan warga yang tidak tahu apa-apa, tetapi ternyata mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas jika dibandingkan dengan warga Nusa Utara di tempat lainnya. Kenyataan itu dapat dipahami karena dengan tingkat mobilitas yang tinggi dan sering ke tanah seberang, mereka mempunyai pengalaman perbandingan yang menjadikannya lebih kritis.

Sering terungkap dalam percakapan dengan mereka soal sikap-sikap aparat kita terhadap mereka ketika ketemu melaut demi alasan penegakan hukum serta peraturan, dan mereka perbandingan dengan sikap aparat keamanan di tanah seberang. Bagi mereka penegakan supremasi hukum bagi setiap pelanggaran di laut, soal Hak Azasi Manusia, bukanlah hafalan yang harus didengar dari mulut penceramah, tetapi

hal-hal yang praktis dalam keseharian mereka ketika melaut dan *badaseng* di wilayah negara ini.

6.5 Catatan Akhir dan Saran

Kajian tentang “daerah perbatasan” dalam dua dekade terakhir banyak menarik perhatian para akademisi baik dalam maupun luar negeri. Para akademisi yang berprofesi sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta terbilang yang paling banyak menekuni kajian dan menulis tentang perbatasan; selain itu terbaca pula publikasi dari peneliti yang bernaung di lembaga-lembaga penelitian di berbagai departemen (sekarang Kementerian) dan Universitas. Hampir semua daerah perbatasan darat, seperti perbatasan darat antara Indonesia – Malaysia di Kalimantan Utara; perbatasan darat antara Irian Jaya dan Papua New Guinea; perbatasan propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste; dan perbatasan laut antara Riau dan Singapura; serta perbatasan laut Indonesia dan Filipina.

Tentang perbatasan laut Indonesia dan Filipina, dapat dijumpai beberapa publikasi menarik dalam bidang kesejarahan, seperti “Orang Laut – Bajak Laut – Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX” (Lapian, 2009); “Sejarah Wilayah Perbatasan Miangas – Filipina, 1928 – 2010: Dua Nama Satu Juragan” (Ulaen, dkk., 2011, 2012); hasil kajian sosiologis seperti “Migrasi Kembali Orang Sangir Talaud Dari Pulau-Pulau Di Wilayah Filipina” (Raharto, dkk., 1993); “Return Migration Among the Sangirese: Life and Adjustment in the Homeland” (Raharto, 2000); hasil kajian etnohistori seperti “Mindanao Ethnohistory Beyond Nations, Maguindanao, Sangir, And Bagobo Societies In East Maritime Southeast Asia” (Hayase, 2007); kajian antropologis seperti: “Navigating the Indonesia-Philippine Border: The Challenges of Life in the Borderzone” (Velasco, 2010); “Migrations Across the Sulawesi Sea” (Tan-Culamar, 1998).

Meskipun beberapa di antara publikasi tersebut menyebut nama pulau Marore, namun belum ditemukan kajian khusus tentang pulau Marore secara mendalam. Tulisan ini berupaya menampilkan beberapa aspek sosial dan budaya dari warga pulau Marore secara khusus maupun warga Nusa Utara, sebagai pendukung tradisi bahari. pada bagian awal atau bab pendahuluan, tulisan ini membahas sejumlah kajian terdahulu yang menaruh perhatian terhadap masalah perbatasan maupun secara khusus tentang warga Nusa Utara di mana warga Marore merupakan bagiannya.

Berdasarkan hasil kajian pustaka, untuk mengidentifikasi Marore dalam artian pulau, latar historis dan warganya, diperlukan informasi-informasi kartografis, historis, dan antropologis. Informasi kartografis dimaksud untuk memberi gambaran bahwa sebenarnya pulau dan gugusan pulau yang kini dipandang terisolir, dahulu justru lebih dikenal di kalangan pelaut dan penjelajah alam bangsa Barat, sehingga dalam berbagai peta kuno, telah tercantum dibandingkan dengan pulau dan tempat di bagian lainnya di Nusantara dan bahkan di pulau Sulawesi. Informasi-informasi kesejarahan akan memberi penjelasan bahwa kawasan di mana pulau Marore dan Nusa Utara pada umumnya, pada masa lampau adalah sebuah satuan atau dalam tulisan ini dilukiskan sebagai sebuah "ruang-jejaring niaga" yang menampakkan adanya peradaban Melayu. Kawasan yang secara geografis lebih luas laut dari daratan ini kemudian terpisah dua setelah kehadiran kekuatan politik bangsa barat. Informasi kesejarahan baik dalam skala kecil yaitu entitas Nusa Utara maupun dalam "peta kesejarahan" Nusantara dimaksud agar tercapainya pemahaman bahwa dalam skala kecil, terutama pembagian wilayah kecamatan (sebelumnya) pulau Marore terpisah dari pulau Kawio yang berada dekat. Hal ini karena adanya pemilahan wilayah kerajaan-kerajaan yang pernah ada yaitu kerajaan Kendahe (Kandahar) di sebelah barat dan wilayahnya

mencakup pulau-pulau di utara termasuk di dalamnya pulau Kawio, dan kerajaan Tabukan yang juga wilayahnya mencakup pulau-pulau kecil di bagian utara termasuk pulau Marore. Adanya perjanjian antara kerajaan-kerajaan kecil ini dengan VOC secara tidak langsung mengikatkan diri dengan salah satu kekuatan politik bangsa barat yang bersaing memperebut wilayah di kawasan ini. Runtuhnya VOC yang mempunyai wilayah niaga seluruh Nusantara berlanjut dengan kekuatan kolonial pemerintahan Hindia Belanda, telah menempatkan dan sekaligus menjadikan pulau-pulau paling utara ini atau dalam catatan Robertus Padtbrugge, Gubernur VOC, disebutnya *het noorderiilanden* menjadi bagian dari wilayah keresidenan Manado atau juga disebut *landstreek van Menado*. Sementara itu, pulau Balut dan pulau Sarangani, yang dalam tradisi bahari warga Nusa Utara menjadi bagian dari pelayaran *badaseng*, menjadi bagian dari koloni Spanyol.

Bagian ketiga dalam tulisan ini memaparkan unsur-unsur tradisi bahari yang didukung oleh warga Nusa Utara dan warga Marore. Pembahasannya dimulai dengan pemaparan tentang sistem pengetahuan yang disebut *batiang* atau semacam pengetahuan kalendrikal dengan menggunakan posisi dan letak bulan serta bintang sebagai penanda musim dalam setiap periode; pengetahuan tentang mata angin; pengetahuan tradisional tentang "peta-bumi" Nusa Utara dan sekitarnya. Sub-bab 3.3 diberi judul: tradisi bahari: patah-tiang, hilang-dayung dimaksud untuk tidak hanya memaparkan ketrampilan mereka merakit perahu tetapi juga menggambarkan proses perubahan unsur budaya-benda atau artefak-artefak budaya bahari yang terjadi. Peralihan dari kebiasaan menggunakan alat transportasi tradisional (sampan bercadik) dan perahu layar, beralih ke penggunaan sampan bercadik (modern) bermesin buatan negara tetangga. Proses peralihan ini juga diiringi oleh hilangnya unsur-unsur budaya nir-benda seperti kemampuan melantunkan pantun ketika melaut.

Bagian keempat dalam tulisan ini menyajikan keterangan tentang tradisi *badaseng*, sebuah kebiasaan menetap sementara di pulau-pulau kecil terdekat maupun di pesisir daratan besar sebagai tempat persinggahan terdekat ke lokasi mereka melaut. *Badaseng* tidak sekedar kebiasaan menetap sementara di salah satu pesisir pantai, terutama pelabuhan yang dekat dengan lokasi pilihan untuk melaut, melainkan juga dijalani berdasarkan hubungan yang sudah terjalin sebelumnya dengan warga setempat yang sudah menghuni pulau tersebut. Modal sosial dari tradisi *badaseng* adalah kemampuan untuk menuturkan silsilah serta mempertahankannya dengan warga setempat sehingga mereka akan diterima sebagai bagian dari keluarganya dan bukanlah sebagai orang asing. Tradisi mana menjadi salah satu penyebab terjadinya diaspora orang Marore di mana-mana baik di kawasan Laut Sulawesi maupun Laut Mindanao. Terjadinya diaspora warga Marore sekaligus menciptakan ruang-jejaring (warga) Marore. Berbeda dengan diaspora komunitas etnis lainnya seperti diaspora Yahudi, bangsa yang dengan siapa istilah diaspora ini muncul dan menjadi konsep dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora, diaspora warga Marore dan warga Nusa Utara tidak dapat dipisahkan dari tanah air leluhur mereka. Ikatan dengan kubur nenek moyang, tempat menguburkan ari-ari, menjadi pengikat antara warga dengan kampung halamannya. Singkat kata, diaspora dan perantauan warga Nusa Utara dan orang Marore serta hubungan mereka dengan tanah airnya, tertata dalam bait lagu daerah berjudul: *Dala pia bongkone Mahoro* (Di sana, di mana ada puncak gunung yang tinggi); khususnya pada bait berbunyi:

*Banuaku i kekendage
Tamailang su ralungngu naung
Maning maliku dunia,
Sau mesule ko kapia*

Negeri yang kukasihi
Takkan mungkin
kulupakan
Walau dunia ku jalani
Aku kan kembali jua

Tradisi *badaseng* dengan unsur-unsur budaya bahari kian waktu kian pudar dari praktek hidup maupun ingatan warga. Sejak awal abad ke- 20, komunitas pendukung budaya bahari yang oleh Lapien disebutnya “raja laut” ini tidak mampu lagi bertahan menghadapi “adi kuasa” dalam rupa unsur budaya teknologi tinggi yang memperkenalkan mesin, kapal motor, dan perahu-perahu motor. Peralihan dari unsur budaya bahari tradisional ke motorisasi di satu sisi menghadirkan efisiensi tetapi di sisi lain telah menciptakan ketergantungan.

Bagian kelima dalam tulisan ini menggambarkan posisi Marore dan Matutuang yang berada di antara Tinakareng (di Sangihe) dan Batuganding (di Filipina). Posisi ini tercipta atau tampak dalam proses mobilitas warga yang melakukan pelayaran melintasi batas wilayah dua negara. Posisi Marore dan Batuganding sebagai *check poin station* bagi pelintas batas baik warga Indonesia maupun warga Filipina menjadi tempat sementara dan batu loncatan sebelum menuju pulau-pulau atau tempat lainnya baik di wilayah lintas-batas maupun ke luar wilayah lintas-batas. Bagian ini diawali dengan paparan pada sub-bab berjudul “Satuan Sosio-kultural yang terpilah dua”. Dua hasil kajian kesejarahan menunjukkan bahwa kawasan perbatasan sesungguhnya pada masa lalu-lampau adalah sebuah satuan jejaring-niaga tradisional yang terpilah dua oleh kehadiran kekuatan negara barat. Persaingan antara mereka yang diselesaikan secara damai (Perjanjian Munster) memilah dua kawasan niaga tradisional dan sejak itu pulau Marore terpisah dari pulau Balut dan Sarangani secara

administrasi pemerintahan. Dalam bagian ini juga dipaparkan secara singkat Perjanjian Lintas Batas antara Indonesia dengan Filipina, dan gambaran tentang para pelintas batas masa kini.

Tulisan ini diakhiri dengan uraian tentang permasalahan aktual, mulai dari wacana status pulau Marore – yang dibayangkan – sebagai “beranda depan”, yaitu sebuah kawasan yang secara geografis berbatasan dengan negara lain dan menunjukkan gambaran tentang kondisi wilayah serta jatidiri bangsa Indonesia yang bermartabat;” serta perhatian pemerintah dalam bentuk kebijakan-kebijakan pembangunan pulau Marore sebagai pulau di perbatasan. Juga dipaparkan tentang kehadiran proyek pembangunan yang mendatangkan manfaat bagi warga ketika pelaksanaannya, karena warga memperoleh kesempatan bekerja dan mencari uang ketika proyek pembangunan dilaksanakan. Pada bagian akhir tulisan ini dipaparkan semacam garis besar atau resume dari paparan dalam tulisan ini mulai dari bab awal hingga bab akhir serta beberapa saran.

Baik kajian-kajian terdahulu maupun kajian ini belum dapat mengungkap semua aspek kehidupan warga masyarakat di daerah perbatasan. Untuk itu dipandang perlu melakukan sebuah penelitian yang lebih mendalam dan sifatnya holistik, baik itu sebagai rekaman keadaan serta berbagai permasalahan yang dihadapi warga di sana.

Seyogianya, setiap upaya penyusunan strategi, kebijakan dan program pembangunan di kawasan perbatasan memerlukan kajian awal sehingga setiap program dapat menjawab kebutuhan warga dan bukan sebagai pelaksanaan keinginan pemerintah. Warga di perbatasan memerlukan pendekatan khusus dan tidak dapat diperlakukan sama seperti warga di lokasi lainnya yang berbeda secara geografis dan latar sosial budayanya.

Meng gali kembali kearifan lokal dalam berbagai sektor kehidupan sehingga ketergantungan pada hasil-hasil teknologi

dapat disubstitusi dengan pengetahuan berdasarkan kearifan lokal di berbagai aspek kehidupan warga.

Sudah saatnya dalam menempatkan aparat pemerintah menempati pos-pos di pulau Marore tidak didasarkan pada prinsip sebagai tempat hukuman atau pembuangan bagi aparat yang perlu dibina, melainkan sebagai ajang uji prestasi dan setiap keberhasilan yang mereka ciptakan memperoleh imbalan dalam bentuk promosi-promosi khusus dalam penjenjangan jabatannya.

Dari sisi pertahanan dan keamanan, sudah saatnya membangun ketahanan-budaya sebagai daya tangkal terhadap berbagai bentuk provokasi dan ancaman terhadap loyalitas serta ketaatan warga sebagai anak bangsa. Penempatan aparat keamanan yang mengutamakan prinsip hidup akrab dengan warga dan bukan pendekatan kekuasaan akan menumbuhkan-kembangkan daya-tahan-sosio-kultural sebagai modalitas hidup berbangsa dan bernegara.

KEPUSTAKAAN:

(Buku & Artikel)

- ABE Ken-ichi & ISHII Masako (Eds.), *POPULATION MOVEMENT IN SOUTHEAST ASIA: CHANGING IDENTITIES AND STRATEGIES FOR SURVIVAL*. JCAS Symposium Series 10. 2000.
- Aswatini, "Mobilitas Internasional Penduduk di Wilayah Perbatasan Indonesia" dalam Noverina, Mita, dkk., 2007, *DINAMIKA MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan. PPK-LIPI, Jakarta (halaman 13 – 44).
- Aswatini, "Wilayah Perbatasan Indonesia dalam Konteks Pengerahan Tenaga Indonesia (TKI) Ilegal" dalam Mita Noveria, dkk., 2008, *MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN DAN KEGIATAN ILEGAL*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-LIPI), Jakarta, (halaman 19 – 42);
- Bandiyono, Suko, "Mobilitas Penduduk Sangihe" dalam Noverina, Mita, dkk., 2007, *DINAMIKA MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan. PPK-LIPI, Jakarta (halaman 77 – 102).
- Butcher, John G. *THE CLOSING OF THE FRONTIER. A History of the Marine Fisheries of Southeast Asia c. 1850 – 2000*. KITLV

Press, Leiden, 2004;

Brilman, D. 1938, *ONZE ZENDELINGSVELDEN. DE ZENDING OP DE SANGI – EN TALAUD – EILANDEN*. Stichting Hoenderloo. Terjemahan terakhir buku ini diberi judul “Kabar Baik di Bibir Pasifik”. Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.

Cribb, Robert & Michele Ford (Eds.), *INDONESIA BEYOND THE WATER’S EDGE. Managing an Archipelagic State*. ISEAS, 2009.

Djohan, Eniarti B., “Dinamika Mobilitas Sosial Budaya Masyarakat Skou di Perbatasan Papua” dalam Noverina, Mita, dkk., 2007, *DINAMIKA MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan. PPK-LIPI, Jakarta (halaman 131 – 162).

Mustafa Abubakar, 2006, *MENATA PULAU-PULAU KECIL PERBATASAN, BELAJAR DARI KASUS SIPADAN, LIGITAN, DAN SEBATIK*. Penerbit Kompas, Jakarta.

Haba, John, Riwanto Tirtosudarmo, Robert Siburian, Herman Hidayat, 2002, *DINAMIKA SOSIAL BUDAYA DAERAH PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR DAN SABAH*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI).

Harsono, Andreas, “*Miangas, nationalism and isolation*”, dalam *Tempo*, No. 13/V/ November 30 – December 06, 2004.

Hayase, Shinzo, Domingo M. Non dan Alex J. Ulaen, 1999, *SILSILAH/TARSILAS (GENEALOGIES) AND HISTORICAL NARRATIVES IN SARANGANI BAY AND DAVAO GULF REGIONS, SOUTH MINDANAO, PHILIPPINES, AND SANGIHE-TALAUD ISLANDS, NORTH SULAWESI, INDONESIA*, Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University.

Hayase, Shinzo, 2007, *MINDANAO ETHNOHISTORY BEYOND NATIONS, MAGUINDANAO, SANGIR, AND*

BAGOBO SOCIETIES IN EAST MARITIME SOUTHEAST ASIA, Ateneo de Manila University Press.

Hoetagaol, Sophia & Alex J. Ulaen, "Smugglers To Pedlars in the Sangihe and Talaud: 'the Islanders in Between' (A Preliminary Study)" makalah dibacakan di *International Seminar on Maritime Communities in a Changing World: Challenges of Development Programmes, The Cooperation between Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University and Sam Ratulangi University Manado, 23 – 26 September 1997.*

Iwao Ushijima & Cynthia Neri Zayas (Eds.), *FISHERIES OF THE VISAYAS*. University of the Philippines Press, Diliman, Quezon City, 1995.

Kratoska, Paul H., Remco Raben, Henk Schulte Nordholt (Eds.), *LOCATING SOUTHEAST ASIA: Geographies of Knowledge and Politics of Space*. Singapore University Press, 2005.

Lapian, A.B., 2009, *ORANG LAUT, BAJAK LAUT. RAJA LAUT. SEJARAH KAWASAN LAUT SULAWESI ABAD XIX*. Komunitas Bambu, EFEQ, KITLV, ANRI, UGM, UNPAD.

Latifa, Ade, "Feminisasi Migrasi: Studi Kasus di Wilayah Perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara" dalam Noverina, Mita, dkk., 2007, *DINAMIKA MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan. PPK-LIPI, Jakarta (halaman 163 – 198)

Latifa, Ade, "Perdagangan Lintas Batas Manusia dari Perspektif Gender" dalam, Mita Noveria, dkk., 2008, *MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN DAN KEGIATAN ILEGAL*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-LIPI), Jakarta (halaman 43 – 68).

- Lumenta, Dave, *"Borderland Identity Construction Within a Market Place of Narratives: Preliminary Notes on the Batang Kanyau Iban in the West Kalimantan"* dalam Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Jilid XXX, No. 2, 2004, halaman 1 – 26.
- Madu, Ludiru, Aryanta Nugraha, Nikolaus Loy, Fausan (Editor), MENGELOLA PERBATASAN INDONESIA DI DUNIA TANPA BATAS: ISU, PERMASALAHAN DAN PILIHAN KEBIJAKAN. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Munandar, Aris "Memahami Identitas Sosial Komunitas Lokal di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia" dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. XIX (1), 2011, halaman 25 – 40.
- Nainggolan, Poltak Partogi (Ed.), 2004, BATAS WILAYAH DAN SITUASI PERBATASAN INDONESIA: ANCAMAN TERHADAP INTEGRITAS TERITORIAL. Tiga Putra Utama, Jakarta.
- Noverina, Mita, dkk., 2007, DINAMIKA MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan. PPK-LIPI, Jakarta.
- Noverina, Mita, "Mobilitas Penduduk Sebatik-Tawau: Dari perdagangan sampai pengobatan" dalam Noverina, Mita, dkk., 2007, DINAMIKA MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan. PPK-LIPI, Jakarta (halaman 45 – 76)
- Noveria, Mita, dkk., 2008, MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN DAN KEGIATAN ILEGAL. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-LIPI), Jakarta.
- Noveria, Mita, "Penyelundupan Kayu: Aktivitas Ilegal dalam Mobilitas Penduduk di Perbatasan Kalimantan – Malaysia" dalam Noveria, Mita, dkk., 2008, MOBILITAS PENDUDUK

- DI WILAYAH PERBATASAN DAN KEGIATAN ILEGAL. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-LIPI), Jakarta. (halaman 137 – 172)
- Pranoto, Alvini. "Dinamika Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan NTT ke Perairan Australia" dalam Noverina, Mita, dkk., 2007, *DINAMIKA MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan. PPK-LIPI, Jakarta (halaman 103 – 130)
- Purdijatno, Tedjo Edhy, Laksamana, SH., 2010, *MENGAWAL PERBATASAN NEGARA MARITIM*. Penerbit Grasindo Jakarta.
- Purwaningsih, Sri Sunarti dan Eniarti Djohan "Mobilitas PSK di Wilayah Perbatasan dan Potensi Penularan Infeksi Menular Seksual: Kasus Kota Batam" dalam Mita Noveria, dkk., 2008, *MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN DAN KEGIATAN ILEGAL*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-LIPI), Jakarta, (halaman 69 - 104).
- Raharto, Aswatini, dkk., *MIGRASI KEMBALI ORANG SANGIR TALAUD DARI PULAU-PULAU DI WILAYAH FILIPINA*. Laporan Penelitian Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 1993.
- Raharto, Aswatini, "Return Migration Among the Sangirese: Life and Adjustment in the Homeland" dalam ABE Ken-ichi & ISHII Masako (Eds.), 2000, *POPULATION MOVEMENT IN SOUTHEAST ASIA: CHANGING IDENTITIES AND STRATEGIES FOR SURVIVAL*. JCAS Symposium Series 10.
- Haning Romdiati "Perdagangan Ilegal dan Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan" dalam Noveria, Mita, dkk., 2008, *MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN DAN KEGIATAN ILEGAL*. Lembaga Ilmu Pengetahuan

- Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-LIPI), Jakarta, (halaman 105 – 137)
- Salindeho, Winsulangi & Pitres Sombowadile, KAWASAN SANGIHE–TALAUD–SITARO: DAERAH PERBATASAN KETERBATASAN PEMBATASAN. Puspada Jogja, 2008.
- Setiawan, Bayu, “Perdagangan Lintas Batas Belu-Timor Leste dan Keberadaan Pasar Perbatasan” dalam Noverina, Mita, dkk., 2007, DINAMIKA MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan. PPK-LIPI, Jakarta (halaman 199 – 238).
- Setiawan, Bayu, “Pemberlakuan Pas Lintas Batas di Wilayah Perbatasan Belu-Timor Leste: Upaya Mengatasi Pelintas Batas dan Perdagangan Ilegal” dalam Noveria, Mita, dkk., 2008, MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN DAN KEGIATAN ILEGAL. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-LIPI), Jakarta (halaman 225 – 254).
- Sianturi, Eddy MT dan Nafsiah, “Strategi Pengembangan Perbatasan Wilayah Perbatasan NKRI” dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. XIX (1), 2011, halaman 1 – 12.
- Siburian, Robert, “Kondisi Perekonomian Masyarakat Perbatasan: Entikong dan Nunukan” dalam Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-ilmu Sosial Indonesia, Jilid XXX, No. 2, 2004, halaman 113 – 137.
- Siburian, Robert, “Ikatan Budaya Masyarakat Lintas Batas sebagai Modal Sosial Pembangunan Daerah Perbatasan di Kabupaten Belu” dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. XIX (1), 2011, halaman 41 – 54.
- Sri Suharjo, Nasrun Sandiah, Pristiwanto, 2002, MARORE, SUATU KAMPUNG DI WILAYAH PERBATASAN. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado, editor Helmi Aswan.

- Toni Soetopo, Toni, "Kegiatan *Illegal Logging* di Perbatasan Kapan Berakhir: Kasus Provinsi Papua" dalam Noveria, Mita, dkk., 2008, MOBILITAS PENDUDUK DI WILAYAH PERBATASAN DAN KEGIATAN ILEGAL. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-LIPI), Jakarta, (halaman 173 – 196).
- Tan-Culamar, Evelyn, 1989, *THE INDONESIAN DIASPORA IN SOUTHERN MINDANAO: IMPLICATION FOR THE PHILIPPINES – INDONESIA RELATIONS*. (Thesis, mimeograph), Asian Center University of the Philippines Dilliman, Quezon City.
- Tan-Culamar, Evelyn, "Migrations Across the Sulawesi Sea" dalam *Human Flow and Creation of New Cultures in Southeast Asia. Proceedings of the Symposium (1996)*, diterbitkan oleh *Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa. Tokyo, 1998*.
- Tirtosudarmo, Riwanto & John Haba (Penyunting), 2005, DARI ENTIKONG SAMPAI NUNUKAN, DINAMIKA DAERAH PERBATASAN KALIMANTAN MALAYSIA TIMUR (SERAWAK – SABAH), Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Tjitroesmi, Endang, "Perekonomian Daerah Perbatasan: Potensi Ekonomi dan Perdagangan Lintas Batas NTT-Timor Leste" dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. XIX (1), 2011, halaman 13 - 24.
- Ulaen, Alex & Takashi Shiraishi, "The Traffic Zone Reconsidered: Menado – Sangihe/Talaud – Mindanao" dalam Noboru Ishikawa (Ed.) 2008, *FLAWS AND MOVEMENTS IN SOUTHEAST ASIA*. *Kyoto University Press, Kyoto*.
- Ulaen, Alex J., Triana Wulandari, Yuda B. Tangkilisan, SEJARAH WILAYAH PERBATASAN INDONESIA – FILIPINA 1928 – 2010: DUA NAMA SATU JURAGAN. Direktorat Geografi Sejarah, Direktorat Jenderal Sejarah

dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI. 2011.

Ulaen, Alex J., 2003, NUSA UTARA: DARI LINTASAN NIAGA KE DAERAH PERBATASAN. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

....., 2010, "Nusa Utara dalam Peta Sejarah Bahari" Kumpulan Tulisan 2003 – 2004. Pusat Kajian Komunitas Adat & Budaya Bahari, Marin-CRC Manado.

....., 2010, MEMBACA SANGI-TALAUD. BIBLIOGRAFI 1724 – 2006. Jilid 1. Pusat Kajian Komunitas Adat & Budaya Bahari, Marin-CRC Manado.

....., 2010, MEMBACA SANGI-TALAUD. BIBLIOGRAFI 1724 – 2006. Jilid 2. Pusat Kajian Komunitas Adat & Budaya Bahari, Marin-CRC Manado.

Urry, John, 2012. "Mobilitas dan Teori Sosial" dalam Bryan S. Turner (ed.) TEORI SOSIAL DARI KLASIK SAMPAI MODERNISME. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, halaman 795 – 825.

Velasco, Djorina, "Navigating the Indonesia-Philippine Border: The Challenges of Life in the Borderzone". *Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies*, 2010, 25 (1-2): 95 – 118.

Velasco, Djorina, "Between Manado and Davao: How the Indonesian Island of Miangas is making use its Philippine ties"; dalam *Newsbreak Online* (11 Februari 2007).

Yamamoto, Matori, "Samoan Diaspora and Ceremonial Exchange" in Ken'ichi Sudo and Shuji Yoshida (Eds.) *CONTEMPORARY MIGRATION IN OCEANIA: DIASPORA AND NETWORK. Population Movement in the Modern World I. JCAS Symposium Series 3. 1997*, The Japan Center for Area Studies, National Museum of Ethnology, Osaka.

Zaelany, Andy Ahmad, "Pasar Laut di Area Perbatasan Perairan Laut Negara: Kasus Pa'taripang – Pa'sunu – pa'es dari pulau Barang Lompo" dalam Noveria, Mita, dkk.,

2008, *Mobilitas Penduduk di Wilayah Perbatasan dan Kegiatan Ilegal*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Pusat Penelitian Kependudukan (PPK-LIPI), Jakarta, (halaman 197 – 225);

Laporan, Dokumen & Majalah:

BPPK-Deplu RI & UNSRAT Manado, 2010, *Identifikasi Masalah Perlindungan Perbatasan Kepulauan Talaud (Indonesia – Filipina) dalam Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politik*. Laporan Penelitian.

Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI, 2008, *“Revitalisasi Model Pemberdayaan Pranata Sosial di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara”* (Ringkasan Laporan, 20 halaman).

TEMPO, 4 Desember 2005. Selingan: *“Perantau dari Nusa Utara”* (69 – 72); *“Satu Rumah Dua Paspor”* (74); *“Jejak Sangihe di Mindanao”* (76 – 77); *“Warta dari General Santos”* (78); *“Anak-anak Mereka Menjadi Orang Filipina”* (80). Reportase dari Hanibal Wijayatna dan Verianto Madjowa (Warta

Studi tentang Sosial Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Marore Kabupaten Kepulauan Sangihe ini merupakan bagian dari kajian ekspresi keragaman budaya dibiayai oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado.

Studi ini mencoba memahami kehidupan pendukung tradisi bahari di Nusa Utara dan khususnya warga Marore di wilayah perbatasan antar negara (Indonesia – Filipina). Studi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan etnohistori meskipun tidak menutup penggunaan pendekatan lainnya yang lazim dalam kajian humaniora.

Beberapa temuan dalam studi ini antara lain, tradisi bahari yang didukung warga nusa utara memiliki ekspresi budaya yang terekam dalam pengetahuan tentang musim, perbintangan, klasifikasi dan orientasi geografis, dan mata angin secara tradisional. Pengetahuan tersebut menjadi pedoman ketika mereka melaut dan menjalankan tradisi *badaseng*.

Masuknya unsur budaya baru seperti penggunaan mesin sebagai penggerak perahu, telah menggeser penggunaan perahu sampan secara tradisional, sekaligus mempengaruhi ilmu pengetahuan dan unsur budaya-nir-benda dari dunia kognisi warga.

Praktek *badaseng* menghasilkan diaspora warga pendukung tradisi bahari tidak sebatas wilayah tanah air tetapi juga sampai ke wilayah negara tetangga. Praktek melaut dengan tradisi *badaseng* ini mendasari warga melakukan aktivitas melintasi batas dua negara dan berdiaspora di Mindanao.

Kenyataan tersebut mendorong pemerintah kedua negara sepakat mengadakan perjanjian lintas batas yang isinya mengatur repatriasi, legalisasi, dan naturalisasi warga Nusa Utara dan khususnya Marore yang menetap di wilayah Filipina.



Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6
Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta

ISBN 978-602



Perpus
Jende